

# Self Learning



Sebagai Embrio  
Pengembangan Diri  
Anggota Legislatif



Agus Wahyudi, S.H., M.Si.

Editor: Slamet Riyanto, S.T., M.M.



# ***SELF LEARNING***

**Sebagai Embrio Pengembangan Diri  
Anggota Legislatif**

## **UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

### Fungsi dan Sifat hak Cipta Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Hak Terkait Pasal 49

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

### Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

***SELF LEARNING***  
**Sebagai Embrio Pengembangan Diri**  
**Anggota Legislatif**

Agus Wahyudi, S.H. M.Si.

Editor: Slamet Riyanto, S.T., M.M.

***SELF LEARNING***  
**SEBAGAI EMBRIO PENGEMBANGAN DIRI ANGGOTA LEGISLATIF**

**Agus Wahyudi**

Editor :  
**Slamet Riyanto**

Desain Cover :  
**Agus Wahyudi**

Tata Letak Isi :  
**Agus Wahyudi**

Ukuran :  
**Viii, 172 hlm, Uk: 17.5x25 cm**

ISBN :  
**978-623-02-2894-0**

Cetakan Pertama:  
**Mei, 2021**

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

Copyright © 2017 by Deepublish Publisher  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH**  
**(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman

Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581

Telp/Faks: (0274) 4533427

Website: [www.deepublish.co.id](http://www.deepublish.co.id)

[www.penerbitdeepublish.com](http://www.penerbitdeepublish.com)

E-mail: [deepublish@ymail.com](mailto:deepublish@ymail.com)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan karunia, nikmat, tuntunan, hidayah, dan lindungan-Nya, sehingga buku teks yang berjudul “*Self Learning Sebagai Embrio Pengembangan Diri Anggota Legislatif*” ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini dapat diselesaikan diantara kesibukan yang penulis jalani. Meskipun banyak hambatan dalam proses pengerjaannya, pada akhirnya buku ini selesai dengan baik. Buku ini selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan akademisi, Aparatur Sipil negara dan khususnya anggota DPRD itu sendiri.

Buku ini merupakan sebuah hasil kajian penelitian terhadap perilaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan diri (*self-development*) mereka. Seperti kita ketahui bersama bahwa anggota legislatif di era reformasi sekarang ini dituntut untuk lebih memahami aspirasi masyarakat yang semakin kompleks dan beragam. Dengan “belajar mandiri”, baik melalui literatur dan referensi yang ada, mereka juga melakukan teknik mentoring kepada senior mereka yang sudah terpilih pada periode sebelumnya.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang memberikan masukan dan diskusinya dalam proses rekonstruksi pemikiran dalam buku ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang telah bertindak akomodatif dan responsif terhadap penelitian ini, sehingga buku ini dapat segera diselesaikan tepat waktu.

Tentunya buku ini belumlah sebagai dapat dikaryakan sebagai karya yang sempurna, namun tentunya sebagai ikhtiar untuk menyebarkan ilmu pengetahuan khususnya kajian pengembangan diri DPRD. Untuk itu besar harapan kami sebagai penulis agar dapatnya buku ini menjadi referensi penting untuk

kajian keilmuan yang berkaitan dengan pengembangan anggota legislative di masa yang akan datang.

Sebagai bahan perbaikan, di masa mendatang diharapkan adanya masukan, saran dan kritik membangun dari para pembaca, sehingga bisa semakin mendekati kesempurnaan. Terakhir, semoga buku ini memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Aamiin.

Surabaya, 10 Mei 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
BAB II	DEFINISI PEMBELAJARAN MANDIRI .....	10
	A. Orientasi <i>Behaviouristik</i> (Tingkah Laku).....	14
	B. Orientasi <i>Cognitivist</i> (Gestalt) .....	14
	C. Orientasi <i>Humanistik</i> .....	15
	D. Aliran <i>Social Learning</i> ( <i>Cognitive</i> ).....	17
	E. Aliran <i>Constructivism</i> .....	18
	F. Aliran <i>Holistic Learning</i> .....	19
BAB III	PENTINGNYA PEMBELAJARAN MANDIRI BAGI ANGGOTA LEGISLATIF .....	65
BAB IV	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KESADARAN DIRI DAN INISIATIF ANGGOTA LEGISLATIF DALAM BELAJAR MANDIRI .....	89
	A. Pengalaman Menjadi Anggota Dewan.....	90
	B. Pengalaman Organisasi/Partai Politik .....	97
	C. Pengalaman Pendidikan Formal.....	104
	D. Kesiapan Belajar ( <i>Readiness to Learn</i> ) untuk Meng- <i>upgrade</i> dan Meng- <i>up date</i> Diri .....	114
BAB V	SUMBER DAN ORIENTASI BELAJAR.....	121
	A. Sumber Belajar .....	121
	B. Orientasi Belajar ( <i>Orientasion to Learning</i> ) .....	128
BAB VI	STRATEGI NGGOTA LEGISLATIF DALAM MENYUKSESKAN PEMBELAJARAN MANDIRI .....	137
	A. Motivasi Menjadi Anggota DPRD .....	138
	B. Adaptasi Awal Terkait Tugas Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) DPRD.....	148
	C. Harapan (Solusi) Anggota DPRD.....	156
BAB VII	PENUTUP .....	165
	DAFTAR PUSTAKA .....	167
	PROFIL PENULIS .....	171

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kegiatan Bimtek DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2014- 2019 oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur.....	4
Tabel 2	Kegiatan Bimtek/Workshop DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2014-2019 Oleh Parpol.....	4
Tabel 3	Rekapitulasi Perda dan Asal Inisiasi Tahun 2014 ...	69
Tabel 4	Rekapitulasi Perda dan Asal Inisiasi Tahun 2015 ...	71
Tabel 5	Rekapitulasi Perda dan Asal Inisiasi Tahun 2016 .	73
Tabel 6	Komposisi Incumbent dan Non-incumbent Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2014 – 2019.....	84
Tabel 7	Pengalaman Menjadi Anggota Dewan .....	96
Tabel 8	Pengalaman Berorganisasi dan Berpolitik.....	103
Tabel 9	Pengalaman Pendidikan Formal.....	113
Tabel 10	Meng-up Grade dan Meng-up Date Diri .....	119
Tabel 11	Sumber Belajar .....	127
Tabel 12	Orientasi Belajar .....	134
Tabel 13	Motivasi Menjadi Anggota Dewan .....	147
Tabel 14	Adaptasi Awal Terkait Tupoksi .....	155
Tabel 15	Harapan Terkait Tupoksi.....	162



# BAB I

## PENDAHULUAN

Menjadi anggota legislatif merupakan impian bagi banyak orang. Hal ini terbukti dari fakta banyaknya anggota masyarakat yang saling berlomba-lomba dalam mengikuti kontestasi politik terutama dalam momen pemilihan umum (pemilu). Dari pemilu ke pemilu, data menunjukkan bahwa semakin banyak anggota masyarakat yang berminat untuk ikut terlibat secara langsung dalam proses menjadi anggota legislatif dari mulai seleksi di tingkat partai.

Semakin banyaknya antusiasme masyarakat untuk menjadi anggota legislatif pada dasarnya sangat baik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Kondisi ini setidaknya memberikan sebuah gambaran bahwa pada zaman sekarang, semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap kondisi perkembangan negaranya sehingga memunculkan sikap ingin berkontribusi terhadap perjalanan sejarah pembangunan Indonesia ke depan.

Namun demikian, banyak diantaranya masyarakat yang belum memahami bahwa menjadi seorang anggota legislatif tidaklah semudah yang dibayangkan. Sebagai seorang legislator tentunya banyak hal yang perlu dipelajari baik dalam hal yang bersifat teknis maupun dalam hal yang bersifat konseptual. Hal-hal tersebut tentunya menjadi sebuah kewajiban untuk dipelajari mengingat seorang anggota legislatif pada dasarnya terikat oleh peraturan yang bersifat birokratis. Dengan demikian, maka setiap gerak-gerik seorang anggota legislatif harus senantiasa memerhatikan peraturan perundang-undangan yang ada. Bagi sebagian orang, menjadi anggota legislatif merupakan sebuah pengalaman yang baru mengingat minimnya pendidikan yang diberikan oleh partai sebagai lembaga yang menguasainya. Oleh karena itu tidak jarang seorang anggota legislatif mengalami kebingungan dalam menjalankan tugasnya terkait fungsi, tugas, dan kewajibannya yang sangat berat, rumit, dan kompleks dalam mengemban amanat rakyat, menentukan dan mengawal kebijakan pemerintahan daerah, pengendali anggaran, serta mengontrol, dan mengawasi pembangunan di wilayahnya.

Dalam UU No. 22/1999, UU No. 32/2004, UU No. 27/2009, UU No. 23/2014, maupun dalam UU No. 17/2014 disebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, kapasitas dan kapabilitas anggota DPRD akan berkorelasi secara langsung dengan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah. Dengan demikian, upaya-upaya dalam rangka peningkatan kompetensi anggota DPRD sudah semestinyadilakukan secara terprogram dan berkelanjutan baik oleh partai politik, sekretariat DPRD, maupun secara mandiri.

Sebenarnya, dalam bab IV Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor I Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, pelaksanaan hak pada bagian kesatu umum pasal 8 dan 9 disebutkan bahwa anggota DPRD memiliki hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan demikian, meskipun Parpol maupun Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur sudah menyelenggarakan Diklat/Bimtek/*workshop*, namun kuantitasnya masih dianggap minim. Terkait dengan hal masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.

Namun tersebut, tercatat bahwa sejak anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2014-2019 terpilih, hanya ada satu kegiatan Bimtek yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. Seperti tertera pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Kegiatan Bimtek DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2014-2019 oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur**

No	Tema	Waktu	Jumlah Peserta
1	Penajaman Kebijakan dan anggaran Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mewujudkan Masyarakat Jawa Timur yang Berdaya dan Mandiri di Era Undang-undang Desa	28-30 September 2015	41
2	Penajaman Kebijakan dan anggaran Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mewujudkan Masyarakat Jawa Timur yang Berdaya dan Mandiri di Era Undang-undang Desa	1-3 Oktober 2015	46

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur (2017).

Di lain pihak, kegiatan Bimtek yang dilaksanakan masing-masing Parpol/fraksi, sejak anggota DPRD Provinsi Jawa Timur terpilih, sampai dengan saat studi lapangan buku ini dilaksanakan, hanya ada satu sampai dengan dua kegiatan Bimtek yang dilaksanakan. Seperti tertera di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Kegiatan Bimtek/Workshop DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2014-2019 Oleh Parpol**

No	Tema	Waktu	Parpol Penyelenggara	Peserta
1	Implementasi Peran dan Fungsi DPPRD dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik	26-28 Juni 2015	DPW PKB	13

No	Tema	Waktu	Parpol Penyelenggara	Peserta
2	Penguatan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	20-23 Januari 2015	DPD\ Gerindra	13
3	Membangun Kemandirian Bangsa untuk Kesejahteraan Rakyat	5-7 Juni 2015	DPP Hanura	2
4	Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik	12-14 Juni 2015	DPW Nasdem	4
5	Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik	23-25 Oktober 2015	DPW Nasdem	2
6	Penguatan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	29-31 Mei 2015	DPD PDI-P	19
7	Penguatan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	12-15 Maret 2015	DPW PKB	10
8	Penguatan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	16-19 Oktober 2015	DPW PKB	10
9	Peningkatan Kapasitas Keanggotaan Dewan dalam Rangka Me-	27-30 Mei 2015	DPW PKS	5

No	Tema	Waktu	Parpol Penyelenggara	Peserta
	tingkatkan Kinerja Anggota Dewan PKS di Parlemen			
10	Penguatan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	17-20 Maret 2016	DPW PKB	20
11	Penguatan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	29-31 Juli 2016	DPD PDI P	19
12	Penguatan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	14-17 April 2016	DPP Gerindra	13
13	Penguatan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	30 Sept - 2 Okt 2016	DPP Demokrat	13
14	Penguatan Tugas dan Fungsi DPRD dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah	30 Sept - 2 Okt 2016	DPD Golkar	11
15	Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik	27-30 Mei 2016	DPP PAN	7

No	Tema	Waktu	Parpol Penyelenggara	Peserta
16	Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik	9-12 Mei 2016	DPW PKS	6
17	Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik	29-31 Juli 2016	DPW PPP	5
18	Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik	12-14 Agustus 2016	DPP Nasdem	6
19	Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik	17-20 Nop 2016	DPW PKB	20
20	Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik	1-11 Oktober 2016	DPP Gerindra	13
21	Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik	1-4 Nopember 2016	DPP PAN	7
22	Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik	9-12 Mei 2016	DPP PKS	6
23	Implementasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik	12-14 Agustus 2016	DPP PPP	5

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur (2017).

Fakta minimnya penyelenggaraan bimtek/workshop tersebut dipandang berkebalikan dengan tuntutan kebutuhan standar kompetensi para anggota DPRD yang sangat besar. Hal ini mengingat DPRD dan pemerintah daerah harus mampu melaksanakan azas *check and balances* dalam menciptakan *good governance* di daerahnya masing-masing.

Kondisi seperti ini juga kemudian melahirkan kenyataan bahwa kemampuan para anggota DPRD masih relatif di bawah kemampuan birokrat pemerintah daerah (Thoha, 2002). Hal tersebut yang kemudian memunculkan kesan tentang pihak eksekutif yang merasa kewalahan menghadapi sikap para anggota DPRD, karena pada umumnya mereka belum memahami tupoksi dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan di tingkat daerah.

Dalam hal menjalankan tugasnya, DPRD memiliki dua fungsi. *Pertama*, DPRD sebagai representasi rakyat dituntut memiliki sensitivitas dan kapabilitas yang mumpuni dalam menyerap, merangkum, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. *Kedua* sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD dituntut untuk memiliki kapasitas teknokratik yang memadai sehingga dapat menjadi mitra yang seimbang bagi eksekutif. Peran tersebut seringkali belum dibarengi dengan pelaksanaan fungsi DPRD yang optimal (Thoha, 2002).

Agar keseluruhan fungsi anggota DPRD bisa maksimal dijalankan, maka anggota DPRD harus memiliki kompetensi. Menurut Thoha (2002), persoalan yang kerap ditemukan pada

anggota DPRD adalah dalam hal menjalankan fungsi legislasi, seperti:

1. Permasalahan yang sering terjadi dalam menjalankan fungsi legislasi DPRD di beberapa daerah pada umumnya adalah dalam pembahasan rancangan peraturan daerah. Sebagian besar anggota DPRD ini masih sulit memahami substansi rancangan peraturan daerah. Biasanya proses pembahasan rancangan peraturan cukup lancar, namun pada proses analisis anggota DPRD pada isi dan implikasi yang ditimbulkan dari penerapannya di bidang politik, sosial, dan ekonomi masih dangkal.
2. Dalam menetapkan suatu Perda, terdapat 4 (empat) hirarki kompetensi yang perlu dikuasai oleh para anggota DPRD, yaitu; pemahaman tentang hukum dan peraturannya, teknik tentang pembuatan peraturan, teknik penggunaan istilah nomenklatur hukum dan pemerintahan, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Namun kenyataannya masih banyak yang tidak memiliki kualifikasi tersebut.

Dalam pembahasan rancangan Perda, banyak anggota DPRD yang tidak nyambung. Bila terdapat pasal-pasal yang tidak disetujui anggota DPRD, mereka masih belum mampu mengemukakan argumentasinya dengan baik. Karena anggota DPRD tidak menguasai seluruh permasalahan, maka dilibatkan sejumlah ahli dalam pembahasan rancangan peraturan daerah dan RAPBD. Minimnya kompetensi dalam menjalankan fungsi legislasi ini menjadi hal yang sangat penting mengingat aspek implementasi

penggunaan wewenang pembentukan Perda sangat tergantung kepada kemampuan anggota DPRD yang terkait legislasi dalam hal merumuskan rancangan Perda. Praktiknya selama ini, dan hampir di seluruh lembaga dewan, tidak banyak inisiatif Perda yang dihasilkan langsung dari lembaga DPRD. Kelemahan DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan Perda seharusnya dapat dikurangi jika kapabilitas anggota DPRD cukup memadai.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah sikap semangat dari anggota DPRD untuk terus belajar secara mandiri. Dengan sikap semangat pembelajaran mandiri tersebut maka kemudian akan meningkatkan kompetensi pada fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.



## BAB II

# DEFINISI PEMBELAJARAN MANDIRI

Fenomena kemandirian dalam belajar dijelaskan pada berbagai literatur dengan menggunakan label atau istilah konsep pembelajaran mandiri atau *self-directed learning* (Candy, 1991: Hiemstra, 1998: Knowles, 1975: Moore, 1986: Moore & Kearsley, 1996). Konsep *self-directed learning* jugadigunakan oleh Bandura (1986) untuk menjelaskan tentang individu mandiri yang dalam mengambil keputusan tidak tergan tung pada konsep stimulus respon seperti yang dijelaskan oleh teori belajar klasik.

Candy (1991) mengungkapkan bahwa istilah pembelajaran mandiri merupakan istilah yang berkembang pada bidang pendidikan, pengajaran, dan penelitian orang dewasa. Penggunaan istilah pembelajaran mandiri terjadi karena kemandirian dihubungkan dengan karakteristik orang dewasa yang dianggap mandiri secara psikologis. Karakteristik mandiri ini membedakan orang dewasa dengan anak-anak dan remaja.

Lebih jauh, Knowles (1975) menjelaskan bahwa istilah pembelajaran mandiri atau *self directed learning* memiliki beberapa

label istilah dalam berbagai literatur. Antara lain: *self planned learning, inquiry method independent learning, self education, self-instruction, self-teaching, self study*; dan *autonomous learning*. Knowles (1975) mendefinisikan pembelajaran mandiri (*self-directed learning*) sebagai suatu proses yang menunjukkan bahwa seseorang mengambil inisiatif, baik dengan atau tanpa bantuan orang lain, dalam melakukan diagnosis kebutuhan-kebutuhan belajar mereka, merumuskan tujuan-tujuan belajar, mengidentifikasi sumber-sumber belajar, memiliki dan melaksanakan strategi belajar yang sesuai, dan mengevaluasi hasil belajar mereka sendiri. Selaras dengan definisi Knowles, Hiemstra (1998) mengemukakan bahwa pembelajaran mandiri dapat dilihat sebagai semua bentuk belajar yang menunjukkan bahwa individu memiliki tanggung jawab utama untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi usahanya.

Baik definisi yang dikemukakan oleh Knowles maupun Hiemstra menunjukkan kata kunci dalam pembelajaran mandiri, yaitu adanya "inisiatif" dari seseorang untuk mengelola belajarnya, atau yang dijelaskan oleh Hiemstra (1994) sebagai sikap proaktif dalam mengelola belajarnya. Definisi yang dikemukakan oleh Knowles dan Hiemstra juga menjelaskan bahwa pembelajaran mandiri adalah tipe belajar yang dibedakan dengan belajar yang diarahkan oleh orang lain atau *teacher-directed learning*. Pada *teacher-directed learning*, pembelajar lebih bersikap reaktif dalam proses belajar yang diarahkan oleh guru. Sedangkan definisi pembelajaran mandiri menunjukkan bahwa subjek yang terlibat

kegiatan pembelajaran mandiri melakukan aktivitas mengatur (*regulate*), mengontrol (*control*), atau melakukan (*conduct*) kegiatan belajar mereka (Jarvis, 1992).

Seseorang yang memiliki kemampuan pembelajaran mandiri yang tinggi atau pembelajar yang mandiri (*self-directed learner*) digambarkan sebagai orang yang mampu mengontrol proses belajar (Guglielmino & Guglielmino, 1991), memiliki konsep diri yang positif dan lebih efektif dalam berbagai aspek kehidupan dibandingkan dengan mereka yang kemandirian dalam belajarnya rendah (Sabbaghian, 1980), mempergunakan bermacam-macam sumber belajar, motivasi dari dalam dirinya (*internal motivation*), dan memiliki kemampuan mengatur waktu (Guglielmino & Guglielmino, 1991). Gage dan Berliner (1998) dalam buku *Educational Psychology* menggunakan konsep *self-directed learning* untuk menjelaskan tentang belajar secara individual (*individual instruction*) atau belajar yang dilakukan oleh orang dewasa pada pendidikan terbuka (*open education*).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik sebuah pengertian bahwa *self directed learning* adalah peningkatan pengetahuan, keahlian, prestasi, dan pengembangan diri individu yang diawali dengan inisiatif sendiri dengan perencanaan belajar sendiri (*self planned*) dan dilakukan sendiri (*self conducted*), menyadari kebutuhan belajar, tujuan belajar, membuat strategi belajar, menilai hasil belajar, serta memiliki tanggung jawab sendiri menjadi agen perubahan dalam belajar.

Secara umum teori pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi enam kelompok orientasi, dimana ke-enam teori tersebut dapat diterapkan untuk pembelajaran pada semua kelompok usia serta pada semua *event* pembelajaran (Swanson & Holton, 2009):

#### **A. Orientasi *Behaviouristik* (Tingkah Laku)**

Orientasi menurut aliran tingkah laku (*behavioristik*) adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Artinya belajar adalah perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Para tokoh yang banyak berkarya dalam aliran ini antara lain; Thorndike (1911); Pavlov (1936); Wathson (1963); Hull (1943); Edwin R. Guthrie (1959); dan Skinner (1968). Aliran ini berpandangan bahwa proses pembelajaran adalah perubahan perilaku melalui dorongan dari lingkungannya. Tujuan yang dicapai adalah perubahan perilaku yang diinginkan, sedangkan peran dari guru dalam proses pembelajaran adalah mengatur lingkungan agar mendapatkan tanggapan yang diinginkan. Manifestasinya dalam pembelajaran orang dewasa adalah perilaku yang objektif, hasil kompetensi yang berasal dari proses pendidikan, dan pengembangan kemampuan.

#### **B. Orientasi *Cognitivist* (Gestalt)**

Orientasi ini muncul sebagai respon langsung terhadap batas teori tingkah laku, terutama untuk pendekatan

pembelajaran manusia. Para tokoh yang banyak berkarya pada aliran ini adalah Kurt Koffka (1941), Wolfgang Kohler (1967), Kurt Lewin (1947), Jean Piaget (1980), David Ausubel (2008), Bruner (1963), Edward E. Tolman (1959), dan Robert Gagne (1985).

Aliran ini berpandangan bahwa proses pembelajaran adalah proses yang terjadi di dalam mental manusia yang meliputi wawasan, proses informasi, ingatan, dan persepsi. Wilayah cakupannya meliputi struktur kognitif manusia. Tujuannya adalah kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keterampilan untuk belajar lebih baik. Sedangkan peran guru di sini adalah struktur isi dari kegiatan pembelajaran. Sedangkan manifestasinya adalah pengembangan kognitif, kecerdasan, pembelajaran, memori sebagai fungsi dari usia, dan pembelajaran bagaimana cara belajar.

### **C. Orientasi Humanistik**

Humanisme tidak pernah muncul sebagai teori belajar, melainkan sebagai pendekatan umum untuk psikologi. Karya Maslow dan Rogers, merupakan inti dari psikologi humanistik. Buhler (1971) seorang psikolog humanistik terkemuka menemukan asumsi-asumsi inti dari humanisme, yaitu:

1. Secara umum, orang adalah subjek utama dari psikologi humanistik. Psikologi humanistik berkaitan dengan pengetahuan tentang sejarah hidup seseorang;
2. Eksistensi dan niat dari manusia juga merupakan hal yang

penting;

3. Tujuan hidup manusia merupakan hal yang sama pentingnya;
4. Kreativitas manusia mendapatkan tempat yang utama;
5. Psikologi humanistik sering diterapkan untuk terapikejiwaan.

Selanjutnya Rogers (1980) mengemukakan prinsip-prinsip belajar yang signifikan dengan mengatakan bahwa pembelajaran harus memiliki karakter berikut ini:

1. Keterlibatan pribadi yang mencakup aspek afektif dan kognitif harus datang dari dalam diri seseorang.
2. Rasa penemuan juga harus datang dari dalam.
3. Belajar membuat perbedaan dan perilaku, sikap dan kepribadian peserta didik.
4. Peserta didik mengevaluasi dirinya, yaitu mereka dapat menentukan bagaimana pengalaman belajar yang memenuhi kebutuhannya.
5. Intinya adalah ketika pengalaman belajar sedang terjadi, maka peserta didik masuk dalam totalitas pengalaman tersebut.

Orientasi humanistik melihat bahwa proses belajar merupakan suatu tindakan pribadi untuk memenuhi potensi diri manusia. Cakupannya meliputi kebutuhan pada segi afektif dan kognitif. Sedangkan kegunaannya untuk mengaktualisasi dirinya menjadi lebih otonom. Peran guru di sini adalah memfasilitasi pengembangan manusia seutuhnya. Sedangkan manifestasinya

dalam bentuk pembelajaran orang dewasa dan diarahkan pada kemandirian belajar.

#### **D. Aliran *Social Learning (Cognitive)***

*Social learning* berfokus pada bagaimana orang belajar dengan mengamati interaksi dengan orang lain. Selain itu, teori ini juga melihat bagaimana pembelajaran itu terjadi dalam konteks sosial. Sebagian orang melihat bahwa *social learning* sebagai sesuatu hal yang sifatnya khusus dalam kaitannya dengan berperilaku manusia, karena mencerminkan bagaimana individu belajar dari orang-orang yang ada di lingkungannya. Sebagian lainnya melihat bahwa *social learning* sebagai meta-teori yang terpisah karena peserta didik juga aktif membuat pemaknaan dari interaksi tersebut. Teori pembelajaran sosial memberikan kontribusinya bahwa beragam orang selalu meniru perilaku orang lain. Inti dari proses pembelajaran sosial adalah bagaimana kita meniru teladan orang lain, tentu saja hal ini bertentangan langsung dengan aliran behavioris, dimana dalam teori ini, peserta didik harus melakukannya sendiri yang diperkuat melalui proses pembelajaran.

Tokoh dari teori ini adalah Albert Bandura dan Rotter, dimana mereka memandang bahwa proses pembelajaran adalah dengan mengamati interaksi dengan orang lain dalam konteks sosial. Cakupannya adalah interaksi antarmanusia, perilaku, dan lingkungannya. Kegunaannya adalah peran dan perilaku model

baru, sedangkan guru berperan model serta panduan peran dan perilaku yang baru. Manifestasi dalam pembelajaran orang dewasa adalah untuk sosialisasi, peran sosial, pendampingan, serta *locus of control*.

#### **E. Aliran *Constructivism***

Sebagai suatu yang kontroversial, terutama dalam versi yang lebih radikal, konstruktivisme muncul sebagai perspektif yang berguna untuk beberapa situasi pembelajaran orang dewasa (Wiswell dan Ward, 1987). Aliran konstruktivisme menekankan bahwa semua pengetahuan terikat pada konteks dan para individu membuat makna pribadi dari pengalaman belajar mereka. Dengan demikian pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari konteks dimana ia digunakan. Selain itu mereka juga menekankan sifat kumulatif dari belajar yaitu bahwa informasi baru, harus dikaitkan dengan informasi lain yang sudah ada, agar peserta didik dapat mempertahankannya atau memanfaatkannya. Untuk orang dewasa, pengalaman mungkin dapat dikonseptualisasikan sebagai upaya menciptakan corong raksasa pengetahuan sebelumnya, dimana informasi yang baru masuk ke bagian atas corong mengalir ke bawah dan akhirnya jatuh keluar, kecuali “tongkat” yang menggambarkan beberapa unsur pengetahuan sebelumnya. Peran fasilitator di sini adalah untuk membantu peserta didik membuat makna terhadap informasi yang baru. Tokoh tokoh pada teori ini adalah; Candy, Dewey, Lave, Piaget, Rogoff, Von Glaserfeld, dan Vygotsky.

Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran, aliran ini melihat bahwa pembelajaran itu merupakan konstruksi makna dan pengalaman. Sedangkan cakupan dari pembelajaran ini adalah konstruksi realitas internal oleh individu. Tujuan pendidikan dari teori ini adalah membangun pengetahuan, dimana peran guru di sini adalah sebagai memfasilitasi dan menegosiasikan makna dengan peserta didik. Sedangkan manifestasi dalam pembelajaran orang dewasa adalah *experiential learning*, pembelajaran yang diarahkan pada diri sendiri, transformasi perspektif, dan praktik reflektif.

#### **F. Aliran *Holistic Learning***

Teori Belajar Holistik untuk orang dewasa dikemukakan oleh Baiyin Yang (2003), dimana teori ini mungkin memainkan peran yang unik dengan mengintegrasikan teori belajar lainnya yang membedakan antara teori ini dengan teori yang lain, jadi bukan pada kesamaannya. Tokoh tokoh dari teori holistik adalah Baiying Yang, Jarvis, dan Paker.

Dibandingkan dengan 5 teori yang lain, teori ini melihat bahwa proses pembelajaran melibatkan aspek pengetahuan eksplisit, implisit, dan emansipatoris. Sedangkan teori ini terjadi sebagai akibat dari interaksi dengan dan antara sisi pengetahuan. Tujuan pendidikan dari teori ini adalah sistematisasi, partisipasi, dan transformasi. Sedangkan peran dari guru di sini sebagai fasilitator. Manifestasi dari pembelajaran

orang dewasa pada teori ini adalah holistik, dialektikal perspektif, dan dinamis.

Keenam kelompok basis orientasi teori pembelajaran tersebut dapat diterapkan untuk pembelajaran mandiri anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dengan perspektif teori andragogi Malcolm Knowles. Namun yang paling dominan dan selaras untuk diaplikasikan adalah pada poin orientasi humanistiknya. Yakni terutama pada asumsi-asumsinya tentang; eksistensi dan niat dari manusia, tujuan hidup manusia, dan kreativitas manusia. Selain itu, kemudian sebangun juga dengan prinsip-prinsip belajar, seperti; keterlibatan pribadi yang mencakup aspek afektif dan kognitif yang harus datang dari dalam diri seseorang, rasa penemuan juga harus datang dari dalam, belajar membuat perbedaan dan perilaku, sikap dan kepribadian peserta didik, peserta didik mengevaluasi dirinya, yaitu mereka dapat menentukan bagaimana pengalaman belajar yang memenuhi kebutuhannya.

Intinya adalah, ketika pengalaman belajar sedang terjadi, maka peserta didik masuk ke dalam totalitas pengalaman tersebut. Orientasi humanistik melihat bahwa proses belajar merupakan suatu tindakan pribadi untuk memenuhi potensi diri manusia. Cakupannya meliputi kebutuhan pada segi afektif dan kognitif. Sedangkan kegunaannya yaitu untuk mengaktualisasikan dirinya sendiri untuk menjadi lebih bersifat otonom. Sementara itu peran guru di sini adalah untuk memfasilitasi pengembangan manusia

seutuhnya. Sedangkan manifestasinya adalah dalam bentuk kemandirian belajar pada proses pembelajaran orang dewasa.

Istilah andragogi seringkali dijumpai dalam proses pembelajaran orang dewasa (*adult learning*), baik dalam proses pendidikan nonformal (pendidikan luar sekolah), informal, maupun dalam proses pembelajaran pendidikan formal. Pada pendidikan nonformal dan informal teori dan prinsip andragogi digunakan sebagai landasan proses pembelajaran pada berbagai satuan, bentuk, dan tingkatan (*level*) penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal.

Pada pendidikan formal andragogi seringkali digunakan pada proses pembelajaran pada tingkat atau level pendidikan menengah ke atas. Namun demikian dalam menerapkan konsep, prinsip andragogi pada proses pembelajaran sebenarnya tidak secara mutlak harus berdasar pada bentuk, satuan tingkat atau level pendidikan, akan tetapi yang paling utama adalah berdasar pada kesiapan peserta didik untuk belajar. Kondisi itu terjadi karena kita menganggap bahwa semua murid, peserta didik (warga belajar) itu adalah sebagai orang dewasa yang diasumsikan memiliki kemampuan yang aktif dalam merencanakan arah belajar, memiliki bahan, memikirkan cara terbaik untuk belajar, menganalisis, dan menyimpulkan serta mampu mengambil manfaat dari belajar atau dari sebuah proses pendidikan. Fungsi guru dalam hal ini hanya sebagai fasilitator, bukan menggurui, sehingga relasi antara guru dan peserta didik

(murid, warga belajar) lebih bersifat *multicomunication* (Knowles, 1970).

Oleh karena itu, andragogi adalah suatu bentuk pembelajaran yang mampu melahirkan sasaran pembelajaran (lulusan) yang dapat mengarahkan dirinya sendiri dan mampu menjadi guru bagi dirinya sendiri. Dengan keunggulan-keunggulan itu andragogi menjadi landasan dalam proses pembelajaran pendidikan nonformal dan informal. Hal ini terjadi karena pendidikan nonformal dan informal formula pembelajarannya diarahkan pada kondisi sasaran yang menekankan pada peningkatan kehidupan, pemberian keterampilan, dan kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang dialami, terutama dalam hidup dan kehidupan sasaran di tengah-tengah masyarakat.

Untuk memahami secara mendasar tentang konsep teori dan prinsip andragogi, pada bagian ini akan diuraikan secara tuntas tentang beberapa definisi andragogi dari berbagai ahli. Dugan (1995) mendefinisikan andragogi lebih kepada asal katanya, andragogi berasal dari bahasa Yunani. Andra berarti manusia dewasa, bukan anak-anak. Sehingga menurut istilah, andragogi berarti ilmu yang mempelajari bagaimana orang tua belajar. Definisi tersebut sejalan dengan apa yang diartikan Sudjana dalam bukunya *Pendidikan Nonformal Wawasan Sejarah Perkembangan Filsafat Teori Pendukung Azas* (2005) yang menyebutkan bahwa, andragogi berasal dari bahasa Yunani "andra dan agogos". Andra berarti orang dewasa dan agogos berarti memimpin atau membimbing,

sehingga andragogi dapat diartikan ilmu tentang cara membimbing orang dewasa dalam proses belajar. Atau sering diartikan sebagai seni dan ilmu yang membantu orang dewasa untuk belajar (*the art and science of helping adult learn*). Definisi tersebut sejalan dengan pemikiran Knowles dalam Srinivasan (1977) menyatakan bahwa: *andragogi as the art and science to helping adult a learner*.

Pada konsep lain andragogi seringkali didefinisikan sebagai pendidikan orang dewasa atau belajar orang dewasa. Definisi pendidikan orang dewasa merujuk pada kondisi peserta didik orang dewasa baik dilihat dari dimensi fisik (biologis), hukum, sosial, dan psikologis. Istilah dewasa didasarkan atas kelengkapan kondisi fisik juga usia, dan kejiwaan, di samping itu pula orang dewasa dapat berperan sesuai dengan tuntutan tugas dari status yang dimilikinya.

Elias dan Sharan B. Merriam (1990) menyebutkan bahwa kedewasaan pada diri seseorang meliputi: *age, psychological maturity, and social roles*. Yang dimaksud dewasa menurut usia, adalah setiap orang yang menginjak usia 21 tahun (meskipun belum menikah). Sejalan dengan pandangan tersebut diungkapkan pula oleh Hurlock (1968), *adult* (dewasa), *adulthood* (status dalam keadaan kedewasaan) ditunjukkan pada usia 21 tahun untuk awal masa dewasa dan sering dihitung sejak 7 atau 8 tahun setelah seseorang mencapai kematangan seksual, atau sejak masa pubertas. Pendekatan berdasar usia dilakukan oleh ahli hukum, sehingga melahirkan perbedaan perlakuan hukum terhadap pelanggar. Dewasa dilihat dari sudut pandang dimensi biologis juga

bisa dilihat dari segi fisik, dimana manusia dewasa memiliki karakteristik khas seperti: mampu memilih pasangan hidup, siap berumah tangga, dan melakukan reproduksi (*reproductive function*).

Dewasa berdasar dimensi psikologis dapat dilihat dan dibedakan dalam tiga kategori yaitu: dewasa awal (*early adults*) dari usia 16 sampai dengan 20 tahun, dewasa tengah (*middle adults*) dari 20 sampai pada 40 tahun, dan dewasa akhir (*late adults*) dari 40 hingga 60 tahun. Hutchin (1970) dan Rogers (1973) dalam Saraka (2001) memandang bahwa batas usia seputar 25 sampai dengan 40 tahun merupakan usia emas (*golden age*). Pada dimensi ini dewasa lebih ditujukan pada kematangan seorang individu.

Anderson dalam *Psychology of Development and personal Adjustment* (1951) menyimpulkan tentang tujuh ciri kematangan bagi seorang individu yaitu: 1) Kematangan individu dapat dilihat dari minatnya yang selalu berorientasi pada tugas-tugas yang dilakukan atau dikerjakannya, serta tidak mengarah pada perasaan-perasaan diri sendiri atau untuk kepentingan pribadi (tidak pada diri dan atau ego), 2) Tujuan-tujuan yang dikembangkan dalam konsep dirinya jelas dan selalu memiliki kebiasaan kerja yang efisien, 3) Kemampuan dalam mengendalikan perasaan pribadi dalam pengertian selalu dapat mempertimbangkan pribadinya dalam bergaul dengan orang lain, 4) Memiliki pandangan yang objektif dalam setiap keputusan yang diambilnya, 5) Siap menerima kritik atau saran untuk peningkatan diri, 6) Bertanggung jawab atas

segala usaha-usaha yang dilakukan, 7) Secara realitas selalu dapat menyesuaikan diri dalam situasi-situasi baru.

Kematangan seorang individu dapat pula menjadi patokan bagi kedewasaan secara sosial, hal ini dapat dicermati dari kesiapannya dalam menerima tanggungjawab, mengerjakan, dan menyelesaikan tugas-tugas pribadi dan sosialnya terutama untuk memenuhi kebutuhan belajarnya (Freire, 1970). Lebih lanjut, Lovell mengatakan bahwa: *adulthood is the time when basic skills and abilities were so rapidly acquired in childhood are consolidated and exploited to the full and many new skills and competencies learned. There can be many factors influencing the way in which an adult approaches a new learning experience. Some related to the characteristics of the learners and range from personality and cognitive styles to individual differences in age, experience, motivations, and self-perception. Other relate to social context within which learning takes place and to the ways in which any formal teaching is planned and carried out and evaluated* (Lovelly, 1980).

Secara fundamental, karakteristik kedewasaan atau kematangan seorang individu yang paling mendasar terletak pada tanggung jawabnya. Ketika individu sudah mulai memiliki kemampuan memikul tanggung jawab, dimana ia sanggup menghadapi kehidupannya sendiri dan mengarahkan diri sendiri. Jika mereka menghadapi situasi baru tidak memiliki bekal kemampuan maupun keterampilan diri (*skills of directed inquiry*),

maka ia akan merasa sulit dalam mengambil inisiatif terutama dalam memiliki tanggung jawab belajarnya. Tidak sedikit individu yang telah memiliki latar belakang pendidikan tinggi (universitas, perguruan tinggi, sekolah tinggi) tidak siap menerima tanggung jawab lebih lanjut dari hasil belajarnya. Sehingga individu-individu tersebut menjadi penganggur, mengalami kecemasan, frustrasi, dan kegagalan. Bersikap pasif menghadapi dunia kesehariannya dan tidak berdaya atau berani dalam menghadapi masa depan.

Kematangan dalam kondisi dewasa-matang, dapat ditandai oleh kemampuan memenuhi kebutuhannya, memanfaatkan pengalamannya, dan mengidentifikasi kesediaan belajar. Ketika kemampuan belajar seputar masalah kehidupannya menjadi meningkat, maka sikap ketergantungan kepada orang lain akan semakin berkurang. Orang dewasa yang memiliki konsep diri matang dapat memikul tanggung jawab kehidupan, menyadari dimana posisi dirinya pada saat itu dan tahu akan ke mana tujuan hidupnya. Di samping itu pula mereka cakap dalam mengambil keputusan dan mampu berpartisipasi di masyarakat dan akan mampu mengarahkan dirinya, memilih, dan menetapkan pekerjaan yang relevan. Orang dewasa yang betul-betul matang secara psikologis tidak akan menghindar atau lari dari masalah yang dihadapi (Knowless, 1989).

Dalam dimensi sebagai peserta didik (murid, warga belajar) andragogi, seorang dewasa dalam banyak hal memiliki beberapa keunggulan-keunggulan. Dari segi konsep diri, mereka memiliki

kematangan psikologis, bertanggung jawab, memiliki hasrat, dan motivasi kuat untuk belajar, dan mampu mengarahkan dirinya. Mereka dapat belajar dan memelajari sesuatu dalam skala yang lebih luas dan memilih strategi belajar yang lebih baik, lebih efektif dan lebih terarah, dan mampu mengarahkan diri (*self directing*). Dari pengalaman belajar, peserta didik dewasa memiliki setumpuk pengalaman sebagai *resource persons and total life impressions* dalam kaitannya dengan orang lain. Mereka dapat menjadi sumber dan bahan belajar yang kaya, terutama dalam mendukung belajar kelompok serta belajarbersama dengan ahli-ahli.

Sistem pembelajaran pada peserta didik dewasa dapat diarahkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhannya dan kebutuhan sumber, serta bahan belajar. Seperti pada kelompok diskusi, bermain peran, simulasi, pelatihan, (*group discusion, team designing, role playing, simulations, skill practice sessions*) (Inggalls, 1973, Knowless, 1977 dan Unesco, 1988).

Dari segi *kesiapan* belajar, orang dewasa memandang bahwa "*all living is learning. Learning is not only preparation for living the very essence of living, the very essence of living it self*". Setiap peserta didik memiliki pola kesiapan yang berbeda dengan warga lainnya terutama dalam hal kekuatan motivasi (*inner motivations*) seperti: *needs for esteem (self esteem), urge to grow, the satisfaction for accomplishment, the need to know something specific and curiosity to learn*". Pada umumnya orang dewasa memiliki kemampuan membaca, menulis, menghitung, menguasai

kemampuan verbal, dan kecakapan mengambil keputusan yang relevan dengan kebutuhan pribadi dan tuntutan sosialnya. Mereka merancang dan menetapkan minat serta kebutuhan belajarnya, mendiagnosis kebutuhannya sesuai tuntutan hidupnya, dan lain-lainnya. Pembelajaran dapat bertindak sebagai nara sumber, pengarah, pembimbing, pemberi fasilitas, atau teman belajar (*resource person, guide, helper, facilitator or partner for the learners*) (Inggalls, 1973, Knowless, 1977, Unesco, 1988, Saraka, 2001).

Dari perspektif waktu dan orientasi belajar, orang dewasa memandang belajar itu sebagai suatu proses pemahaman dan penemuan masalah serta pemecahan masalah (*problem finding and problem solving*), baik berhubungan dengan masalah kekinian maupun masalah kehidupan di masa depan. Orang dewasa lebih mengacu pada tugas atau masalah kehidupan (*task or problem oriented*). Sehingga orang dewasa akan belajar mengorganisir pengalaman hidupnya (Knowless, 1977, Unesco, 1988, Kamil, 2001, Saraka, 2001).

Berdasarkan kepada kondisi-kondisi itu dan konsepsi andragogi, istilah pendidikan orang dewasa dapat diartikan sebagai pendidikan yang ditujukan untuk peserta didik yang telah dewasa atau berumur 18 tahun ke atas atau telah menikah dan memiliki kematangan, dan untuk memenuhi tuntutan tugas tertentu dalam kehidupannya. Derkenwald dan Merriam (1990) mengungkapkan pengertian pendidikan orang dewasa adalah "*is a process where by*

*person whose major social roles characteristic of adult status undertake systematic and sustained learning activities for the purpose of bringing about changes in knowledge, attitudes, values, or skills*". Pendidikan orang dewasa adalah suatu proses belajar yang sistematis dan berkelanjutan pada orang yang berstatus dewasa dengan tujuan untuk mencapai perubahan pada pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan. Kondisi-kondisi yang dapat ditimbulkan dari definisi itu adalah:

1. Orang dewasa termotivasi untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka;
2. Orientasi belajar bagi orang dewasa adalah berpusat pada kehidupan;
3. Pengalaman sebagai sumber kekayaan untuk belajar orang dewasa;
4. Orang dewasa mengharapkan berhubungan sendiri dengan kebutuhan yang tepat;
5. Perbedaan individual di antara perorangan berkembang sesuai dengan umurnya.

Knowles (1976) melanjutkan pemahaman C. Linderman, mengungkapkan bahwa kondisi orang dewasa dalam belajar berbeda dengan anak-anak. Jikalau pada anak-anak digunakan istilah "pedagogy" sehingga diartikan dengan "*the art and science of teaching children*" atau ilmu dan seni mengajar anak-anak. Menurut pandangannya, mengapa sampai terjadi perbedaan antara kegiatan belajar anak-anak dengan orang dewasa, hal tersebut

karena orang dewasa memiliki: 1) Konsep diri (*The self-concept*), 2) Pengalaman hidup (*The role of the learner's experience*); 3) Kesiapan belajar (*Readiness to learn*); 4) Orientasi belajar (*Orientasion to learning*).

Pendapat-pendapat itu sejalan dengan beberapa definisi yang dikembangkan para ahli di antaranya adalah definisi yang diungkapkan oleh Morgan, Barton et al (1976) bahwa, pendidikan orang dewasa adalah suatu aktivitas pendidikan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam kehidupan sehari-hari yang hanya menggunakan sebagian waktu dan tenaganya untuk mendapatkan tambahan intelektual. Sejalan dengan definisi itu, Reervers, Fansler, dan Houle menyatakan bahwa pendidikan orang dewasa adalah upaya yang dilakukan oleh individu dalam rangka pengembangan diri, dimana dilakukan dengan tanpa paksaan/legal (Suprijanto, 2007).

Unesco lebih tajam mendefinisikan pendidikan orang dewasa sebagai suatu proses pendidikan yang terorganisir baik isi, metode, dan tingkatannya, baik formal maupun nonformal/informal, yang melanjutkan maupun menggantikan pendidikan di sekolah, akademi, universitas, dan pelatihan kerja yang membuat orang yang dianggap dewasa oleh masyarakat dapat mengembangkan kemampuannya, memperkaya pengetahuannya, meningkatkan kualifikasi teknis maupun profesionalnya, dan mengakibatkan perubahan pada sikap dan perilakunya dalam perspektif rangkap perkembangan pribadi secara utuh dan

partisipasi dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang (Townsend Coles, 1977, Sudjana, 2004).

Malcolm Knowless dalam mengembangkan konsep andragogi, mengembangkan empat pokok asumsi sebagai berikut:

1. Konsep diri (*The self-concept*)

Asumsinya bahwa sesungguhnya dan kematangan diri seseorang bergerak dari ketergantungan total (realita pada bayi) menuju ke arah pengembangan diri sehingga mampu untuk mengarahkan dirinya sendiri dan mandiri. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa secara umum konsep diri anak-anak masih tergantung sedangkan pada orang dewasa konsep dirinya sudah mandiri. Karena kemandirian inilah orang dewasa membutuhkan memperoleh penghargaan orang lain sebagai manusia yang mampu menentukan dirinya sendiri (*self determination*), mampu mengarahkan dirinya sendiri (*self direction*). Apabila orang dewasa tidak menemukan dan menghadapi situasi dan kondisi yang memungkinkan timbulnya penentuan diri sendiri dalam suatu pelatihan, maka akan menimbulkan penolakan atau reaksi yang kurang menyenangkan. Orang dewasa juga memiliki kebutuhan psikologis yang dalam agar secara umum menjadi mandiri, meskipun dalam situasi tertentu. Hal ini menimbulkan implikasi dalam pelaksanaan praktik latihan, khususnya yang berkaitan dengan iklim dan suasana pembelajaran dan diagnosa kebutuhan serta proses perencanaan pelatihan.

Peranan pengalaman (*The role of the learner's experience*), asumsinya adalah bahwa sesuai dengan perjalanan waktu seorang individu tumbuh dan berkembang menuju ke arah kematangan. Dalam perjalanannya seorang individu mengalami dan mengumpulkan berbagai pengalaman pahit getirnya kehidupan, dimana hal ini menjadikan seorang individu sebagai sumberbelajar yang demikian kaya, dan pada saat yang bersamaan individu tersebut memberikan dasar yang luas untuk belajar dan memperoleh pengalaman baru. Oleh sebab itu, dalam teknologi pelatihan atau pembelajaran orang dewasa, terjadi penurunan penggunaan teknik transmittal seperti yang dipergunakan dalam pelatihan konvensional dan menjadi lebih mengembangkan teknik yang bertumpu pada pengalaman. Dalam hal ini dikenal dengan "*experiential learning cycle*" (proses belajar berdasarkan pengalaman). Hal ini menimbulkan implikasi terhadap pemilihan dan penggunaan metode dan teknik kepelatihan. Maka dalam praktik pelatihan lebih banyak menggunakan diskusi kelompok, curhat pendapat, kerja laborator, sekolah lapangan, melakukan praktik dan lain sebagainya, yang pada dasarnya berupaya untuk melibatkan peran serta atau partisipasi peserta pelatihan.

## 2. Kesiapan belajar (*Readiness to learn*)

Asumsi bahwa setiap individu semakin menjadi matang sesuai dengan perjalanan waktu, maka kesiapan belajar bukan ditentukan oleh kebutuhan atau paksaan akademik ataupun

biologisnya, tetapi lebih banyak ditentukan oleh tuntutan perkembangan dan perubahan tugas dan peranan sosialnya. Pada seorang anak belajar karena adanya tuntutan akademik atau biologiknyanya. Tetapi pada orang dewasa siap belajar sesuatu karena tingkatan perkembangan mereka yang harus menghadapi dalam peranannya sebagai pekerja, orang tua, atau pemimpin organisasi. Hal ini membawa implikasi terhadap materi pembelajaran dalam suatu pelatihan tertentu. Dalam hal ini tentunya materi pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai dengan peranan sosialnya.

### 3. Orientasi belajar (*Orientasion to learning*)

Asumsinya, yaitu bahwa pada anak orientasi belajarnya seolah-olah sudah ditentukan dan dikondisikan untuk memiliki orientasi yang berpusat pada materi pembelajaran (*subject matter centered orientation*). Sedangkan pada orang dewasa memiliki kecenderungan memiliki orientasi belajar yang berpusat pada pemecahan permasalahan yang dihadapi (*problem centered orientatin*). Hal ini dikarenakan belajar bagi orang dewasa seolah-olah merupakan kebutuhan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan keseharian, terutama dalam kaitannya dengan fungsi dan peranan sosial orang dewasa. Selain itu, perbedaan asumsi ini disebabkan juga karena adanya perbedaan perspektif waktu, bagi orang dewasa, belajar lebih bersifat untuk dapat dipergunakan atau dimanfaatkan dalam waktu segera.

Sedangkan anak, penerapan apa yang dipelajari masih menunggu waktu hingga dia lulus dan sebagainya. Sehingga ada kecenderungan pada anak, bahwa belajar hanya sekadar untuk dapat lulus ujian dan memperoleh sekolah yang lebih tinggi. Hal ini menimbulkan implikasi terhadap sifat materi pembelajaran atau pelatihan bagi orang dewasa, yaitu bahwa materi tersebut hendaknya bersifat praktis dan dapat segera diterapkan di dalam kenyataan sehari-hari.

Mengacu pada definisi-definisi, asumsi dan prinsip andragogi yang telah diungkapkan, memberikan gambaran, bahwa orang dewasa melakukan kegiatan belajar karena didorong oleh beberapa alasan. Di antaranya adalah karena dorongan insting, kebutuhan intelektual, dan keinginan meraih sesuatu. Keinginan untuk belajar merupakan suatu kecenderungan yang muncul dari dalam diri seseorang sehingga ia melakukannya secara alamiah, terutama jika tidak dikondisikan. Akan tetapi kadangkala kecenderungan tersebut kurang berkembang di tempat kerja, malahan sebaliknya kegiatan belajar sengaja diciptakan sebagai suatu pengalaman yang membingungkan, seringkali orang berupaya mencari kesenangan dan mencegah kesusahan, oleh karena itu penciptaan suasana belajar yang tidak menyenangkan merupakan suatu kegiatan yang biasa.

Pada dimensi andragogi, dewasa memiliki definisi yang menyatu dengan kebutuhan belajar yang tidak sekadar dipandang

sebagai kebutuhan intelektual serta keinginan meraih sesuatu saja dalam kehidupan, akan tetapi belajar sudah dipandang sebagai:

1. *Self acceptance*. Pada konteks andragogi, dewasa berarti individu yang memiliki pandangan positif tentang dirinya sebagai sasaran belajar (peserta didik). Penerimaan diri berakar pada pengalaman keberhasilan ekstensif sebelumnya. Penerimaan diri tidak hanya terungkap ketika mengatakan “sanggup mengerjakan ini dan itu”, akan tetapi dewasa mampu menilai dirinya secara positif sebagai seorang pribadi yang utuh untuk memperbaiki diri dan kehidupannya.
2. *Planful intents*. Dewasa berarti memiliki kemampuan mendiagnosis kebutuhan belajar, menetapkan tujuan pribadi secara wajar sesuai kebutuhan tersebut, dan merancang strategi yang efektif untuk merealisasikan tujuan belajar. Dalam prosesnya, dewasa juga berarti kemampuan memanfaatkan bantuan/pertolongan dan nasihat orang lain sambil mempertimbangkan kepentingan dan tujuan belajarnya.
3. *Intrinsic motivation*. Dewasa berarti orang yang memiliki motivasi intrinsik, dimana motivasi tersebut dapat bertahan dalam menyelesaikan tugas-tugas belajar tanpa ada tekanan eksternal dalam bentuk hadiah, sanksi, atau hukuman (*rewards, sanctions, or punishment*). Orang dewasa dapat meneruskan kegiatan belajar, serta mampu menunda atau menghentikan kepentingan lain demi kelanjutan kegiatan belajarnya.
4. *Internalized evaluation*. Dewasa berarti mampu bertindak

sebagai agen evaluator, terutama dalam menilai kualitas kinerja yang akurat sesuai dengan informasi yang dikumpulkan sendiri. Dengan demikian dewasa berarti mampu menginternalisasi proses evaluasi, sehingga memperoleh masukan dari orang lain, dan terbuka terhadap penilaian orang lain.

5. *Openness to experience*. Dewasa berarti terbuka kepada pengalaman baru, serta mampu melibatkan diri dalam berbagai kegiatan belajar dan menetapkan tujuan, memiliki *curiosity, tolerance of ambiguity, preference of complexity and even playfulness*, juga memiliki motif untuk memasuki kegiatan baru. Konsepsi tersebut dapat memberikan sesuatu yang memuat konstruk-konstruk yang lebih spesifik dalam memelajari pengalaman-pengalaman barunya.
6. *Learning flexibility*. Fleksibilitas dalam belajar menyiratkan kedewasaan dalam mengubah tujuan atau cara belajar dan menggunakan eksplorasi dan pendekatan *trial and error* untuk memecahkan masalahnya. Fleksibilitas tidak menyatakan kekurangan atau ketidaktahanan dalam belajar menyelesaikan tugas-tugasnya. Akan tetapi kedewasaan biasanya terbuka dalam memahami kegagalan yang biasanya diasosiasikan dalam bentuk penyesuaian diri dan perilakunya (*adaptive behavior*) daripada kemunduran (*withdrawal*).
7. *Autonomy*. Dewasa berarti memiliki kemampuan memilih kegiatan belajar yang dipandang penting meski bagi orang lain dipersepsi sebagai suatu risiko atau bahaya dalam konteks

budaya tertentu. Kedewasaan dalam konteks *autonomy* dapat dipandang sebagai suatu kemampuan dalam memasalahkan standar, norma dalam kurun waktu dan tempat tertentu terutama berkaitan dengan jenis kegiatan belajar yang memungkinkan dan dianggap memiliki nilai bagi hidup dan kehidupannya. *Autonomy* dapat dibelajarkan dan dilatihkan untuk melayani kepentingan pribadi dan sosial kemasyarakatan.

Andragogi memandang, bahwa dalam memacu tumbuhnya dewasa dalam belajar diperlukan terciptanya belajar sepanjang hayat, terutama dalam pengembangan hasrat, minat, kebutuhan, motivasi, dan kemampuan lainnya. Secara holistik, Hatton (1997) mengenalkan konsep DAMN seperti berikut ini:

#### 1. *Desire to learn*

Orang dewasa dalam melakukan kegiatan belajar didorong oleh beberapa alasan. Di antaranya adalah karena dorongan insting, kebutuhan intelektual, dan keinginan meraih cita-cita. *The desire to learn* merupakan suatu kecenderungan yang muncul dari dalam diri seseorang sehingga ia mau belajar secara alamiah terutama apabila tidak dikondisikan. Bagi individu yang memiliki pengalaman belajar positif dapat mengembangkan kepercayaan diri dan kegemaran untuk belajar yang lebih jauh. Orang dewasa dalam belajar, cenderung melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap apa yang mendorong rasa ingin tahu dan intelektualitasnya.

Namun demikian, ada kendala seringkali belajar tidak dianggap sebagai suatu aktivitas sepanjang hayat. Padahal apabila disadari aktivitas belajar akan merangsang akal, mempertinggi motivasi, dan memberi keterampilan dasar bagi individu. Di samping itu pula, belajar tidak hanya mempersiapkan seseorang menghadapi kehidupan tetapi merupakan esensi kehidupan. Manakala kekuatan belajar kurang memberi motivasi, maka *self motivation* dalam diri akan semakin berkurang dan mungkin tidak berarti atau sia-sia.

Penerapan prinsip andragogi dalam proses pembelajaran menjadi penting, karena sasaran (pembelajar, peserta didik, warga belajar, murid) tidak akan pernah mandiri dalam menentukan apa yang mau dipelajari, bagaimana cara memelajarinya dan dengan strategi apa yang digunakan untuk mempelajari sesuatu dan kadangkala juga tidak belajar secara baik. Knowless (1984) dalam keyakinannya berpendapat bahwa peserta didik tidak akan belajar, meskipun mereka dianggap sebagai orang dewasa yang memiliki *motivation, orientation, readines to learn and experiences*. Akan lebih tertarik dan responsif terhadap kebutuhan belajarnya dan terus memperkuat *positive self concept*-nya dengan memberdayakan dan menggiring kemampuan untuk belajar secara mandiri dan berkelanjutan.

Ditegaskan bahwa: *“The most socially useful learning in the modern world is the learning of the process of learning; a*

*continuing openness to experience and in corporation into one self of the process of change” (Rogers, 1979). Agar peserta didik dengan segala keterbatasannya dapat memahami suatu secara bermakna, maka ekspektasi dan preferensinya harus dipadukan dalam sebuah proses belajar yang mengandung makna andragogi, akan tetapi dengan tetap mempertimbangkan segala perbedaan minat dan kemampuan yang mereka miliki terutama keterbatasan dalam belajar. Hal yang perlu diingat adalah bahwa proses belajar hanya mungkin tercipta jika peserta didik menginginkan sesuatu, memperhatikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan menerima sesuatu. Miller dan Dollard menegaskan bahwa: “*Learning takes place when something, notice something, does something and receiving something. This, learning in this view requires the interplay of four essential aspects: motivation (the wanting aspect) perception (the noticing aspect), responding (the doing aspect), and reward or reinforcement (thereceiving aspect). If any motivation were set to zero, for example or if no reward were forthcoming for responses made, learning would be disputed” (Miller and Dollard, 1973).**

## 2. Ability to learn

Ahli-ahli psikologi kognitif seperti Bruner, Ausabel, Piaget dan lainnya percaya bahwa kesadaran dalam diri individu memainkan peran penting dalam belajar. Belajar bukan hanya sekadar menerima informasi secara pasif, melainkan suatu

kegiatan aktif dalam memaknai pengalaman belajar. Belajar bukan juga sebagai usaha pemenuhan kebutuhan intelektual dengan keterpaksaan, akan tetapi belajar perlu dilakukan dengan cara melibatkan diri secara aktif dalam proses partisipasi aktif sebagai subjek, bukan objek (Hoxeng, 1976).

Dalam sebuah proses pembelajaran, sasaran belajar perlu didorong memahami kebermaknaan tugas-tugas belajarnya, sehingga sasaran berada pada kemampuan dan peningkatan penguasaan terhadap langkah-langkah kegiatan belajar secara bermakna. Novak dan Gowin (1984) menyebutkan: *to learn meaningfully, individuals must choose to relate new knowledge to relevant concept and propositions they already know. To help them learn and organize learning materials, they are encourage to make; concept mapping; to see meanings of learning materials and knowledge and Vee diagram to penetrate the structure and meaning of the knowledge to understand (Novak dan Gowin, 1984).*

Bagaimana dapat membantu individu atau masyarakat merenungkan pengalamannya dan mengkonstruksikan hal-hal baru sehingga bermakna, kadangkala ada suatu kelemahan psikologik perilaku dan psikologi kognitif, dimana keduanya seringkali mengabaikan aspek perasaan (*feeling*). Padahal: *human experience involves not only thinking and acting but also feeling and it is only when all there are considered together that*

*individuals can be empowered to enrich the meaning of their experience* (Novak dan Gowin, 1984).

Dalam konsepsi belajar, Delor (1996) dan Soedijarto (1997) melihat belajar sebagai sesuatu kekuatan atau sumber daya yang tumbuh dari dalam diri seseorang (individu). dimana keduanya merekomendasikan empat pilar proses pendidikan dan belajar, yaitu: *learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together*. Pilar pertama *learning to know* pada prinsipnya sejalan dengan penerapan paradigma ilmu pengetahuan, dimana proses (belajar) dan pembelajaran dilakukan sejak di tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

*Learning to know* memungkinkan sasaran mengetahui, memahami dan menghayati cara-cara pemerolehan pengetahuan melalui fenomena yang berada di lingkungannya, belajar memaknai dan mempercayai bahwa manusia sebagai pemimpin di muka bumi, sehingga memungkinkan terciptanya *transfer of training*. Pilar kedua, *learning to do* lebih merujuk kepada upaya peserta didik menghayati proses belajar melakukan sesuatu yang bermakna, belajar berbuat dan melakukan (*learning by doing*) sesuatu secara aktif, belajar mencatat, membaca, menulis, membuat ringkasan, dan dapat mendayagunakan kemampuan intelektual, psikomotorik, dan emosionalnya. Pilar ketiga, *learning to be*, memungkinkan terciptanya atau lahirnya manusia terdidik dan mandiri, memiliki

rasa kemandirian dan tanggung jawab serta kepercayaan kepada diri dan orang lain. Sikap percaya diri lahir dari pemahaman dan pengenalan diri dengan tepat dan penuh kebahagiaan dalam belajar, menemukan dirinya sebagai pangkal tolak pembentukan kemandirian. Terakhir, *learning to live together* lebih merujuk kepada kerukunan dan kedamaian hidup.

### 3. *Means to learn*

*Means to learn* memberikan dukungan kuat bagi peserta didik dalam menghadapi kehidupan yang lebih kompleks, belajar dapat dikonsepsikan lebih luas lagi sebagai suatu proses pemenuhan kebutuhan hidup. Individu dan masyarakat mau tidak mau harus belajar guna mengetahui, bagaimana cara menyikapi lingkungan dan memahami cara mengubah sikap dan perilaku individu lainnya tanpa membatasi kebebasan dan menghambat perkembangan potensinya.

Masyarakat perlu belajar dan mempelajari cara-cara menerima dan menghargai perbedaan secara damai, serta cara memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kesejahteraan umat manusia dan membebaskan diri dari penyakit yang mengancam kualitas kehidupan manusia pada umumnya (Gross, 1991). Sehingga daya dukung infrastruktur (*means to learn*) yang sudah dirancang secara wajar dapat menjadi fondasi dalam menumbuhkan masyarakat gemar belajar.

Masyarakat, organisasi profesi, dan swasta perlu memberikan dukungan informal untuk mengembangkan

pendidikan sepanjang hayat. Dalam hal ini organisasi swasta, perusahaan-perusahaan (pemilik-pemilik modal) perlu dilibatkan dalam penyediaan peluang-peluang belajar untuk mempertahankan kualitas tenaga kerjanya dengan membuka peluang-peluang dan kesempatan belajar. Pemerintah memainkan peran serta sebagai pembuat kebijakan dan penyedia sumberdaya. Kebijakan harus bersifat spesifik-kontekstual sesuai agenda dan variasi-variasi dari batas-batas geografis dan politis yang ada.

#### 4. *Need to learn*

Belajar dalam konsepsi belajar sepanjang hayat merupakan suatu kebutuhan. Dengan alasan kebutuhan, setiap individu akan mendorong dirinya untuk belajar (*learning to learn*) sehingga dapat memelajari dan merespons secara cerdas pengetahuan-pengetahuan yang secara ekponensial terus meningkat dan berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kehidupan. Kebutuhan untuk belajar (*need to learn*) merupakan kebutuhan yang paling mendesak dalam rangka meningkatkan peran pendidikan sepanjang hayat. Perubahan dunia secara cepat, sebagai dampak globalisasi, baik di bidang teknologi, informasi, ekonomi jasa, dan tuntutan pasar menuntut individu untuk terus beradaptasi dengan kondisi atau produk baru yang dilahirkan masyarakat maju.

Tantangan ke depan cenderung lebih dinamis dan serba cepat. Pertumbuhan cepat dan keusangan informasi mendorong

orang belajar terus sepanjang hayat. Pengetahuan dan kemampuan yang telah diperoleh perlu divalidasi ulang secara periodik. Asosiasi kerjasama dalam pembangunan ekonomi menuntut perlunya penyediaan pendidikan profesi lanjutan untuk pekerja (personalia) yang memiliki kualifikasi tinggi.

Mengingat tuntutan kebutuhan itu semakin meningkat, maka belajar harus dikonsepsikan secara lebih luas daripada konsep belajar konvensional. Gaya belajar perlu diciptakan secara efisien, cepat, cermat, produktif, dan menyenangkan serta terus dipacu sepanjang hayat. Budaya belajar yang selama ini yang terkesan hanya terjadi di sekolah mengalami pergeseran dan berkembang lebih dari yang dikonsepsikan sebelumnya. Untuk mendapatkan pengetahuan, pengalaman, sikap-sikap baru, individu dan juga masyarakat, dituntut bekerja dan belajar atau belajar sambil bekerja sebagai suatu model belajar mencari bentuk (*a way of becoming and being*) dan menunjukkan adanya pembaharuan (Botkin, 1984).

Kemandirian sebagai kepribadian atau sikap mental yang harus dimiliki oleh setiap orang yang di dalamnya terkandung unsur-unsur dengan watak-watak yang ada di dalamnya perlu dikembangkan agar tumbuh menyatu dalam setiap gerak kehidupan manusia. Asumsi tersebut menunjukkan bahwa kemandirian dapat menentukan sikap dan perilaku seseorang menuju ke arah kualitas hidup.

Pada dunia pembangunan masyarakat kemandirian sudah dikenal sejak PBB memberikan batasan tentang pengertian dari pembangunan masyarakat (*community development*). Pada definisi tersebut disebutkan bahwa: *...the participation of the people themselves in efforts to improve their level of living with as much reliance as possible on their own initiative, and the provision of technical and other services in ways which encourage initiative, self-help and mutual help and make these more effective* (UN, 1956).

Mengacu pada batasan tersebut, kemandirian memiliki nilai lain yang tidak hanya sekadar menjiwai konsep wiraswasta yang lebih mengarah pada nilai-nilai ekonomi (*benefit*), namun pada definisi tersebut terkandung pula nilai-nilai sosial dan nilai-nilai budaya dengan kandungan utamanya selain mampu menolong dirinya sendiri akan tetapi mampu menolong orang lain dalam bentuk gotong royong dan partisipasi. Sehubungan dengan itu, konsep kemandirian yang menjiwai nilai-nilai wiraswasta sebenarnya hanya sebagian kecil saja. Karena secara lebih luas kemandirian tidak hanya untuk itu, akan tetapi berlaku bagi setiap gerak langkah kehidupan manusia. Di samping itu pula kemandirian hanya dapat dibangun melalui belajar secara terus menerus, terutama belajar dari kehidupan dan pengalaman sehari-hari.

Pada konteks andragogi, kemandirian merupakan tolak ukur utama dalam setiap pengembangan model belajar. Oleh

karena itu konsep pembelajaran dalam konteks andragogi, secara lebih khusus memiliki inti dasar yang mengacu pada menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai kemandirian bagi setiap peserta didiknya (warga belajar). Tanpa tujuan itu setiap pembelajaran dalam konteks andragogi menjadi tidak bermakna dan sama saja dengan model pembelajaran lainnya. Asumsi ini merupakan batasan khusus yang mampu membedakan konsep pembelajaran andragogi dengan konsep pembelajaran lainnya.

Pendidikan dengan prinsip andragogi lebih banyak menekankan pada kebutuhan belajar peserta didik dan mungkin pada sisi lain lebih menekankan pada pengembangan ranah afektif dan psikomotor; seperti motivasi, sikap modern, keterampilan vokasional, dan keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Di samping itu pula program pendidikannya selain fleksibel, cenderung berkaitan erat dengan lapangan pekerjaan dan kehidupan peserta didik.

Dengan berbagai keterampilan dan sikap yang dibina dalam pendidikan dengan prinsip andragogi, maka peserta didik diharapkan memiliki sejumlah kemampuan yang kemudian hari dapat dijadikan modal untuk mengembangkan kehidupannya baik melalui usaha secara mandiri sehingga memperoleh keuntungan yang lebih baik; keuntungan dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Prinsip tersebut memiliki asumsi bahwa, pendidikan dengan prinsip andragogi akan menilai

potensi dan otonomi yang dimiliki peserta didik. Sehingga hal itu menjadi landasan utama bagi setiap perencanaan dan pengembangan program pendidikan. Secara filosofis pandangan tersebut sejalan dengan konsep dan komitmen bahwa peserta didik sebagai: a) *human nature is naturally good*, b) *freedom and autonomy*, c) *individually and potentiality*, d) *self concept and the self*, e) *self actualization*, f) *perception*, g) *responsibility and humanity* (John Elias, S. Merriam, 1980).

Pandangan itu memberikan kejelasan bahwa tujuan penerapan prinsip andragogi dalam pengembangan pendidikan adalah mengembangkan seoptimal mungkin kemampuan dan potensi peserta didik, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan dan menolong dirinya sendiri, di samping itu pula dapat membangun lingkungannya, masyarakatnya, dan lebih luas lagi dapat berperan secara aktif dalam membangun bangsa dan negara. Hal tersebut sangat sejalan dengan konsep pengembangan pendidikan nonformal, dimana teori dan prinsip andragogi sebagai acuan utamanya.

Dalam hal ini Scott W. Morris (1979) secara tegas memberikan kesimpulan bahwa tujuan pendidikan nonformal (*non-formal education*) adalah *to help people help them selves*. Begitu pula dengan Djudju Sudjana (1992), menyebutkan bahwa tugas pokok pendidikan nonformal; membelajarkan peserta didik. Dengan tujuan agar peserta didik memiliki atau mengembangkan nilai-nilai, sikap, pengetahuan, dan

keterampilan yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan individu, masyarakat, lembaga, dan pembangunan bangsa menuju masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan pembahasan tentang konsep pembelajaran mandiri serta definisi pembelajaran mandiri dari Knowles (1975), Hiemstra (1998), dan Jarvis (1990) tentang karakteristik pembelajar yang mandiri dalam belajar, maka dapat dilihat bahwa konsep pembelajaran mandiri dipergunakan untuk menjelaskan berbagai hal. Berbagai pengertian dan istilah pembelajaran mandiri tersebut menjadi masalah bukan karena sangat bervariasinya pengertian dan istilah tersebut, tetapi masalah muncul pada saat seorang penulis mulai mendefinisikan alternatif pengertian atau elemen belajar (Bonham, 1989).

Beberapa istilah atau konsep dalam bidang psikologi yang memiliki pengertian serupa atau dapat dihubungkan dengan konsep *self-directed learning* atau pembelajaran mandiri adalah *self-determination* (Deci, 1980), dan *self-regulated learning* (Bandura, 1986; Zimmerman, 1986).

Istilah *self-determination* mengandung pengertian adanya kemauan (*will power*) yang menunjukkan pada kapasitas yang dimiliki oleh seseorang untuk menentukan *how to behave* dan menentukan keputusan yang akan memengaruhi perilaku mereka. Orang yang memiliki *self-determination* yang tinggi diasumsikan mampu mengontrol dan menentukan keputusan-keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka (Hiemstra, 1998). Pengertian ini

sama dengan kata kunci pada konsep *self-directed learning*. Salah satu kata kunci pada pengertian *self-directed learning* yang dikemukakan oleh Knowles (1975) adalah “inisiatif” yang menunjukkan pula adanya ‘will’ seperti pada konsep *self-defernination*. Dengan kata lain, kedua istilah tersebut mengandung pengertian adanya kemauan dan kontrol seseorang terhadap perilakunya.

Istilah lain dalam bidang ilmu psikologi yang memiliki pengertian serupa atau dapat dihubungkan dengan konsep *self-directed learning* adalah *self-regulated learning*. Pengertian *self-regulation* menurut Pintrich dan Schunk (1996) adalah *is the process whereby students activate and sustain cognitions, behaviors, and affects that are systematically oriented toward attainment of their goals*.

Pengertian *self-regulation* yang dikemukakan Pintrich & Schunk mempunyai pengertian yang sama dengan definisi pembelajaran mandiri dari konsep *self-directed learning*, yaitu bahwa siswa bersikap aktif dalam belajar. Jika dibandingkan dengan definisi yang dikemukakan Knowles (1975), maka kedua istilah tersebut mengandung pengertian adanya kemampuan individu untuk mengatur atau mengelola belajarnya secara aktif dengan cara yang sistematis. Schutz (1991) mempergunakan istilah perilaku mandiri (*self-directed behavior*) untuk menjelaskan tentang *self-regulated behavior*.

Ponton dan Carr (2000) menjelaskan bahwa konsep *self-direction* dapat dihubungkan dengan konsep Silen (2003) dalam makalahnya, mengemukakan bahwa konsep *self-direction* seringkali dihubungkan dengan konsep *self-regulated learning* yang berkembang pada bidang psikologi kognitif.

Perkembangan konsep *self-regulated learning* pada bidang psikologi kognitif ini melibatkan anak-anak sampai orang dewasa. Sedangkan konsep *self-directed learning* lebih berkembang pada bidang pendidikan orang dewasa, karena konsep *self-directed learning* dihubungkan dengan karakteristik kemandirian pada orang dewasa. Oleh karena itu, pembelajaran mandiri yang dilakukan anggota dewan dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagai subjek penelitian, masuk dalam pendidikan orang dewasa. Konsep *self-directed learning* lebih berkembang dibandingkan dengan konsep *self-regulated learning*.

*Self-directed learning* juga sering dihubungkan dengan konsep *independence* dan *autonomy* yang berarti kemandirian. Ketiga konsep tersebut sering dihubungkan satu sama lain karena peningkatan kompetensi anggota dewan yang mandiri berhubungan dengan pendidikan orang dewasa. Sedangkan salah satu karakteristik orang dewasa adalah kemandirian. Kemandirian juga merupakan salah satu ciri perkembangan pada orang dewasa. Karena alasan-alasan tersebut, maka konsep *self-direction* atau *self-directed learning* dihubungkan dengan konsep *independence* dan *autonomy* (Candy, 1991; Hiemstra, 1998). Selain itu, pengertian

*autonomy* juga dipergunakan dalam konsep *self-directed learning* untuk menjelaskan salah satu dimensi dan *self-directed learning*, yaitu *personal autonomy* yang menunjukkan kebebasan atau kemandirian orang yang memiliki kemampuan pembelajaran mandiri atau *self-directed learning* dan tekanan baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Istilah atau konsep lain yang sering dihubungkan dengan konsep *self-directed learning* adalah *self-management*. Jika pengertian *self-directed learning* seperti yang dikemukakan oleh Knowles (1975) dikaji lebih cermat, maka pengertian tersebut mengandung arti mengenai kemampuan seseorang untuk mengelola dirinya dan hal ini berhubungan dengan *self-management*. Menurut Candy (1991), salah satu dimensi dari *self-directed learning* adalah *self-management*. Seorang ahli, Douglas G Long (1990), bahkan mempergunakan kata *learner managed learning* untuk mengacu pada pemahaman yang sama dengan konsep *self-directed learning*. Long menggunakan istilah tersebut untuk memperjelas kondisi yang menunjukkan bahwa belajar dikelola atau dilakukan atas inisiatif pembelajar.

Dimensi lain *self-directed learning* adalah *learner-control*. Dimensi tersebut membuat konsep *self-directed learning* dihubungkan dengan konsep *locus of control*. Menurut Hurger (1992), *locus of control* berhubungan dengan seberapa jauh kontrol pribadi yang dianggap dimiliki oleh seseorang.

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2003). Pada proses belajar diperlukan kemandirian dalam belajar. Mujiman (dalam Dhesiana, 2005) menyatakan bahwa kemandirian belajar adalah kegiatan belajar aktif, yang didorong oleh niat atau motif untuk menguasai suatu kompetensi guna mengatasi suatu masalah, dan dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki. Penetapan kompetensi sebagai tujuan belajar, dan cara pencapaiannya, baik penetapan waktu belajar, tempat belajar, irama belajar, tempo belajar, cara belajar, maupun evaluasi belajar, dilakukan oleh siswa sendiri. Di sini pembelajaran mandiri lebih dimaknai sebagai usaha siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang didasari oleh niatnya untuk menguasai suatu kompetensi tertentu.

Kemandirian belajar dapat menghasilkan *self directed learning* dalam belajar, karena menurut Gibbons (2002), *self directed learning* dapat dibentuk melalui empat tahap yaitu, pembelajar berpikir secara mandiri artinya pembelajar yang sebelumnya tergantung pada pemikiran guru menjadi tergantung pada pemikiran sendiri, tahap kedua adalah belajar manajemen diri sendiri, lalu pembelajar belajar perencanaan diri tentang bagaimana pembelajar akan mencapai program belajar yang sudah ditetapkan, lalu tahap terakhir adalah terbentuknya *self directed*

*learning dimana* pembelajar memutuskan sendiri apa yang akan dipelajari, dan bagaimana cara pembelajar memelajarinya.

Menurut Knowles (1975) pentingnya *self directed learning* dalam proses pembelajaran didasarkan pada dua hal yaitu orang-orang yang memiliki inisiatif sendiri dalam belajar akan terus belajar dan akan lebih baik dalam belajar bila dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki inisiatif dalam belajar, lalu mereka juga akan belajar secara lebih mendalam dan menetap.

Gibbons (2002) menyatakan bahwa ketika pembelajar mulai untuk mengejar hasil belajar secara individual, pembelajar memerlukan lingkungan belajar yang sesuai dengan aktivitas belajar pembelajar seperti lingkungan yang menawarkan banyak pilihan belajar, lingkungan yang sesuai, dan lingkungan yang menawarkan aturan baru. Untuk meningkatkan hasil belajar, perlu adanya kesesuaian lingkungan belajar dengan aktivitas *self directed learning* yang akan terjadi.

Menurut Gibbons (2002), *self directed learning* adalah peningkatan pengetahuan, keahlian, prestasi, dan mengembangkan diri dimana individu menggunakan banyak metode dalam banyak situasi dalam setiap waktu. *Self directed learning* diperlukan karena dapat memberikan pembelajar kemampuan untuk mengerjakan tugas, untuk mengkombinasikan perkembangan kemampuan dengan perkembangan karakter, dan mempersiapkan pembelajar untuk memelajari seluruh kehidupan mereka. *Self directed learning* meliputi bagaimana pembelajar belajar setiap harinya, bagaimana

pembelajar dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang cepat berubah, dan bagaimana pembelajar dapat mengambil inisiatif sendiri ketika suatu kesempatan tidak terjadi atau tidak muncul.

Menurut Gibbons (2002) aktivitas dan program *self directed learning* berdasarkan pada lima aspek dasar yang menjadi elemen penting dalam *self directed learning*, yaitu:

1. Siswa mengontrol banyaknya pengalaman belajar yang terjadi

Perubahan utama dari *teacher directed learning* menjadi *self directed learning* adalah sebuah perubahan pengaruh dari guru ke siswa. Untuk siswa, hal ini menunjukkan sebuah perubahan kontrol dari luar menjadi kontrol dari dalam. Siswa memulai membentuk pendapat dan ide mereka, membuat keputusan mereka sendiri, memilih aktivitas mereka sendiri, mengambil tanggung jawab untuk diri mereka sendiri, dan dalam memasuki dunia kerja. Mengisi siswa dengan tugas untuk mengembangkan pembelajaran mereka, mengembangkan mereka secara individual, dan membantu mereka untuk berlatih menjadi peran yang lebih dewasa. *Self directed learning* tidak hanya membuat siswa belajar secara efektif tetapi juga membuat siswa lebih menjadi diri mereka sendiri.

2. Perkembangan keahlian

Kontrol yang berasal dari dalam tidak akan memiliki tujuan kecuali jika siswa belajar untuk fokus dan menerapkan talenta dan kemampuan mereka. *Self directed learning* menekankan pada perkembangan keahlian dan proses menuju

aktivitas produktif. Siswa belajar untuk mencapai hasil program, berpikir secara mandiri, dan merencanakan dan melaksanakan aktivitas mereka sendiri. Siswa mempersiapkan lalu berunding dengan guru mereka. Maksud ini untuk menyediakan kerangka yang memungkinkan siswa untuk mengidentifikasi minat mereka dan membekali mereka untuk sukses.

### 3. Mengubah diri pada kinerja/performansi yang paling baik

*Self directed learning* dapat gagal tanpa tantangan yang diberikan kepada siswa. Pertama, guru memberikan tantangan kepada siswa, lalu guru menantang siswa untuk menantang diri mereka sendiri. Tantangan ini memerlukan pencapaian sebuah level performansi yang baru dalam sebuah tempat yang familiar atau mencoba pada sebuah tempat yang diminati. Menantang diri sendiri berarti mengambil risiko untuk keluar dari sesuatu yang mudah dan familiar.

### 4. Manajemen diri siswa

Dalam *self directed learning*, pilihan dan kebebasan dihubungkan dengan kontrol diri dan tanggungjawab. Siswa belajar untuk mengekspresikan kontrol dirinya dengan mencari dan membuat komitmen, minat dan aspirasi diri. *Self directed learning* memerlukan keyakinan, keberanian, dan menentukan untuk usaha yang terlibat. Siswa mengembangkan atribut ini dan mereka menjadi ahli untuk mengatur waktu dan usaha mereka dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk melakukannya. Dalam menghadapi hambatan, siswa belajar untuk menghadapi

kesulitan mereka, menemukan alternatif, dan memecahkan masalah mereka dalam rangka untuk menjaga produktivitas yang efektif. Kombinasi dari sumber yang berasal dari dalam diri dan keahlian dalam kinerja diperlukan untuk dapat memajemen diri dalam *self directed learning*.

#### 5. Motivasi diri dan penilaian diri

Banyak prinsip dari motivasi yang dibangun untuk *self directed learning*, seperti mencapai tujuan minat yang tinggi. Ketika siswa menggunakan prinsip ini, siswa menjadi elemen utama dari motivasi diri siswa. Dengan mengatur tujuan penting untuk diri mereka, menyusun *feedback* untuk pekerjaan mereka, dan mencapai kesuksesan, mereka belajar untuk menginspirasi usaha mereka sendiri. Persamaannya, siswa belajar untuk mengevaluasi kemajuan diri mereka sendiri, mereka menilai kualitas dari pekerjaan mereka dan proses yang didesign untuk melakukannya. Dalam *self directed learning*, penilaian merupakan hal yang penting dari belajar dan belajar bagaimana memelajarinya. Siswa sering memulai evaluasi diri dalam belajar yang mereka serahkan kepada guru meliputi sebuah deskripsi standar yang akan mereka capai. Seperti motivasi diri yang memungkinkan siswa untuk menghasilkan prestasi yang dapat dievaluasi, penilaian diri juga memotivasi siswa untuk mencari prestasi terbaik yang mungkin terjadi.

Tahapan *self directed learning* dapat diuraian sebagai berikut:

a. Siswa berpikir secara mandiri

Pada tahap ini, ruangan kelas dengan metode belajar *teacher directed learning*, dengan instruksi guru dan aktivitas siswa secara langsung, berubah menjadi mengarahkan siswa yang sebelumnya tergantung pada pemikiran guru menjadi tergantung pada pemikiran diri mereka sendiri. Guru berubah dari yang sebelumnya menjelaskan menjadi menanyakan, dan dari yang sebelumnya memberikan instruksi menjadi memberikan bimbingan, mengajarkan siswa untuk berpikir dan menemukan diri mereka sendiri. Pada pendekatan ini hasil program menjadi pertanyaan untuk diinvestigasi, dipikirkan dan dipertanyakan.

b. Mengajarkan belajar memanejemen diri

Dalam belajar memanejemen diri, guru mengubah program menjadi paket belajar dimana siswa dapat bekerja dengan cara mereka dengan langkah mereka sendiri. Paket belajar dapat mengambil banyak bentuk tetapi semuanya menjelaskan pada siswa tentang apa yg dipelajari, bagaimana mereka harus belajar, dan apa yang harus mereka lakukan untuk membuktikan bahwa mereka telah menyelesaikan satu paket dan siap untuk melangkah ke paket selanjutnya. Paket dapat menggunakan media, menghubungkan siswa pada kesempatan insruksional yang khusus. Dengan kesiapan paket, guru dapat merancang sebuah program untuk mengajarkan siswa keahlian yang mereka butuhkan untuk menyelesaikannya;

mengatur tujuan, penjadwalan waktu, dan mengorganisasikan usaha belajar mereka. Setiap paket harus meliputi sebuah arti dari penilaian, yang dikelola diri sendiri atau peran guru dalam memonitor secara rutin. Pembelajaran dilengkapi; aspek dari kemandirian belajar meliputi kemampuan siswa untuk mengatur aktivitas belajar mereka secara efektif.

c. Belajar perencanaan diri

Dalam belajar perencanaan diri, siswa memutuskan sendiri bagaimana mereka mencapai hasil program yang ditetapkan. Seolah-olah mereka menulis panduan belajar sendiri dan mengikutinya. Setiap siswa merancang rencana sendiri, sebagai rencana yang berbeda. Keanekaragaman ini memerlukan dua perkembangan program yang utama: guru harus memperkenalkan berbagai cara untuk belajar dan mengatur pilihan belajar untuk menempatkan cara-cara ini untuk bekerja. Dengan pemilihan program, guru berperan untuk mengembangkan sebuah program yang mengajarkan siswa bagaimana menemukan kekuatan mereka, merencanakan aktivitas belajar mereka, menyusun sumber mereka sendiri, dan memberikan inisiatif sendiri. Ketika rencana belajar siswa terbuka, mereka sering melibatkan pengalaman yang konkret sebagai investigasi, dan sering mengarahkan siswa menyelesaikan aktivitas produktif mereka, kombinasi dari pengalaman, belajar, dan tindakan.

#### d. *Self directed learning*

Dalam *self directed learning*, siswa memilih hasil belajar mereka sendiri, mereka memutuskan apa yang akan mereka pelajari dan bagaimana mereka memelajarinya. Mereka mendesign aktivitas mereka sendiri dan menulis proposal yang menjadi perjanjian dengan guru dan yang lain tentang apa yang akan mereka capai, jadwal yang harus mereka ikuti, dan level keunggulan yang akan mereka cari. Guru membuat kerangka untuk memutuskan, sebuah dukungan untuk membimbing kemajuan siswa, dan prosedur untuk diikuti. Siswa membutuhkan dukungan, *feedback*, dan bantuan untuk berhasil dalam *self directed learning*. Itu diberikan melalui dukungan sosial dari teman sebaya, ataupun pertemuan dengan guru. Dalam *self directed learning*, motivasi menjadi kritis, siswa harus menemukan inti minat yang menjanjikan dan mengejar secara antusias nilai-nilai dan janji mereka untuk masa depan.

Menurut Long (dalam Bath & Kamath, 2005) *self directed learning* adalah proses mental yang biasanya disertai dan didukung dengan aktivitas perilaku yang meliputi identifikasi dan pencarian informasi. Dalam *self directed learning*, pembelajar secara sengaja menerima tanggung jawab untuk membuat keputusan tentang tujuan dan usaha mereka sehingga mereka sendiri yang menjadi agen perubahan dalam belajar.

Teori Guglielmino (dalam Shiong, dkk, 1977) mengemukakan bahwa *self directed learning* dapat terjadi dalam

banyak situasi yang bervariasi, mulai dari ruangan kelas yang berfokus pada guru secara langsung (*teacher directed*) menjadi belajar dengan perencanaan siswa sendiri (*self planned*, dan dilakukan sendiri (*self conducted*). Guglielmino (1977) lebih lanjut menyatakan tentang karakteristik yang dimiliki oleh pelajar, yakni sikap, nilai, kepercayaan, dan kemampuan yang akhirnya menentukan apakah *self directed learning* terjadi pada suatu situasi belajar.

Kemandirian dalam belajar (*self-direction in learning*) dijelaskan pada berbagai literatur dengan menggunakan label atau istilah konsep pembelajaran mandiri atau *self-directed learning* (Candy, 1991: Hiemstra, 1998: Knowles, 1975: Moore, 1986: Moore & Kearsley, 1996: Simpson, 2000). Konsep *self-directed learning* juga digunakan oleh Bandura (1986) untuk menjelaskan tentang individu mandiri yang dalam mengambil keputusan tidak tergantung pada konsep stimulus respon seperti yang dijelaskan oleh teori belajar klasik.

Candy (1991) mengungkapkan bahwa istilah pembelajaran mandiri merupakan istilah yang berkembang pada bidang pendidikan, pengajaran, dan penelitian orang dewasa. Penggunaan istilah pembelajaran mandiri terjadi karena kemandirian dihubungkan dengan karakteristik orang dewasa yang dianggap mandiri secara psikologis. Karakteristik mandiri ini membedakan orang dewasa dengan anak-anak dan remaja.

Lebih jauh Knowles (1975) menjelaskan bahwa istilah pembelajaran mandiri atau *self directed learning* memiliki beberapa label istilah dalam berbagai literatur. Antara lain: *self planned learning, inquiry method independent learning, self education, self-instruction, self-teaching, self study*; dan *autonomous learning*.

Knowles (1975) mendefinisikan pembelajaran mandiri (*self-directed learning*) sebagai suatu proses yang menunjukkan bahwa seseorang mengambil inisiatif, baik dengan atau tanpa bantuan orang lain, dalam melakukan diagnosis kebutuhan-kebutuhan belajar mereka, merumuskan tujuan-tujuan belajar, mengidentifikasi sumber-sumber belajar, memiliki dan melaksanakan strategi belajar yang sesuai, dan mengevaluasi hasil belajar mereka sendiri. Selaras dengan definisi Knowles, Hiemstra (1998) mengemukakan bahwa pembelajaran mandiri dapat dilihat sebagai semua bentuk belajar yang menunjukkan bahwa individu memiliki tanggung jawab utama untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi usahanya.

Baik definisi yang dikemukakan oleh Knowles maupun Hiemstra menunjukkan kata kunci dalam pembelajaran mandiri, yaitu adanya “inisiatif” dari seseorang untuk mengelola belajarnya, atau yang dijelaskan oleh Hiemstra (1998) sebagai sikap proaktif’ dalam mengelola belajarnya. Definisi yang dikemukakan oleh Knowles dan Hiemstra juga menjelaskan bahwa pembelajaran mandiri adalah tipe belajar yang dibedakan

dengan belajar yang diarahkan oleh orang lain atau *teacher-directed learning*. Pada *teacher-directed learning*, pembelajar lebih ber-sikap reaktif dalam proses belajar yang diarahkan oleh guru (Damayanti, 1993). Sedangkan definisi pembelajaran mandiri menunjukkan bahwa subjek yang terlibat kegiatan pembelajaran mandiri melakukan aktivitas mengatur (*regulate*), mengontrol (*control*), atau melakukan (*conduct*) kegiatan belajar mereka (Jarvis, 1990).

Seseorang yang memiliki kemampuan pembelajaran mandiri yang tinggi atau pembelajar yang mandiri (*self-directed learner*) digambarkan sebagai orang yang mampu mengontrol proses belajar (Guglielmino & Guglielmino, 1991), memiliki konsep diri yang positif dan lebih efektif dalam berbagai aspek kehidupan dibandingkan dengan mereka yang kemandirian dalam belajarnya rendah (Sabbaghian, 1980), mempergunakan bermacam-macam sumber belajar, motivasi dari dalam dirinya (*internal motivation*), dan memiliki kemampuan mengatur waktu (Guglielmino & Guglielmino, 1991). Gage dan Berliner (1988) dalam buku *Educational Psychology* menggunakan konsep *self-directed learning* untuk menjelaskan tentang belajar secara individual (*individual instruction*) atau belajar yang dilakukan oleh orang dewasa pada pendidikan terbuka (*open education*).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran mandiri (*self directed learning*) adalah peningkatan pengetahuan, keahlian, prestasi, dan

pengembangan diri individu yang diawali dengan inisiatif sendiri dengan perencanaan belajar sendiri (*self planned*) dan dilakukan sendiri (*self conducted*), menyadari kebutuhan belajar, tujuan belajar, membuat strategi belajar, menilai hasil belajar, serta memiliki tanggung jawab sendiri menjadi agen perubahan dalam belajar. Pembelajaran mandiri, kaitannya dengan studi buku ini adalah bagaimana anggota DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan proses pembelajaran mandiri, dengan mengambil inisiatif sendiri dalam melakukan kebutuhan belajar, serta melaksanakan strategi belajar sendiri, untuk meningkatkan kompetensinya (pengetahuan, keterampilan, pengembangan diri, dan *attitude*), khususnya dalam meningkatkan kompetensi diri pada fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.





# **BAB III**

## **PENTINGNYA PEMBELAJARAN MANDIRI BAGI ANGGOTA LEGISLATIF**

Bagi anggota legislatif, menjadi pembelajar mandiri merupakan suatu hal yang sangat penting. Pembelajaran mandiri ini antara lain mencakup pengambilan inisiatif sendiri dalam melakukan kebutuhan belajar, serta melaksanakan strategi belajar sendiri, untuk meningkatkan kompetensinya yang mencakup pengetahuan, keterampilan, pengembangan diri, dan *attitude*, terutama dalam meningkatkan kompetensi diri pada fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Terkait dengan fungsi anggota legislatif (dalam hal ini anggota DPRD provinsi) berdasarkan pasal 41 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 96 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 292 Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta pasal 316 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, maka DPRD provinsi memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu;

a. Legislasi; fungsi legislasi sebagaimana diwujudkan dalam

- membentuk peraturan daerah bersama gubernur;
- b. Anggaran; fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk merencanakan, menyusun, dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama pemerintah daerah; dan
  - c. Pengawasan; fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan pada pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, peraturan gubernur, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Uraian pasal 316 di atas kemudian dijelaskan melalui pasal 317 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa DPRD provinsi memiliki wewenang dan tugas antara lain:

- a. Membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- c. Melaksanakan pengawasan pada pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada presiden melalui menteri dalam negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. Memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah

- daerah provinsi pada rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan pada rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
  - h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
  - i. Memberikan persetujuan pada rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  - j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - k. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam kasus Peraturan DPRD Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Timur dijelaskan bahwa dengan berlandaskan pada kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang DPRD Provinsi Jawa Timur, maka seluruh program kerja DPRD Provinsi Jawa Timur senantiasa mengarah kepada implementasi ketiga fungsi DPRD, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dalam menjalankan fungsi legislasi, dijabarkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta perputaran roda perekonomian di daerah memerlukan arahan kebijakan yang menjadi rambu-rambu sebagai aturan main baik bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat pada umumnya. DPRD Provinsi Jawa Timur, sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah, bersama-sama dengan gubernur, harus menentukan arah/kebijakan melalui penetapan peraturan daerah. Kesimpulannya adalah, bahwa wewenang DPRD dalam membentuk Perda sangat kuat dan harus dilihat sebagai fungsi yang sangat strategis. Oleh sebab itu, setiap anggota DPRD perlu memiliki “kapasitas” yang cukup dalam rangka pembentukan peraturan daerah.

Sedangkan dalam menjalankan fungsi penganggaran wujud pelaksanaannya adalah keterlibatan DPRD secara aktif di dalam menyusun, membahas, dan menetapkan APBD. Selain aktif, DPRD juga harus proaktif dengan senantiasa mencari dan mengumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai dasar melakukan koreksi dan evaluasi di dalam proses penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD.

Kemudian dalam menjalankan fungsi pengawasan, selain melakukan pengawasan pada kinerja pemerintah daerah di dalam melaksanakan peraturan daerah, termasuk APBD, DPRD berkewajiban pula melakukan pengawasan pada pelaksanaan peraturan perundangan, pelaksanaan kerjasama internasional di daerah, serta pengawasan pada pelaksanaan berbagai kebijakan lainnya, baik kebijakan pemerintah daerah maupun kebijakan pemerintah.

Dengan rincian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi, tugas, dan kewajiban anggota DPRD sangat berat, rumit, dan kompleks dalam mengemban amanat rakyat, menentukan dan

mengawal kebijakan pemerintahan daerah, pengendali anggaran, serta mengontrol, dan mengawasi pembangunan diwilayahnya.

Pada aspek implementasi penggunaan wewenang pembentukan Perda, sangat tergantung kepada kemampuan anggota DPRD untuk merumuskan rancangan Perda. Praktik selama ini, dan hampir di seluruh lembaga dewan, tidak banyak inisiatif Perda yang dihasilkan langsung dari lembaga DPRD. Kelemahan DPRD dalam menjalankan fungsi pembentukan Perda seharusnya dapat dikurangi jika kapabilitas anggota DPRD cukup.

Di DPRD Provinsi Jawa Timur, praktik pembentukan Perdanya selama tahun 2014 telah menghasilkan sebanyak 14 (empat belas) Perda, yang terdiri dari 6 (enam) inisiasi dari DPRD Jawa Timur serta 8 (delapan) usulan dari Gubernur Jawa Timur. Komposisi ini menunjukkan bahwa eksekutif lebih memiliki inisiasi dalam membuat Raperda/Perda dibandingkan legislatif. Berikut judul Perda dan asal usulannya, seperti tampak pada tabel berikut ini:

**Tabel 3**  
**Rekapitulasi Perda dan Asal Inisiasi Tahun 2014**

<b>Nomor</b>	<b>Judul Perda</b>	<b>Usulan</b>
1 Tahun 2014	Penyelenggaraan Jalan Berkeselamatan	DPRD
2 Tahun 2014	Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Gubernur
3 Tahun 2014	RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019	Gubernur
4 Tahun 2014	Perpustakaan	Gubernur
5 Tahun 2014	Perusahaan Daerah Air Bersih	Gubernur

<b>Nomor</b>	<b>Judul Perda</b>	<b>Usulan</b>
6 Tahun 2014	Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol	DPRD
7 Tahun 2014	Tenaga Kesehatan	DPRD
8 Tahun 2014	Pembangunan dan Pemberdayaan Perfilman Jawa Timur	DPRD
9 Tahun 2014	Penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Jawa Timur	DPRD
10 Tahun 2014	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013	Gubernur
11 Tahun 2014	Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014	Gubernur
12 Tahun 2014	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Dana Cadangan	Gubernur
13 Tahun 2014	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal	DPRD
14 Tahun 2014	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015	Gubernur

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur (2017)

Sementara itu di tahun 2015, meskipun inisiasi membuat Raperda/Perda lebih banyak datang dari legislatif, namun jumlah keseluruhan Perda yang dihasilkan menurun empat Perda jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat bahwa selama tahun 2015 telah dihasilkan sebanyak 10 (sepuluh) Perda yang terdiri dari 7 (tujuh) inisiasi dari DPRD Jawa Timur dan 3 (tiga) usulan dari

Gubernur Jawa Timur. Berikut judul Perda dan asal usulannya, seperti tampak pada tabel berikut ini:

**Tabel 4**  
**Rekapitulasi Perda dan Asal Inisiasi Tahun 2015**

Nomor	Judul Perda	Usulan
1 Tahun 2015	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pembentukan Peraturan Daerah	DPRD
2 Tahun 2015	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	DPRD
3 Tahun 2015	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun	DPRD
	2012 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	
4 Tahun 2015	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Penyelenggaraan Kearsipan	DPRD
5 Tahun 2015	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perlin dungan Petani dan Nelayan	DPRD

<b>Nomor</b>	<b>Judul Perda</b>	<b>Usulan</b>
6 Tahun 2015	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014	Gubernur
7 Tahun 2015	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015	Gubernur
8 Tahun 2015	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	DPRD
9 Tahun 2015	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama	DPRD
10 Tahun 2015	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016	Gubernur

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur (2017)

Sedangkan selama tahun 2016, telah dihasilkan sebanyak 19 (sembilan belas) Perda yang terdiri dari 9 (sembilan) inisiasi dari DPRD Jawa Timur, 9 (sembilan) usulan dari Gubernur Jawa Timur, dan 1 (satu) usulan bersama. Meskipun ada perimbangan inisiasi

pembuatan Raperda/Perda tahun 2016, namun idealnya seperti yang dikatakan Thoha, inisiasi harus lebih banyak datang dari pihak legislatif. Berikut judul Perda dan asal usulannya, seperti tampak pada tabel berikut ini:

**Tabel 5**  
**Rekapitulasi Perda dan Asal Inisiasi Tahun 2016**

<b>Nomor</b>	<b>Judul Perda</b>	<b>Usulan</b>
1 Tahun 2016	Sistem Kesehatan Provinsi	Gubernur
2 Tahun 2016	Upaya Kesehatan	Gubernur
3 Tahun 2016	Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	DPRD
4 Tahun 2016	Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri	Gubernur
5 Tahun 2016	Pencabutan 4 (empat) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur	DPRD
6 Tahun 2016	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016	Gubernur
7 Tahun 2016	Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	DPRD
8 Tahun 2016	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	DPRD dan Gubernur

Nomor	Judul Perda	Usulan
9 Tahun 2016	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Dana Cadangan	Gubernur
10 Tahun 2016	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal	DPRD
11 Tahun 2016	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Gubernur
12 Tahun 2016	Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016	Gubernur
13 Tahun 2016	Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	DPRD
14 Tahun 2016	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik	DPRD
15 Tahun 2016	Penggabungan Perseroan Terbatas (PT) Jatim <i>Investment Management</i> ke dalam Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama	DPRD
16 Tahun 2016	Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur	Gubernur
17 Tahun 2016	APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017	Gubernur
18 Tahun 2016	Pengelolaan Sungai	DPRD

Nomor	Judul Perda	Usulan
9 Tahun 2016	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penggabungan 5 (Lima) Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Perubahan Bentuk Badan Hukum 5 (Lima) Perusahaan Daerah yang Digabung dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Panca Wira Usaha Jawa Timur	DPRD

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur (2017)

Menanggapi data Rekapitulasi Perda dan Asal Inisiasi dari tahun 2014 sampai tahun 2017 dimana pihak DPRD belum bisa mendominasi atas usulan Perda yang dihasilkan, hal ini merupakan sebuah indikasi akan kurang mumpuninya kompetensi yang dimiliki oleh anggota DPRD itu sendiri.

Dalam hal ini, kompetensi yang harus dimiliki oleh para anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi meliputi: *Pertama* kemampuan penguasaan membuat peraturan perundangan di daerah atau disebut *legal drafting*. *Kedua*, pemahaman materi substansi peraturan perundangan yang akan disusun yang dilandasi analisis aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Oleh karena itu, dalam kondisi belum terpenuhinya kebutuhan kompetensi ini, dalam forum-forum pembahasan rancangan Perda, maka DPRD sering menghadirkan para pakar/akademisi/praktisi bidang hukum untuk membahasnya. Salah satu permasalahan kompetensi ini muncul oleh karena singkatnya tenggat waktu penunjukan anggota

DPRD. Seringkali para anggota DPRD belum dibekali materi tentang tupoksi kedewanan, hukum, dan pengetahuan kemasyarakatan ketika sebelum dilantik.

Kompetensi legislasi memiliki dimensi cakupan yang cukup luas. Seorang anggota DPRD harus memiliki kompetensi menggali informasi dan data dari masyarakat sehingga suatu kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Kemudian anggota DPRD harus berkompetensi dalam tata cara membuat peraturan (*legal drafting*) dari awal hingga *finishing*. Di samping itu juga berkompetensi dalam manajemen waktu, khususnya pengaturan waktu yang sesuai dengan bidang tugasnya. Kompetensi manajemen waktu ini menjadi berguna agar tidak hanya sekadar mengikuti agenda persidangan yang disesuaikan dengan kebutuhan eksekutif.

Sorotan kepada anggota DPRD terkait dengan kompetensi anggota DPRD juga dikemukakan oleh Syamsudin (2002) yang menyebutkan bahwa rendahnya tingkat kompetensi anggota DPRD dapat dilihat dari rendahnya kuantitas-kualitas produk hukum yang dihasilkan DPRD. Selain itu sistem politik yang didesain sampai pada saat ini masih menyulitkan berbagai partai politik untuk menyiapkan kader-kadernya secara lebih terencana untuk duduk di lembaga legislatif.

Secara khusus, Kambuaya (2012) memberikan paparan bahwa fungsi legislasi sangat sulit dalam hal pelaksanaannya dibandingkan dengan fungsi dewan yang lainnya, karena beberapa

alasan, diantaranya: *Pertama* sebagian besar anggota legislatif tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum. *Kedua*, sebagian besar anggota legislatif belum memiliki pengalaman dalam membuat rancangan peraturan daerah. Senada dengan pernyataan di atas, begitupun halnya terhadap kondisi yang ada pada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Tercatat bahwa dari 100 anggota yang ada, yang memiliki latar belakang pendidikan hukum atau bergelar sarjana hukum atau master dalam bidang hukum hanya ada 23 orang. Itu artinya, 23 % berlatar belakang pendidikan hukum dan 77% berlatar belakang pendidikan non-hukum. Jika merujuk pada komposisi tersebut maka tentu masih dalam kondisi kurang ideal. Itu artinya, 77 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur lainnya yang tidak berlatar belakang pendidikan hukum harus berupaya keras melakukan pembelajaran mandiri untuk meningkatkan kompetensi diri di bidang legislasi.

Pada fungsi anggaran, peran DPRD di dalam proses perumusan kebijakan APBD, sangat dipengaruhi oleh kapasitas individu dalam institusi pemerintahan daerah tersebut. Kemampuan anggota DPRD untuk melakukan identifikasi masalah dan aspirasi masyarakat menjadi kunci pertama dalam melahirkan kebijakan anggaran yang efektif dan efisien di dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Tentunya pada lembaga legislatif daerah ini, diharapkan adanya individu yang memiliki keluasan pengetahuan dan keahlian fungsional dalam setiap tahapan kebijakan anggaran yang akan diputuskan.

Persoalan yang kerap ditemukan pada anggota DPRD (Thoha, 2002) dalam menjalankan fungsi anggaran, adalah:

1. Pada dasarnya kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi penyusunan anggaran, tingkat urgensinya adalah sama dengan kebutuhan kompetensi untuk legislasi. Penguasaan kompetensi bidang prinsip dasar akuntansi, penggunaan-manfaat anggaran, dan prinsip akuntabilitas merupakan standar kebutuhan yang harus dikuasai oleh para anggota DPRD.
2. Umumnya anggota DPRD belum sepenuhnya memahami sistem anggaran yang berbasis kinerja yang berlaku saat itu. Pengetahuan para anggota DPRD tentang anggaran dan kaitannya dengan pembangunan ekonomi daerah, pajak dan retribusi daerah, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif, tampak masih terbatas. Secara substansial, penguasaan anggota DPRD pada kompetensi dasar yang dibutuhkan dalam pembahasan penetapan RAPBD masih belum memadai.
3. Sebagian besar para anggota DPRD masih belum menguasai prinsip dasar akuntansi, anggaran kinerja, teknik penyusunan dan manfaat anggaran, serta prinsip akuntabilitas. Pembahasan anggaran tidak mampu dilakukan sampai pada taraf analisis mendalam, terlebih analisis dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan dari anggaran yang telah ditetapkan tersebut. Perhatian para anggota DPRD rata-rata tertuju pada besaran belanja rutin dalam RAPBD tersebut.

Berkenaan dengan pelaksanaan fungsi anggaran, sebenarnya para anggota DPRD tidak harus mampu secara detail menguasai di dalam menganalisis dan menyusun penganggaran. Namun mereka harus mampu membaca arah dari usaha pembangunan daerah mereka sendiri. Anggota DPRD harus memiliki kemampuan untuk membuat arah kebijakan anggaran dan ini harus sering diajarkan. Fungsi penganggaran benar-benar menempatkan posisi DPRD sangat strategis bukan hanya pada materi tetapi juga relasi politik dengan kepala daerah. DPRD memiliki hak untuk menolak dan tidak menyetujui rancangan APBD yang diajukan oleh eksekutif.

Sehubungan dengan fungsi anggaran, Kambuaya (2012) memberikan paparan bahwa kendala yang dihadapi anggota legislatif dalam melaksanakan fungsi anggaran diantaranya adalah sebagian besar anggota legislatif tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi. Merujuk pada kemampuan menjalankan fungsi anggaran yang diharapkan adanya individu yang memiliki keluasan pengetahuan dan keahlian fungsional dalam setiap tahapan kebijakan anggaran yang akan diputuskan, seperti penguasaan kompetensi bidang prinsip dasar akuntansi, penggunaan-manfaat anggaran, prinsip akuntabilitas, pengetahuan tentang anggaran dan kaitannya dengan pembangunan ekonomi daerah, pajak dan retribusi daerah, penguasaan pada kompetensi dasar yang dibutuhkan dalam pembahasan penetapan RAPBD, menguasai prinsip dasar akuntansi, anggaran kinerja, teknik

penyusunan dan manfaat anggaran, serta prinsip akuntabilitas, dan mampu membahas anggaran terlebih analisis dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan dari anggaran yang telah ditetapkan tersebut. Oleh karenanya, setidaknya telah menempuh pendidikan formal di bidang ekonomi.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang bergelar sarjana ekonomi atau master dalam bidang ekonomi ada 12 orang. Itu artinya 12 % berlatar belakang pendidikan ekonomi dan 88 % non-ekonomi. Jika merujuk pada komposisi tersebut tentu masih kurang ideal. Itu artinya 88 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur lainnya yang tidak berlatar belakang pendidikan ekonomi harus berupaya keras untuk meningkatkan kompetensi diri di bidang anggaran.

Penggunaan wewenang DPRD yang juga strategis adalah fungsi pengawasan. Ruang lingkup yang diatur dalam UU Pemda adalah melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara konseptual, fungsi pengawasan ini berpijak pada ranah *check and balance* dari fungsi pemerintahan dan fungsi parlemen.

Persoalan yang kerap ditemukan pada anggota DPRD (Thoha, 2002) dalam menjalankan fungsi pengawasan, adalah:

1. Kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi pengawasan/pengendalian/kontrol pada umumnya para anggota DPRD belum memahami substansi pengendalian secara rinci sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan/ pengendalian/kontrol

cenderung kurang efektif. Anggota DPRD banyak yang masih belum menguasai dasar-dasar pengawasan dan belum sepenuhnya menguasai substansi apa yang diawasi.

2. Fungsi pengawasan/pengendalian/kontrol dilaksanakan melalui dengar pendapat, kunjungan kerja, dan kunjungan ke lapangan, menerima pengaduan langsung dari masyarakat ke fraksi dan pimpinan dewan, menghadiri pertemuan-pertemuan dengan unsur-unsur masyarakat yang diadakan oleh Pemda, dan menerima masukan dari media massa. Sejauh ini, para anggota DPRD masih belum memiliki kompetensi seperti yang terkait dengan persoalan pengendalian tersebut. Akibatnya fungsi pengendalian yang dijalankan oleh dewan juga masih belum berjalan efektif sehingga disinyalir sebagian pihak pemerintah (eksekutif) memanfaatkan situasi ini.

Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, DPRD memiliki kewenangan melaksanakan pengawasan pada pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Bukan hanya itu, sebagai bagian dari pemerintahan daerah, DPRD sesungguhnya juga bertanggungjawab melakukan pengawasan pada layanan publik. Sejauh mana DPRD dapat memastikan bahwa kualitas pelayanan dari masing-masing lembaga layanan sesuai standar baku yang sudah berlaku, baik yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah, surat keputusan

kepala daerah, peraturan kepala daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Praktik penyelenggaraan tugas-tugas dan kewenangan para anggota DPRD selama ini juga telah menimbulkan sejumlah problematika. Berbagai isu muncul ke permukaan baik melalui forum-forum diskusi maupun yang di muat di media massa menunjukkan bahwa sebagian besar kualitas kompetensi anggota DPRD masih jauh dari memadai. Hal ini jelas mengancam keberhasilan penyelenggaraan fungsi-fungsi, tugas-tugas, dan kewenangan DPRD yang semakin besar tersebut.

Beratnya beban serta beragamnya tugas, fungsi, dan kewajiban anggota DPRD, konsekwensinya merupakan sebuah tuntutan seorang anggota DPRD harus memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan fungsinya. Namun dalam kenyataannya, banyak ditemukan berbagai permasalahan yang terkait dengan eksistensi anggota DPRD. Melihat hal tersebut, Thoha (2002) mengidentifikasi bahwa persoalan tersebut terletak pada setiap individu anggota DPRD serta pada persoalan institusi DPRD-nya itu sendiri.

Persoalan yang berbasis individu anggota DPRD antara lain meliputi; 1). Kualitas SDM di DPRD masih tergolong rendah umumnya kurang berpengalaman tentang pemerintahan, 2). Proses rekrutmen tidak berdasarkan kompetensi individu melainkan berdasarkan kedekatan pada pengurus partai, 3). Pertimbangan meritokrasi tidak digunakan pada kualifikasi calon

anggota DPRD, 4). Masih sering terdengar terdoda permainan uang (moral), serta 5). Anggota DPRD kurang mampu menampilkan kemampuan legislatif dan lebih banyak menampilkan keterampilan lisan dalam melakukan interupsi ketimbang pembuatan peraturan kebijakan.

Sedangkan persoalan yang berbasis dari institusi DPRD-nya antara lain; 1). Pelaksanaan *check and balance* tidak efektif, 2). Kekuasaan (*power*) cenderung bergeser ke legislatif, 3). Persepsi mitra sejajar yang distorsif, dan 4). Tidak jelas beda antara jabatan politik dan jabatan karier birokrasi daerah.

Senada dengan pernyataan Thoha, bahwa kendala yang dihadapi legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah persoalan yang berbasis individu anggota DPRD seperti kurang berpengalaman tentang pemerintahan. Data menunjukkan bahwa perbandingan posisi yang sudah berpengalaman (*incumbent*) dan yang belum berpengalaman (*non-incumbent*) DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2014-2019 adalah 34 berbanding 66. Komposisi tersebut tentu menunjukkan sebuah situasi yang kurang berimbang. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 6**  
**Komposisi Incumbent dan Non-incumbent Anggota DPRD**  
**Provinsi Jawa Timur Periode 2014 – 2019**

No	Fraksi	Incumbent		Non-incumbent	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	PKB	4	1	9	6
2	PDIP	8	0	8	3
3	DEMOKRAT	5	1	6	1
4	GERINDRA	3	0	9	1
5	GOLKAR	4	0	6	1
6	PAN	4	0	3	0
7	PKS	3	0	3	0
8	PPP	1	0	4	0
9	NADEM/HANURA	0	0	5	1
	Jumlah	32	2	53	13
Jumlah Total = 100		34		66	

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur (2017).

Harus diakui bahwa Pemilu yang telah dilaksanakan mampu menghasilkan rekrutmen politik yang demokratis dan adil. Namun demikian, sistem politiknya yang masih didesain dalam waktu yang relatif terbatas berimplikasi terhadap kesulitan yang dihadapi oleh partai politik dalam menyiapkan kader-kadernya secara lebih terencana dan berkualitas untuk duduk di lembaga legislatif. Maka wajar apabila terdapat sejumlah pandangan bahwa anggota DPRD sekarang perlu ditingkatkan kompetensinya, terutama dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai legislator, pengawas pembangunan, dan pengendali anggaran.

Berbagai persoalan tidak memadainya kompetensi yang dimiliki oleh para anggota DPRD dalam menjalankan 3 (tiga) fungsinya, di antaranya berakar pada sistem pembinaan parakader yang seharusnya dijalankan oleh mesin partai politik. Penyiapan para kader termasuk para anggota DPRD ini dilakukan dengan melakukan pendidikan politik di kalangan *grassroot* (kalangan masyarakat luas), dimana partai politik merupakan tempat berlabuh dari para anggota DPRD.

Tingkat kemampuan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan fungsinya dapat dilihat dari masing-masing *individual level of competency*. Kompetensi seperti ini sangat tergantung pada kemampuan, kecakapan, keahlian, dan pengetahuan masing-masing anggotanya pada bidang-bidang yang berkaitan dengan tugas-tugas DPRD. Thoha (2002) mengemukakan faktor-faktor yang berpengaruh pada kompetensi anggota DPRD sebagai berikut; 1). Etika dan moral belum dijadikan penentu, 2). Sistem rekrutmen para anggota, 3). Kualitas pendidikan dan pengalaman para anggota, 4). Rendahnya motivasi para anggota untuk kepentingan rakyat, dan 5). Sistem pemerintah yang dipergunakan.

Kualitas memang unsur yang sangat penting bagi kapabilitas sumber daya manusia, terlebih di era yang menuntut profesionalisme sekarang ini. Dan tuntutan kualitas pada seseorang yang aktif di politik sangat mendesak, sehingga

dinyatakan pantas secara sosial politik untuk menjadi kandidat dan atau menjadi anggota legislatif.

Terlebih lagi pada era reformasi ini peranan dan kedudukan anggota DPRD semakin menentukan bagi teraktualisasikannya kepentingan masyarakat. Sebab dalam era ini lahir sebuah kebijakan otonomi daerah yang memiliki esensi mendekatkan alur proses pengambilan kebijakan kepada masyarakat ditingkat akar rumput. Dengan sistem ini keberadaan anggota DPRD akan banyak menjadi tumpuhan harapan masyarakat.

Untuk meningkatkan kompetensi para anggota DPRD yang menjadi faktor penentu, adalah persoalan itikad atau motif dari para anggota DPRD itu sendiri untuk sadar akan kekurangan kemampuan diri. Sehingga membuka diri untuk berendah hati mau belajar. Banyak harapan, bahwa anggota DPRD harus memiliki visi dan misi ke depan dalam memperjuangkan amanat rakyat. Hal ini bisa dilakukan melalui kemauan belajar dengan sungguh-sungguh, meningkatkan kompetensi yang dibidangnya. Oleh karena itu, menjadi anggota DPRD berarti memiliki tanggung jawab yang berat, terutama tanggung jawab moral (Thoha, 2002).

Berkaitan dengan persoalan kompetensi anggota DPRD di atas, dimana; 1). Kualitas SDM di DPRD masih dianggap rendah, 2). Umumnya kurang berpengalaman tentang pemerintahan, 3). Masing-masing Parpol belum sepenuhnya menyiapkan SDM-nya yang mau didudukkan sebagai wakil rakyat, 4). Belum sepenuhnya

dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan anggota DPRD oleh Parpol untuk memperkuat kompetensi anggota, 5). Sistem politik yang belum berubah dimana sistem politik didesain dalam waktu yang relatif terbatas sehingga menyulitkan berbagai partai politik untuk menyiapkan kader-kadernya secara lebih terencana dan berkualitas untuk duduk di lembaga legislatif, 6). Belum berjalannya sistem pembinaan para kader yang seharusnya dijalankan oleh mesin partai politik, 7). Belum maksimalnya penyiapan para kader anggota DPRD melakukan pendidikan politik, 8). Tidak dibekalinya materi tentang tupoksi kedewanan, hukum, dan pengetahuan masyarakat sebelum para anggota DPRD itu dilantik, serta 9). Minimnya sekretariat dewan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi para anggota DPRD berkaitan dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan diri secara pribadi (pembelajaran mandiri) bagi anggota DPRD untuk mengejar ketertinggalan serta meningkatkan kompetensinya, agar dapat mengemban tugasnya dengan baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya seperti; fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.





# **BAB IV**

## **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESADARAN DIRI DAN INISIATIF ANGGOTA LEGISLATIF DALAM BELAJAR MANDIRI**

Biasanya, studi tentang pengembangan sumber daya manusia (PSDM) serta dorongan intervensinya banyak dilakukan dari sudut pandang luar diri manusia (eksternal). Namun buku ini berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana upaya pengembangan sumber daya manusia dilakukan dari dalam dirinya (internal) sebagai cara untuk menjelaskan tentang pembelajaran mandiri dimana individu dalam mengambil keputusan tidak tergantung pada konsep stimulus respon seperti yang dijelaskan oleh teori belajar klasik pada umumnya. Karena dalam pembelajaran mandiri, adanya “inisiatif” dari seseorang untuk mengelola belajarnya adalah sebagai sikap proaktif dalam mengelola belajarnya. Pembelajaran mandiri adalah tipe belajar yang sangat berbeda dengan tipe belajar yang diarahkan oleh orang lain atau *teacher-directed learning*. Pada *teacher-directed learning*, pembelajar lebih bersikap reaktif dalam proses belajar yang diarahkan oleh guru.

Dari ragam latar belakangnya, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki pendidikan yang berbeda-beda baik dari disiplin ilmu yang dikuasai maupun jenjang pendidikannya. Sementara itu, beban tugas anggota DPRD begitu banyak sehingga menyebabkan minimnya waktu untuk melanjutkan pendidikan formal terkait dengan tugas-tugasnya. Selain itu, Parpol yang berbeda, usia yang berbeda, latar belakang sosial- budaya-ekonomi yang berbeda, pengalaman yang berbeda dalam berorganisasi dan berpolitik, pengalaman berbeda menjadi anggota DPRD (ada yang *incumbent* ada juga yang baru saja menjadi anggota DPRD), dan minimnya Diklat/Bimtek/*workshop* yang dilakukan sekertariat dan Parpol telah menyebabkan suatu kekhasan dan keunikan tersendiri terkait faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran diri dan inisiatif anggota legislatif dalam proses belajar mandiri. Oleh karena itu, berikut diuraikan faktor-faktor tersebut berdasarkan atas studi kasus pada DPRD Provinsi Jawa Timur.

#### **A. Pengalaman Menjadi Anggota Dewan**

Studi kasus buku ini difokuskan kepada anggota dewan yang sama sekali belum pernah menjabat menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur (*non-incumbent*). Dari 9 (sembilan) informan, ada 3 (tiga) informan yang sudah pernah menjabat sebagai anggota dewan sebelumnya di tingkat kabupaten. Tetapi dari ke-sembilan informan yang dipilih, semuanya baru menjadi anggota dewan di level provinsi sejak 2014. Menurut beberapa anggota dewan yang pernah duduk di DPRD Kabupaten, tupoksi

di DPRD Provinsi jauh lebih berat karena lingkup demografi lebih luas serta sumber daya manusia yang berbeda. Namun menurut mereka, pengalaman pernah menjadi anggota dewan di level kabupaten, memberikan kemudahan ketika harus belajar secara mandiri dan memberikan energi positif dan menambah kepercayaan diri tatkala harus duduk menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

Salah satu alasan tersebut diungkapkan ZL politisi muda Partai Amanat Nasional yang duduk sebagai anggota komisi B bidang perekonomian.

*“Pengalaman kan guru yang terbaik. Pengalaman pernah menjadi anggota dewan di kabupaten sebagai modal awal untuk belajar tentang kedewanan di provinsi. Saya pernah menjadi anggota BPD. Legislatif di desa lah. Saya juga berangkatnya dari DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan pengalaman menjadi anggota dewan satu periode. Sampai alhamdulillah dipercaya masyarakat di DPRD Provinsi. Beda jadi anggota dewan di kabupaten dan provinsi adalah wilayahnya lebih luas di provinsi. Di Sidoarjo kan hanya 11 kecamatan. Saya lebih baik dulu belajar di kabupaten dari pada saya harus langsung ke provinsi. Karena kita akan lebih faham bila berjenjang. Jika kita sudah memahami daerah, kaki kita lebih kuat ketika duduk menjadi anggota dewan di provinsi. Jadi kita berproses itu lebih bagus daripada kita tiba-tiba naik ke atas”.*

Alasan lain diungkapkan AT, politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kelahiran Tulungagung, 31 Januari 1974 yang juga pernah berpengalaman duduk sebagai anggota dewan Kabupaten Blitar dua periode.

*“Akan lebih mudah belajar sekarang dari pengalaman masa lalu. Saya pernah menjadi anggota DPRD Kab. Blitar duduk di komisi pembangunan. Pernah pula aktif di komisi pendidikan dan kesehatan. Saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Blitar dua periode. Pengalaman ini menjadi pendorong semangat tatkala harus menghadapi berbagai persoalan di tupoksinya di provinsi. Pada prinsipnya pengalaman apapun sangat berharga, termasuk pengalaaman duduk di legislatif. Amat sangat beda ketika saya duduk sebagai anggota dewan di Kab. Blitar dengan di provinsi. Perbedaan yang sangat saya rasakan terkait dengan sumber daya manusia (SDM). Jika di kabupaten ketemunya dengan skup-skup yang selevel kabupaten. Menjalin komunikasi di level Jawa Timur, bagi saya ini adalah barang baru. Saya beradabtasi dan belum banyak tahu tentang komunikasi politik”.*

MS, yang duduk sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) dan anggota komisi A pun mengalami pengalaman yang sangat berharga di bidang kedewanan maupun dalam posisi eksekutif di Kabupaten Pasuruan. Pria tegas ini menyatakan bahwa banyak positifnya tatkala seorang anggota dewan provinsi berlatar belakang pengalaman duduk di DPRD kab/kota. Termasuk dalam pembelajaran mandiri tentang fungsi kedewanan:

*“Saya teramat merasakan, betapa lebih beruntungnya saya yang sudah pernah menjadi anggota dewan di kabupaten. Pengalaman tersebut menjadi sumber belajar berikutnya di provinsi. Pengalaman saya, tahun 1999 menjadi Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Tahun 2003 saya menjadi Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan. Kemudian tahun 2014 saya menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Dalam melakukan fungsi kedewanan, dalam pembelajaran mandiri, saya merasa lebih mudah karena*

*pengalaman yang saya miliki sebelumnya. Jadi ketika masuk Indrapura pertama kalinya, saya mudah belajar menyesuaikan karenapengalaman masa lalu”.*

Sedangkan sederet informan berikut ini belum pernah merasakan menjadi anggota DPRD. Di antaranya Gy, yang belum pernah sama sekali duduk menjadi anggota dewan baik di kabupaten/kota maupun di provinsi.

*“Saya rasa lebih bagus lagi jika memiliki pengalaman menjadi anggota dewan sebelumnya. Pengalaman ini sangat menjadi modal ketika menjadi anggota dewan. Meski pun saya belum pernah menjadi anggota dewan, pengalaman saya bergaul dengan elit politik di Jakarta, membantu juga tatkala saya masuk pertama kali menjadi anggota dewan”.*

Begitu pula dengan NS, RA, dan MZ. Ketiganya belum pernah menduduki anggota dewan dimanapun. NS yang menyelesaikan program S3 di Universitas Brawijaya Malang tahun 2009 dan dalam waktu dekat akan menyandang gelar profesor dari Universitas Brawijaya Malang ini, menuturkan:

*“Saya belum pernah menjabat sebagai anggota dewan. Namun bukan berarti saya kosong ketika pertama kali masuk Indrapura. Saya merasakan bahwa pengalaman itu adalah guru terbaik. Pengalaman memegang di keorganisasian maupun di partai politik, semuanya sangat mendukung dalam kiprah saya ketika menjadi anggota dewan pertama kalinya. Namun alangkah baiknya jika kita pernah duduk menjadi anggota dewan. Tentunya makin mudah dan cepat dalam pembelajaran mandiri fungsi kedewanan”.*

RA, sebagai wakil rakyat dari dapil VIII yang meliputi Kabupaten/Kota Madiun, Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, dan Jombang, menyatakan:

*“Saya belum pernah menjadi anggota DPRD. Oleh karenanya saya harus belajar banyak, baik secara formal maupun mandiri”.*

Sedangkan MZ, anggota komisi E bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi: ketenagakerjaan; pendidikan; ilmu pengetahuan dan teknologi; pemuda dan olahraga; agama; sosial; kebudayaan; kesehatan; keluarga berencana; pengembangan peranan perempuan; transmigrasi; penanganan bencana; serta arsip dan perpustakaan, menyatakan jika ia belum pernah juga menjadi anggota dewan.

*“Menjadi anggota dewan di DPRD Provinsi Jawa Timur ini yang pertama kalinya. Oleh karenanya saya harus lebih bekerja keras dalam pembelajaran mandiri terkait fungsi kedewanan”.*

HW dan RO juga belum pernah duduk sebagai wakil rakyat, baik di DPRD kabupaten/kota maupun di DPRD provinsi. HW, yang resmi maju sebagai anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I yang meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, mengaku belum pernah menjadi anggota dewan.

*“Sama sekali saya belum pernah menjadi anggota DPRD. Saya harus kerja ekstra untuk menyesuaikan diri terhadap fungsi dewan. Saya percaya, lebih mudah mereka yang pernah pengalaman menjadi anggota legislatif meski di tingkat kabupaten/kota sekali pun”.*

Begitu pun RO, anggota komis B bidang perekonomian; yang meliputi: perekonomian; perindustrian dan perdagangan; pertanian; perikanan; peternakan; perkebunan; kehutanan; pengadaan pangan dan logistik; koperasi, pengusaha kecil dan menengah; pariwisata dan ekonomi kreatif; pengelolaan potensi wilayah laut daerah, belum pernah juga menjadi wakil rakyat.

*“Saya tidak pernah menjadi anggota DPRD sebelumnya. Di Indrapura lah pertama kalinya. Saya wajib melakukan pembelajaran mandiri secara lebih konsern untuk menyesuaikan anggota dewan incumbent. Agar tak ketinggalan jauh”.*

Dari data studi kasus tersebut tampak bahwa pengalaman pembelajar sebagai anggota DPRD kabupaten sangat mendukung kelanjutan belajarnya secara mandiri terkait pelaksanaan tupoksinya di DPRD provinsi. Pengalaman tersebut dijadikan pengalaman berjenjang/berproses seperti menelusuri anak tangga yang di mulai dari level terbawah. Akan berbeda bagi pembelajar yang tidak memiliki pengalaman sebagai anggota dewan. Mereka harus bekerja keras dalam melakukan pembelajaran mandiri karena tidak memiliki sumber pengalaman. Bagi pembelajar yang berpengalaman menjadi anggota legislatif, pengalaman ini menjadi pendorong semangat tatkala harus melakukan pembelajaran mandiri dalam menghadapi berbagai persoalan tupoksinya di provinsi. Dalam melakukan pembelajaran mandiri terkait fungsi kedewanan,

lebih mudah yang memiliki pengalaman dari pada yang belum memiliki pengalaman sebelumnya.

Dari temuan tentang pengalaman unsur pernah menjadi anggota dewan di atas dikaitkan dengan kelanjutan belajar secara mandiri terhadap fungsi kedewanan, berpengaruh terhadap kemudahan belajar secara mandiri untuk meningkatkan kompetensi anggota dewan dalam melaksanakan tupoksinya. Thoha(2002) mengemukakan salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam pembelajaran mandiri untuk meningkatkan kompetensi anggota DPRD adalah belajar dari pengalaman para anggota dewan di masa lalu.

Berdasarkan hasil studi di atas, ditemukan beberapa kategori peranan pengalaman (*the role of the learner's experience*) kaitannya dengan pengalaman menjadi anggota dewan dalam pembelajaran mandiri yang dikelompokkan dalam kategori tabeldi bawah ini:

**Tabel 7**  
**Pengalaman Menjadi Anggota Dewan**

<b>No.</b>	<b>Peranan Pengalaman Menjadi Anggota Dewan dalam Pembelajaran Mandiri</b>
01.	Pengalaman sebagai anggota DPRD kabupaten/kota sangat mendukung anggota dewan untuk belajar secara mandiri terkait pelaksanaan tupoksinya di DPRD provinsi. Pengalaman tersebut dijadikan pengalaman berjenjang/ berproses seperti menelusuri anak tangga yang di mulai dari level terbawah.

No.	Peranan Pengalaman Menjadi Anggota Dewan dalam Pembelajaran Mandiri
02.	Bagi anggota legislatif yang yang tidak memiliki pengalaman sebagai anggota dewan sebelumnya, harus bekerja keras dalam melakukan pembelajaran mandiri karena tidak memiliki sumber pengalaman. Oleh karenanya pembelajar mandiri dari kategori ini harus memiliki semangat tinggi dalam pembelajaran mandiri untuk menghadapi ketertinggalan serta berbagai persoalan tupoksinya di provinsi.
03.	Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam pembelajaran mandiri untuk meningkatkan kompetensi anggota DPRD adalah belajar dari pengalaman pernah menjadi anggota dewan di masa lalu

### **B. Pengalaman Organisasi/Partai Politik**

Duduk sebagai anggota legislatif adalah garapan yang kental dengan nuansa politik. Hasil studi dari buku ini menyimpulkan bahwa pengalaman politik serta pengalaman berorganisasi mendukung kelancaran tugas dan fungsi dewan termasuk dalam melakukan belajar secara mandiri.

Berikut adalah beberapa hasil studi terhadap beberapa anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

Politisi AT, sampai hari ini masih aktif di organisasi Gerakan Pemuda Ansor (GPA) salah satu badan otonom yang induknya Nahdatul Ulama (NU) di Kabupaten Blitar. AT pun aktif di Ansor Jawa Timur sebagai Sekretaris Pimpinan Wilayah GPA Jatim. Di PKB, ia baru ikut di periode kepemimpinan Halim dari hasil konferensi beberapa waktu yang lalu. Ia sekarang duduk

sebagai salah satu wakil ketua dan masih setia dengan PKB. Pengalaman berorganisasi dan duduk di Parpol menurutnya sangat mendukung dalam berkarier di dunia parlemen dan dalam hal pembelajaran mandiri.

*“Pengalaman berorganisasi dan berpolitik tentunya sangat mendukung dalam kiprah saya menjadi anggota dewan. Pun sangat mendukung dalam pembelajaran mandiri. Karena pengalaman itu kan sesuatu yang tidak bisa dibeli dan bagian penting hidup kita untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Saya lebih gampang belajar secara mandiri karena dukungan pengalaman masa lalu tersebut”.*

Pengalaman selanjutnya disampaikan oleh Gy yang menyebutkan bahwa sejak tahun 2004, ketika Megawati Soekarno Putri terpilih menjadi presiden, Gy sudah mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut di Jakarta. Mulai 1996/1997 diasudah menjadi anggota partai dan aktif di DPP PDI P. Sejak lulus STM Bina Karya Pacitan, Gy merantau ke Jakarta hanya bermodalkan selembat ijazah STM untuk mencari pengalaman di PDIP. Ia pun pernah belajar banyak dengan Ruslan Abdul Gani Perdana Menteri Indonesia yang pertama. Juga pernah belajar dengan Supeni Menlu pertama Indonesia dan beberapa tokoh nasional sampai ke Akbar Tanjung. Merekalah yang menjadi mentor politiknya di tingkat nasional. Mulai tahun 2000 Gy sudah menjadi kader dan mulai penugasan-penugasan penting di partai. Di antaranya penelitian kepartaian dari Aceh sampai Papua. Termasuk kerjasama

kelembagaan di luar kepartaian dengan PBB, baik dengan WHO, Unicef, Unesco, dan FAO. Dia juga lebih dari 12 tahun menjadi bagian keluarga besar Ir. Soekarno terutama Megawati Soekarno Putri.

*“Pengalaman ini sangat menjadi modal ketika menjadi anggota dewan. Pengalaman saya bergaul dengan elit politik di Jakarta, yang satu sisi tidak saya dapatkan dari kampus. Proses belajar secara mandiri akan lebih gampang ketika kita sudah menyelami sendiri liku-liku dunia perpolitikan. Segala benturan di lapangan, problem solving, semuanya lebih mudah diatasi berdasarkan pengalaman. Pastinya itu juga proses belajar secara mandiri yang tidak di dapat dari text book saja”.*

Lain halnya dengan NS yang memiliki pengalaman sebagai sekretaris HKTI (Himpunan Kerukutan Tani Indonesia) Jawa Timur selama 10 tahun. Kemudian tahun 2011 masuk ke Partai Gerindra. Ia juga berpengalaman sebagai seorang dosen dan enterpreneur. Dari kombinasi bidang bisnis dan bidang sosial ini, ia menemukan titik-titik lemah dalam menghidupkan ekonomi. NS pertama kali belajar berorganisasi di partai tahun 1998. Ia merupakan deklarator-pendiri PAN di Jatim. Dari 1998-2005 NS adalah Wakil Ketua DPW PAN Jawa Timur.

*“Saya rasa pengalaman itu adalah guru terbaik. Begitupun pengalaman memegang di keorganisasian maupun di partai politik. Semuanya sangat mendukung dalam kiprah saya ketika masuk di gedung Indrapura ini. Pastinya ketika saya belajarsecara mandiri, secara langsung maupun tidak langsung itu mengikutinya dan ketemu”.*

Begitu juga dengan pengalaman MZ, meskipun politisi ini masih berumur belia, tapi soal pengalaman berorganisasi dan berpolitik tidak diragukan lagi. MZ waktu SMP pernah menjadi ketua OSIS dan ketika SMA wakil ketua OSIS. Saat di S1 pernah menjadi sekretaris PCI NU cabang Yaman. Karena dia pernah kuliah di Yaman meski tidak selesai, dan dilanjutkan di Sampang. MZ juga pernah menjadi ketua Robittoh di pesantren yang kemudian bergabung dengan Golkar pada tahun 2013 sebagai ketua penasihat Golkar Sampang. Kemudian pada tahun 2014 dia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di DPRD Jawa Timur. Tercatat bahwa MZ juga sebagai kader muda Golkar karena orang tuanya juga pengurus partai Golkar. Ayahnya anggota DPRD Jatim tahun 1997-1999. MZ kemudian diamanahi sebagai ketua DPD Golkar Sampang.

*“Yah, insya Allah semua pengalaman ini bisa dijadikan aset saya dalam melangkah sebagai anggota dewan. Dan menurut saya, pembelajaran mandiri dalam hal apa pun termasuk fungsi kedewanan saat ini, tidak terlepas dari pengalaman masa lalu. Insya Allah bisa lebih mudah karena hasil pengalaman masa lalu”.*

ZL belajar di PAN, mulai dari menjadi ketua ranting. Seterusnya menjadi ketua BM (Barisan Muda) PAN di Kabupaten Sidoarjo. Pernah pula menjadi wakil ketua DPD PAN. Juga sekretaris, lalu ketua BM PAN Jawa Timur.

*“Jujur, saya besar karena pengalaman. Pengalaman masa lalu dijadikan landasan buat waktu kini dan yang akan datang. Saya banyak memetik keuntungan dari pengalaman masa lalu berorganisasi dan berpolitik.*

*Pastinya kehadiran saya saat ini berkat pengalaman masa lalu. Keunggulan tersebut salah satunya dalam pembelajaran mandiri. Terus terang saya banyak dituntun dari pengalaman”.*

Politisi PKS, HW juga tak kalah banyak soal pengalaman masa lalu di bidang keorganisasian dan kepolitikan. Karena ia pernah menjadi ketua umum media siswa SMAN V Surabaya, Ketua Umum DPD PKS Kabupaten Blitar tahun 1999, Ketua Wilayah Dakwah yang meliputi Malang Raya, Kabupaten/Kota Probolinggo, Kabupaten/Kota Pasuruan, dan Kabupaten/Kota Mojokerto. Lalu setelah itu menjadi Ketua Dakwah wilayah Surabaya-Sidoarjo. Kemudian Ketua Bidang Kesra DPD PKS Jawa Timur, dan terakhir Ketua Umum DPW PKS Jawa Timur periode 2010-2015, dimana salah satunya dia bertanggungjawab terhadap kinerja fraksi PKS, yang ada di DPRD Jawa Timur.

*“Saya rasa tak ada yang meragukan lagi jika pengalaman berorganisasi dan berpolitik sangat membantu tatkala kita langsung terjun di politik praktis ini. Pembelajaran mandiri tentang tupoksi kedewanan bagi saya lebih mudah dengan pengalaman ini. Ibarat botol yang belum terisi penuh, maka saat ini kita tinggal memenuhinya saja dengan belajar secara mandiri”.*

Pengalaman RO berorganisasi dirasakan ketika ia ada di Nahdatul Ulama Kabupaten Lumajang, Partai Persatuan Pembangunan, lembaga perekonomian NU. Tahun 2017 RO dipilih sebagai ketua APTR (Asosiasi Petani Tebu Rakyat) Lumajang.

*“Pengalaman ini pastinya membantu dalam menjalankan ketiga fungsi dewan, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Termasuk dalam pembelajaran mandiri sebagai anggota dewan”.*

Pengalaman organisasi MS, diawali menjadi Ketua Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama tahun 1978 sampai dengan tahun 1981. Kemudian tahun 1993 terpilih sebagai ketua PC GP Anshor Kabupaten Pasuruan. Pasca jadi Ketua PC GP Anshor Kabupaten Pasuruan, lalu meningkat menjadi Wakil Ketua PW GP Anshor Jawa Timur. Bersamaan dengan itu dia diangkat menjadi Sekretaris PC NU Kabupaten Pasuruan. Tahun 1998 dipilih sebagai Ketua DPC PKB Kabupataen Pasuruan. Sekarang dipartai politik sebagai Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur, dan Ketua Bapilu.

*“Nah, banyaklah organisasi yang saya tekuni baik itu di kabupaten maupun di provinsi. Semuanya itu menjadikan sekolah non-formal saya dalam menapaki hidup dan kehidupan. Termasuk dalam hal pembelajaran mandiri dan duduk sebagai legislatif”.*

Begitu pun RA, menyepakati jika pengalaman tergabung pada partai politik maupun keorganisasian sangat mendukung kiprahnya menjadi anggota dewan.

*“Saya rasa pengalaman di Parpol maupun keorganisasian yang lain teramat sangat membantu menjadi politisi di gedung dewan”.*

Dari hasil studi tersebut tampak bahwa unsur pengalaman berorganisasi dan berpolitik sangat membantu

dalam proses pembelajaran mandiri ketika melaksanakan tupoksi kedewanan. Pengalaman berpolitik merupakan guru terbaik yang menjadi modal/aset ketika menjadi anggota dewan. Menurut mereka, hal ini tidak didapatkannya ketika belajar di kampus (pendidikan formal). Dan menjadi proses belajar secara mandiri yang tidak di dapat dari *text book* saja. Segala benturan di lapangan, *problem solving*, semuanya lebih mudah diatasi berdasarkan pengalaman berpolitik dan berorganisasi. Belajar secara mandiri juga banyak dituntun dari pengalaman. Ibarat botol yang belum terisi penuh, maka tinggal memenuhinya saja dengan belajar secara mandiri dan menjadikan sebagai sekolah non-formal dalam menapaki hidup dan kehidupan anggota dewan. Dan pengalaman itu sesuatu yang tidak bisa dibeli serta bagian penting hidup dan kehidupan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang .

Berdasarkan hasil studi di atas, ditemukan beberapa kategori peranan pengalaman (*the role of the learner's experience*) dalam kaitannya dengan belajar mandiri pada unsur pengalaman berorganisasi dan berpolitik yang dikelompokkan dalam kategori tabel di bawah ini:

**Tabel 8**  
**Pengalaman Berorganisasi dan Berpolitik**

<b>No.</b>	<b>Peranan Pengalaman Berorganisasi dan Berpolitik dalam Pembelajaran Mandiri</b>
01.	Pengalaman berorganisasi dan berpolitik sangat membantu dalam kelancaran proses pembelajaran mandiri ketika melaksanakan tupoksi kedewanan.

No.	Peranan Pengalaman Berorganisasi dan Berpolitik dalam Pembelajaran Mandiri
02.	Pengalaman berpolitik dan berorganisasi merupakan guru terbaik yang menjadi modal/aset ketika menjadi anggota dewan dan ketika melakukan pembelajaran mandiri
03.	Pengalaman berpolitik dan berorganisasi tidak didapatkannya ketika belajar di kampus (pendidikan formal). Dan menjadi proses belajar secara mandiri yang tidak didapat dari <i>text book</i> saja.
04.	Segala benturan di lapangan, <i>problem solving</i> , semuanya lebih mudah diatasi berdasarkan pengalaman berpolitik dan berorganisasi.
05.	Belajar secara mandiri banyak dituntun dari pengalaman. Ibarat botol yang belum terisi penuh, maka tinggal memenuhinya saja dengan belajar secara mandiri dan menjadikan sebagai sekolah non-formal dalam menapaki hidup dan kehidupan anggota dewan
06.	Pengalaman berorganisasi dan berpolitik sesuatu yang tidak bisa dibeli serta bagian penting hidup masa sekarang dan masa yang akan datang .

### C. Pengalaman Pendidikan Formal

Ketika seseorang memilih pendidikan formal, kemudian berhenti pada satu titik tertentu karena pendidikan formal dibatasi kesempatan dan waktu, atau dia tidak diperkenankan untuk memperoleh pendidikan formal karena usia, atau putus pendidikan formal (*drop out*), dan karena berbagai hal sehingga seseorang tidak memiliki kesempatan untuk mengikutinya, maka pada saat itulah pendidikan informal dan nonformal dibutuhkan untuk melayaninya (*subtitute*). Ketika seseorang tidak cocok dengan pendidikan formal atau ada beberapa materi yang tidak

diperoleh melalui pendidikan formal dia akan mendapat tambahan secara bebas melalui pendidikan nonformal atau informal (*supplementary*). Atau ketika pendidikan formalnya yang sudah diselesaikannya baik tingkat sarjana, maupun pascasarjana, namun belum memberikan jawaban atau penyelesaian terhadap pemecahan masalah yang dihadapi, maka jalur pendidikan non- formal dan informal ditempuhnya, termasuk belajar secara mandiri.

Secara mendasar, pendidikan formal, informal, dan nonformal sebagai sebuah konsep pendidikan dalam rangka pendidikan sepanjang hayat dan belajar sepanjang hayat, memiliki berbagai ragam program sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat masa kini maupun masa depan. Masyarakat tidak akan berkembang pengetahuan dan keterampilannya apabila hanya mengandalkan pendidikan formal. Oleh karena itu, kebutuhan akan layanan pendidikan informal dan nonformal sangat dirasakan dalam menunjang kehidupan masyarakat terutama dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Sehingga variasi layanan program pendidikan nonformal yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat merupakan sebuah wujud dari *life long education*.

Seluruh informan sepakat jika jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh sangat membantu dalam melanjutkan dalam meningkatkan kompetensi diri berikutnya

melalui belajar secara mandiri. Berikut beberapa hasil studi terhadap beberapa anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

MS mengenyam pendidikan formalnya di MI/SD NU Bangilan (1967), SMPN I Pasuruan (1970), dan SMEA PGRI Pasuruan (1973). Menjadi sarjana hukum Unmer Malang pada tahun 1986, dan menyelesaikan pascasarjana tahun 2002 jurusan PPS MAP Unmer Malang. Namun ia juga meyakini jika pendidikan nonformal maupun informal seperti pembelajaran mandiri sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi jika seseorang ingin memiliki kompetensi.

*“Karena saya berlatar belakang hukum, dan berlatarbelakang seorang pengacara, maka match dengan tugas saya sebagai anggota Komisi A. Karena di Komisi A itu lebih banyak pada tupoksinya hukum dan pemerintahan serta hak-hak azazi manusia. Sehingga pendidikan formal sebelumnya sebagai pengalaman yang sangat membantu tugas pokok yang saya miliki. Latar belakang kuliah sangat mendukung sekali termasuk pengalaman menjadi advokat. Karena di advokat itu, semua masalah dicarikan landasan hukumnya. Sama juga di dewan ketika membahas sesuatu, yang pertama kali dicari landasan hukumnya.*

*Namun tentunya saya tidak berhenti belajar setelah pendidikan formal saya selesai. Karena belajar adalah usaha semur hidup. Life long learning. Belajar setelah lulus dari pendidikan formal ya namanya pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri inilah yang disebut belajar sepanjang hayat”.*

Gy yang hanya lulusan STM Bina Karya Pacitan, tidak putus harapan untuk menggapai gelar kesarjanaannya. Gy sekarang kuliah di lima universitas sekaligus di Jakarta. Gy

menempuh pendidikan sekolah dasarnya di SDN Karanganyar Pacitan, serta pendidikan menengah pertamanya di SMPN Kebonagung Pacitan. Namun Gy punya alasan tersendiri kaitannya dia lebih memilih dulu terjun ke lapangan langsung dari pada melanjutkan studinya di bangku perguruan tinggi setelah menyelesaikan pendidikan sekolah kejuruan tingkat atasnya.

*“Meskipun saya lulusan SLTA, tapi saya sekarang kuliah di lima universitas di Jakarta. Itu artinya saya tahu jika pendidikan formal itu juga penting. Sebetulnya tujuan saya kuliah adalah penambah suplemen saja kaitannya dengan tupoksi saya di dewan. Karena menurut saya pendidikan di Indonesia ini masih sangat positivisme dan tidak aplikatif. Beda dengan di Eropa atau Amerika yang lebih banyak di lapangan dari pada di kampus proses pembelajarannya. Jadi pembelajaran mandiri melalui lapangan, sangat, sangat bermanfaat dilakukan secara autodidak”.*

Sempat tidak selesai sekolah strata satunya di Yaman karena terbentur masalah keluarga, MZ tak putus asa untuk melanjutkan kuliahnya di IAIN. Setelah sarjana, Ia pun melanjutkan strata duanya di pascasarjana Universitas Airlangga. Masa kecilnya merampungkan pendidikannya di SDN Prajian I lulus tahun 1997. Dan alumnus SLTPN I Lasem tahun 2000 serta MATribakti Kediri 2003.

*“Pendidikan formal menurut saya sangat penting sebagai bekal dasar menjadi anggota dewan dalam melaksanakan tugas-tugas dewan. Pendidikan formal yang saya dapat di Yaman, di Sampang, di IAIN maupun di Unair itu sangat membantu tugas-tugas saya di sini. Namun, saya rasa pendidikan non-formal pun tidak kalah pentingnya untuk*

*melengkapi kebutuhan kita dalam belajar. Karena belajar itu mesti dilakukan kita sepanjang hidup kita. Tak kenal bataslah. Apalagi pembelajaran mandiri”.*

Secara pendidikan formal, HW lulusan SD Bhayangkara Surabaya (1981), SMP N I Surabaya (1984), SMAN V Surabaya (1987), sarjana FKH Unair (1996), dan master pada Program MM Unair Surabaya. Namun ia tidak mengandalkan sepenuhnya kepada kompetensi di jalur pendidikan formal ini. Ia selalu memperkaya diri dengan menambah pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan non-formal dengan pembelajaran mandiri baik sebelum, ketika masuk menjadi anggota dewan, maupun kelanjutannya.

*“Begitu resmi ditetapkan sebagai salah satu wakil rakyat yang mewakili dapil satu, saya langsung belajar dari beberapa sumber. Yang pertama dari politisi senior yang sudah malang melintang di DPR RI, kemudian membeli dan membaca buku-buku yang terkait dengan dunia politik, khususnya kedewanan. Dan yang ketiga, memelajari laporan-laporan baik dari eksekutif, maupun pandangan umum daripada fraksi, dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Nah itu yang saya lakukan, sampai kemudian ada bimbingan teknis bagi seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur pada awal kami mendapatkan amanah. Saya pikir itu juga sangat membantu kami untuk melakukan tugas pokok dan fungsi kami sebagai anggota DPRD Jawa Timur”.*

AT, seorang politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kelahiran Tulungagung, 31 januari 1974. Pria bertumbuh gagah ini, sarjana ilmu Syariah IKAHA Tebuireng Jombang dan

Magister Hukum Universitas Islam Malang serta berencana mengambil program doktor di bidang Hukum Islam.

*“Meskipun jalur pendidikan formal itu penting, namun tak kalah pentingnya juga adalah meningkatkan kompetensi diri melalui jalur pendidikan non formal seperti pembelajaran mandiri”.*

Begitu pun NS dan RA menyepakati jika jenjang pendidikan formal dan pendidikan non formal sangat membantu dalam melanjutkan meningkatkan kompetensi diri berikutnya, yaitu melalui belajar secara mandiri.

NS, anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) ini yang juga duduk sebagai anggota komisi B bidang perekonomian, menyelesaikan S3 nya di Universitas Brawijaya Malang tahun 2009. Jenjang pendidikan formalnya di mulai dari Kota Boyolali dengan menyelesaikan SD, SMP, dan SPG. Setelah itu hijrah ke Surabaya untuk melanjutkan studi strata satunya di jurusan Agronomi Fakultas Pertanian (1999) Universitas Putra Bangsa Surabaya dan Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen STIE Yapan Surabaya. Lalu meneruskan S2 nya di Magister Manajemen Universitas Narotama Surabaya. Dalam waktu dekat, ia akan menyanggah gelar profesor dari Universitas Brawijaya Malang.

*“Pendidikan formal adalah modal dasar. Tentu saja pengembangannya melalui pendidikan nonformal”.*

RA, lulusan S2 Universitas Airlangga dan sarjana hukumnya ditempuh di Universitas Surabaya (1999) menegaskan bahwa:

*“Peningkatan dan pengembangan diri harus dilakukan melalui pendidikan non formal seperti pembelajaran mandiri. Dasarnya adalah jenjang pendidikan formal”.*

ZL, kelahiran Sidoarjo 05 September 1976 yang juga anggota Badan Musyawarah (Banmus), menempuh pendidikan formalnya di SDN Sekardangan (1989), SMPN I Sidoarjo (1992), SMAN I Sidoarjo (1995), dan sarjana STIE YAPAN Surabaya (2012).

*“Saya rasa untuk melakukan tupoksi kedewanan, dibutuhkan pencarian yang setiap saat untuk melengkapi kapasitas kita. Salah satunya adalah melalui pembelajaran mandiri. Selalu up grade dan up date. Tidak bisa hanya mengandalkan jalur pendidikan formal”.*

RO, pria berkulit putih kelahiran Lumajang 01 Februari 1963 ini adalah sarjana (1989) dan pascasarjananya (2003) diraih dari Universitas Malang. Menamatkan pendidikan dasarnya dan menengahnya di SDN Randuagung (1977), SMPN Muhammadiyah Klakah (1981), dan SMA Islam Lumajang (1984). RO menegaskan bahwa:

*“Pastinya fondasi utamanya adalah pendidikan formal. Tapi pengembangannya ya melalui jalur pendidikan non formal, seperti pembelajaran mandiri untuk meningkatkan kapasitas diri”.*

Dari data hasil studi tersebut tampak bahwa peranan pengalaman pembelajar yang telah memiliki jenjang pendidikan formal mendukung informan dalam melakukan pembelajaran mandiri untuk meningkatkan kompetensi diri terkait tugas

kedewanan dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dari temuan tentang pengalaman unsur pendidikan formal di atas, berpengaruh terhadap kemudahan kelanjutan belajar secara mandiri untuk meningkatkan kompetensi anggota dewan dalam melaksanakan tupoksinya. Menurut Thoha (2002) salah satu faktor yang berpengaruh pada kompetensi anggota DPRD adalah kualitas pendidikan dan pengalaman para anggota dewan di masa lalu.

Jika dihubungkan dengan basis orientasi teori pembelajaran, asumsi pengalaman hidup (*the role of the learner's experience*) ini masuk pada teori pembelajaran aliran *constructivism* dengan tokoh-tokoh pada teori ini adalah; Candy, Dewey, Lave, Piaget, Rogoff, Von Glaserfeld, dan Vygotsky. Sebagai suatu yang kontroversial, terutama dalam versi yang lebih radikal, konstruktivisme muncul sebagai perspektif yang berguna untuk beberapa situasi pembelajaran orang dewasa (Wiswell dan Ward 1987). Aliran konstruktivisme menekankan bahwa semua pengetahuan terikat pada konteks dan para individu membuat makna pribadi dari pengalaman belajar mereka.

Dengan demikian pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari konteks dimana ia digunakan. Selain itu mereka juga menekankan sifat kumulatif dari belajar yaitu bahwa informasi baru, harus dikaitkan dengan informasi lain yang sudah ada,

agar peserta didik dapat mempertahankannya atau memanfaatkannya. Untuk orang dewasa, pengalaman mungkin dapat dikonseptualisasikan sebagai upaya menciptakan corong raksasa pengetahuan sebelumnya, dimana informasi yang baru masuk ke bagian atas corong mengalir ke bawah dan akhirnya jatuh keluar, kecuali “tongkat” yang menggambarkan beberapa unsur pengetahuan sebelumnya. Peran fasilitator di sini adalah untuk membantu peserta didik membuat makna terhadap informasi yang baru.

Dalam kaitannya dengan proses pembelajaran, aliran ini melihat bahwa pembelajaran itu merupakan konstruksi makna dan pengalaman. Sedangkan cakupan dari pembelajaran ini adalah konstruksi realitas internal oleh individu. Sedangkan manifestasi dalam pembelajaran orang dewasa adalah *experiential learning*, pembelajaran yang diarahkan pada diri sendiri, transformasi perspektif, dan praktik reflektif.

Temuan ini sejalan dengan uraian (Knowless, 1977, Unesco, 1988, Kamil, 2001, Saraka, 2001), dalam belajar orang dewasa lebih mengacu pada tugas atau masalah kehidupan (*task or problem oriented*), sehingga orang dewasa akan belajar mengorganisir pengalamannya.

Pengalaman sebagai bekal proses pembelajaran mandiri anggota dewan ini juga selaras dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan informal yang tertuang pada pasal 27 UU No. 20 tahun 2003 dan juga pasal 116 PP No. 17 tahun 2010.

Pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Ciri dari pendidikan informal adalah: tempat pembelajaran bisa dimana saja, tidak ada persyaratan, tidak berjenjang, tidak ada program yang direncanakan secara formal, tidak ada materi tertentu yang harus tersaji secara formal, tidak ada ujian, dan tidak ada lembaga sebagai penyelenggara.

Berdasarkan hasil studi di atas, ditemukan beberapa kategori peranan pengalaman (*the role of the learner's experience*) kaitannya dengan pengalaman menempuh pendidikan formal dalam pembelajaran mandiri yang dikelompokkan dalam kategori tabel di bawah ini:

**Tabel 9**  
**Pengalaman Pendidikan Formal**

No.	Peranan Pengalaman Pendidikan Formal dalam Pembelajaran Mandiri
01.	Peranan pengalaman anggota dewan yang telah memiliki jenjang pendidikan formal mendukung dalam melakukan pembelajaran mandiri untuk meningkatkan kompetensi diri terkait tugas kedewanan dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
02.	Pembelajaran mandiri tidak dapat dipisahkan dari konteks dimana ia digunakan. Sifat kumulatif dari pembelajaran mandiri yaitu bahwa informasi baru, harus dikaitkan dengan informasi lain yang sudah ada, agar pembelajar dapat mempertahankannya atau memanfaatkannya.
03.	Pembelajaran itu merupakan konstruksi makna dan pengalaman. Sedangkan cakupan dari pembelajaran ini adalah konstruksi realitas internal oleh individu.

04.	Dalam belajar, orang dewasa lebih mengacu pada tugas atau masalah kehidupan ( <i>task or problem oriented</i> ), sehingga orang dewasa akan belajar mengorganisir pengalaman hidupnya, termasuk pengalaman pendidikan formalnya yang dimiliki.
-----	--

#### **D. Kesiapan Belajar (*Readiness to Learn*) untuk Meng-*upgrade* dan Meng-*up date* Diri**

Kaitannya dengan kesiapan belajar secara mandiri, tentu tan setiap saat anggota dewan meng-*up grade* dan meng-*up date* diri untuk menghadapi peranan dan fungsi sosialnya, karena ilmu pengetahuan berkembang terus dan tantangan yang dihadapi pun kian hari kian bertambah. Dari hasil studi ditemukan bahwa meng-*up grade* dan meng-*up date* diri dalam pembelajaran mandiri bagian dari kebutuhan hidup yang tidak dapat dihindari seseorang yang duduk sebagai anggota legislatif untuk meningkatkan kompetensinya. Berikut diuraikan beberapa hasil studi terkait dengan faktor kesiapan meng-*up grade* dan meng-*up dated* diri pada anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

Gy secara khusus menjelaskan bahwa caranya ia meng-*up grade* dan meng-*up date* dirinya dengan membaca dan membuat jaringan kerja dengan pihak manapun.

*“Saya selalu meng-*up grade* dan meng-*up date* diri dengan membaca. Saya juga membangun sebuah pertemanan dan kekeluargaan dengan teman-teman kepolisian, media, Mbah Kyai. Saya masih belajar dan membuka diri untuk semuanya. Itu penting. Konstituen saya juga merupakan guru-guru yang tidak bisa dilupakan”.*

Begitu pun dengan NS. Ia merasa banyak kekurangannya. Dengan meng-up grade dan meng-up date diri, itu sama dengan *personality*-nya merasa banyak kekurangan dan harus selalu diperbarui.

*“Saya tidak pernah merasa hebat. Saya terus harus belajar. Terus update dan up grade diri untuk meningkatkan kompetensi”.*

RO menyatakan bahwa meng-up grade dan meng-up date diri adalah sesuatu yang harus dilakukan setiap saat.

*“Jika kita tidak ingin tertinggal ya harus selalumeng-up grade dan meng-up date diri. Banyak temuan baru yang akan kita dapatkan. Dan kita menjadi selalu haus ilmu”.*

Jika RA meng-up grade dan meng-up date diri, di antaranya ketika ia berkumpul bersama dalam satu fraksi dan satu komisi.

*“Nah setiap seperti ini, akan paripurna, kita pasti berkumpul sama teman Demokrat. Setelah paripurna, kita berkumpul sama temen-temen yang ada di komisi. Jadi terus up date dan up grade”.*

Begitu pun AT sama dengan yang dilakukan RA dalam meng-up grade dan meng-up date dirinya.

*“Ketika saya berkumpul dengan kawan-kawan fraksi, sadar atau tidak sadar sudah melakukan up grade dan up date diri”.*

Meng-up grade dan meng-up date diri bagi MZ, bisa saja dilakukan ketika mengerjakan tupoksinya langsung.

*“Saya pikir apa yang sudah saya jalani sekarang ini dalam rangka up date dan up grade diri tugas kedewanan. Meski dibilang sempurna juga belum, tapi saya sudah berproses ke arah sana. Saya membaca, mendengarkan, meresume dari apa yang dibaca gubernur dalam setiap paripurna”.*

Sedangkan ZL menjelaskan lebih detail lagi seputar meng-*up grade* dan meng-*up date* diri. Menurutnya jika tidak mau meng-*up-date* dan meng-*up grade* diri berarti akan semakin lemah. Lemah secara personal dan lemah secara keilmuan. Juga fungsi kedewanan akan semakin lemah. Terkait dengan tupoksi kedewanan, penting selalu untuk meng-*up date* dan meng-*up grade* diri. Prinsipnya selalu memberi ruang kosong pada diri individu. Belajar itu kapan saja, dimana saja, dan soal apa pun apalagi terkait dengan tupoksi. Ini bagian amanah yang harus dijalankan. Bagian tanggung jawab yang harus dilakukan. Oleh karena itu merupakan kewajiban untuk terus meng-*up date* dan meng-*up grade* diri secara personal.

*“Kita harus membangun kemandirian secara personal. Kemandirian secara ekonomi, kemandirian secara ideologi, tapi dengan prinsip-prinsip yang sudah kita mulai dari awal. Setelah itu kita bicara tentang kemandirian berbagai informasi, meng-*up grade* diri kita. Agar lebih punya kompetensi. Perkara up date diri, berkaitan dengan beberapa tupoksi kita, soal perkembangan regulasi dan lain sebagainya, sekarang kan eranya internet, media daring. Laman dari Depdagri selalu saya up date soal regulasi dan lain sebagainya. Berkaitan dengan itu semua saya pikir tidak ada persoalan, dari awal sudah ada keinginan terus belajar, jika kita tidak meng-update diri kita, saya pikir, ini akan mengganggu terkait dengan tugas pokok dan fungsi kita. Jika kita tidak mau meng-*up-date**

*berarti kita semakin lemah. Lemah secara personal dan lemah secara keilmuan. Dan saya fikir fungsi kita akan semakin lemah. Terkait dengan tupoksi, penting kita selalu meng-up date. Prinsipnya kita selalu memberi ruang kosong pada diri kita. Belajar itu kapan saja, dimana saja, soal apa pun apalagi terkait dengan tupoksi kita. Ini adalah bagian amanah yang harus kita jalankan. Bagian tanggung jawab yang harus kita lakukan, maka itu merupakan kewajiban bagi kita untuk terus meng up date diri kita secara personal”.*

Banyak jalan untuk melakukan *up grade* dan *up date* diri. Hampir sama dengan ZL, menurut HW cara yang jitu salah satunya dengan mengunduh dari media daring. Dari situ lah ia memelajari segala sesuatu tentang informasi yang dibutuhkan.

*“Untuk yang up date sifatnya itu saya melalui media daring. Misalnya sederhananya tentang keluhan jalan rusak di seluruh Jawa ini kan luar biasa. Pertanyaannya adalah apa sih yang paling menyebabkan rusaknya jalan. Nah itu kita tidak bisa manggil TA atau staf ahli. Karena kita tidak punya. Mau menghubungi teman di ITS, menghubungi professor, menghubungi doktor, juga ewuh pakewuh (sungkan, red). Ya akhirnya ke gawai ini, di daring kita banyak literasi ilmiah. Di sini mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, ada semuanya. Sehingga itu yang membantu saya”.*

Hampir sama apa yang diupayakan ZL dan HW dalam meng-*up grade* dan meng-*up date* diri. MS pun menggunakan kemajuan teknologi dalam pencarian data melalui *smarphone*. Selain itu MS pun rajin membaca regulasi dan berdiskusi dengan sesama anggota Nasdem.

Untuk meng *up grade*—meng *up date* diri kita maka mutlak satu, kita harus membaca aturan. Yang kedua kita bertanya pada *google*. Ketika kita tidak memahami sesuatu, maka *google* lah yang paling cepat. Seluruh persoalan kita tanyakan ke sana untuk memahami persoalan. Dan insya Allah, itu yang paling akurat. Nah sekarang juga banyak informasi dari WA yang banyak membantu orang untuk *up grade* diri. Nah kemudian kami di internal Nasdem selalu *up-grade* kemampuan itu dalam hal tertentu misalnya menjelang penyusunan APBD, kita mesti akan undang seluruh anggota DPRD untuk diberikan pemahaman tentang bagaimana menyusun APBD.

Dari data hasil studi tersebut tampak bahwa kesiapan belajar (*readiness to learn*) untuk meng-*up grade* dan meng-*up date* diri sebagai anggota dewan sangat diperlukan dalam belajar secara mandiri. Karena kegiatan meng-*up grade* dan meng-*up date* adalah sebuah tuntutan dalam pengembangan kapasitas dalam menghadapi tupoksinya. Berbagai cara yang dilakukan anggota dewan dilakukan dalam meng-*up grade* dan meng-*up date* diri, di antaranya dengan membaca, mendengarkan, dan meresume, membuat jaringan kerja dengan pihak manapun, membangun sebuah pertemanan dan kekeluargaan dengan teman-teman kepolisian, media, tokoh masyarakat, diskusi ketika kumpul bersama dalam satu fraksi dan satu komisi, membuka internet, media daring, *laman* melalui *smarphone*. Meng-*up grade* – meng-*up date* diri mutlak dalam membaca aturan. Meng-*up grade* dan

meng-up date diri, bisa saja dilakukan ketika sedang mengerjakan tupoksinya. Menurut informan, jika tidak mau *up grade* – meng-up date berarti akan semakin lemah. Lemah secara personal dan lemah secara keilmuan juga fungsi kedewanan akan semakin lemah. Dan tidak pernah merasa hebat serta terus harus belajar. Prinsipnya selalu memberi ruang koso- ng pada diri individu. Belajar itu kapan saja, dimana saja, soal apa pun, apalagi terkait dengan tupoksi.

Berdasarkan hasil studi di atas, ditemukan beberapa kategori kesiapan belajar (*readiness to learn*) untuk meng-up grade dan meng-up date diri anggota legislatif terhadap ap kegiatan pembelajaran mandiri, yang dikelompokkan dalam kategoritabel di bawah ini:

**Tabel 10**  
**Meng-up Grade dan Meng-up Date Diri**

No.	Cara meng-up grade dan meng-up date diri
01.	Membuat jaringan kerja dengan pihak manapun dan membangun sebuah pertemanan serta kekeluargaan dian- taranya; dengan sesama fraksi, komisi, birokrasi, kepoli- sian, media, tokoh masyarakat, lembaga atau organisasi masyarakat yang lainnya.
02.	Mengakses informasi melalui berbagai media; internet, media sosial, media televisi dan radio, koran, majalah, jurnal dan lain sebagainya.
03.	Membaca, mendengarkan, dan meresume informasi yang terkait dengan tugas kedewanan.
04.	Diskusi dengan pihak manapun baik yang bersifat formal maupun non formal.
05.	Diklat di dalam maupun luar negeri.





# BAB V

## SUMBER DAN ORIENTASI BELAJAR

### **A. Sumber Belajar**

Dalam pembelajaran mandiri, proses mendapatkan informasi dari sumber belajar memiliki sumber yang berbeda-beda. Lalu dari manakah sumber belajar para anggota dewan dalam mencari pengetahuan dan keterampilan soal tupoksinya dan perpolitikannya? Berikut beberapa penuturan hasil studi terhad- ap anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

AT yang duduk sebagai anggota komisi A, merasa tidak malu belajar dari senior-seniornya. Justru ia merasa beruntung dalam posisinya sebagai politisi yang paling muda di komisi A. Dia juga menimba ilmu dari berbagai sumber belajar.

*“Saya duduk di komisi A kumpul bersama teman-teman yang hebat. Ada Bambang DH mantan walikota Surabaya dan banyak doktor-doktor yang luar biasa atau yang sekarang sedang menempuh program doktor yang bisa untuk sharring menimba ilmu sebagai sumber belajar saya dan saya banyak belajar dari beliau-beliau. Kebetulan saya yang paling muda di komisi A, sehingga beliau-beliau membuka peluang untuk saya menggali ilmu lebih banyak*

*lagi. Sumber belajar lainnya adalah dari Bintek maupun yang lain, Diklat di dalam maupun luar negeri, termasuk juga bertanya pada staf ahli baik di fraksi maupun komisi. Staf ahli di sini juga dari berbagai bidang. Saya juga memiliki 4 staf ahli pribadi dan memiliki kemitraan dengan dosen dari berbagai perguruan tinggi sebagai sumber belajar saya”.*

RA pun menyetujui pernyataannya AT, kaitannya dengan sumber belajar dari pendahulunya.

*“Harus banyak melihat, mendengar, dan meluangkan waktu untuk belajar kepada yang senior itu tadi”.*

RO pun senada dengan RA dan AT.

*“Sumber belajar saya macam-macam. Dari akademisi, juga dari orang yang berpengalaman di kedewanan sudah tiga periode. Saya banyak belajar dari beberapa hal dan informasi. Salah satunya juga belajar dari kasus-kasus yang datang dari konstituen”.*

Gy merasa beruntung mengawali karier politiknya langsung di Jakarta dan mencari sumber belajarnya langsung ke ahlinya. Sehingga banyak dijumpai tokoh politik ternama baik di partainya maupun lintas partai sebagai mentor politiknya sekaligus sumber belajarnya.

*“Saya banyak belajar dari senior-senior politisi PDI P di DPR RI. Ada Guruh Soekarno Putra, ada Puan Maharani, Pramono Anung, Jarot Syaifu Hidayat yang sekarang Wagub DKI, dan Mendagri Cahyo Kumolo. Juga dari seluruh buku apa pun. Dan dari nara sumber manapun tatkala itu menjadi kebaikan. Senior internal di tingkat provinsi, ada Kusnadi, Sirmaji, Bambang DH, ada teman kabupaten yang sekarang naik di provinsi yakni Sri Untari. Jika dari Fraksi yang lain di DPRD provinsi, saya belajar dari*

*Sahat Simanjuntak dari Golkar, Malik Effendi dari PAN, Sutjipto Sekretaris Fraksi Gerindra. Dari tokoh lokal di Pacitan yang cukup belajar dari Ketua PW NU Pacitan, kepala-kepala sekolah yang ada, ada bupati dan wakilnya, ada mentor saya Ir. Budi Sulistiono. Dari eksekutif di provinsi sumber belajar saya dengan Pakde Karwo, ada Noer Yatno, dan ada temen-temen dari SKPD. Sumber belajar lainnya adalah tatkala kita sedang mengatasi kasus di masyarakat. Contohnya ketika mena-ngani kasus Salim Kancil penambang pasir di Lumajang. Saya menjadi anggota Pansus itu. Dari kasus itu bisa dijadikan sumber belajar. Saya pernah belajar banyak dengan Ruslan Abdul Gani- Perdana Menteri Indonesia yang pertama. Saya pernah belajar dengan Supeni Menlu pertama Indonesia dan beberapa tokoh nasional sampai ke Akbar Tanjung. Dan beliau-beliau lah yang menjadi mentor-mentor politik saya di tingkat nasional” .*

Sepertinya halnya Gy, NS mengamini bahwa: *“Kasus pun dapat dijadikan sumber belajar”*.

MZ merasa beruntung partainya membuat kaderisasi yang baik. Sehingga para kader muda dapat bimbingan langsung dari para seniornya. MZ pun memanfaatkan literatur dan perpustakaan sebagai sumber belajar. Termasuk para staf ahli dan staf pribadinya.

*“Belajar dari mana saja kah tentang kefungsian dewan? Secara fungsi kan dewan hari ini dengan dewan masa lalu kan sudah sangat berbeda juga. Ada pada tupoksinya, ada bagaimana mereka melakukan fungsi-fungsinya. Mungkin yang sama hanya dari sisi kualitas politik yang dihadapi. Tapi itu pun tidak sama persis karena pada masa lalu kualitas politiknya pada vertikal sedangkan masa kini kan horizontal. Jika di Golkar, kami di sini saling bahu membahu. Saya tidak bilang dalam rangka memosisikan*

*partai Golkar terbaik, tapi saya bilang kaderisasi di Golkar berjalan. Artinya saya di sini ada beberapa anak muda, di Golkar ini ada dua atau tiga anak muda, dan di fraksi ada saya dan satu anak muda, dan peran ketua fraksi dan juga senior yang membantu kami sangat luar biasa. Meskipun apa namanya, mungkin tidak sama pola pendidikannya. Tapi yang saya lihat mereka ada itikad untuk membuat saya berkembang. Karena mereka tahu, kader-kader muda inilah yang akan suatu hari akan menjalankan partai ini. Sumber belajar lainnya dari literatur yang sudah disediakan di kita. Perpustakaan disini tersedia 24 jam dan saya juga berinisiatif membayar staf sendiri untuk kemudian memberikan kepada saya informasi-informasi yang mungkin saya sendiri tidak sempat untuk menggalinya. Staf ahli juga berguna meskipun kedatangannya hanya sekedar temporal, tapi pada skala rapat fraksi saya melihat ada banyak terutama kematangan berpolitik dari pada staf ahli dan para senior. Itu yang bisa saya pandu dari sini”.*

Ada kesamaan MS dan MZ terkait sumber belajar, yaitu menggunakan jasa tenaga ahli di fraksinya dan belajar dari para seniornya seperti anggota dewan lainnya.

*“Sumber belajar bisa juga dari tenaga ahli di fraksi. Nah itu yang sering kita ajak diskusi untuk memberikan masukan. Di komisi saya, banyak orang yang berpengalaman. Meskipun mereka bukan incumbent sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, namun mereka masuk langsung tune in di komisi saya. Ada Bambang DH - mantan Walikota Surabaya, ada Ulum yang pernah menjadi Ketua DPRD di Jember, ada Tamim yang pernah menjadi anggota DPRD di Blitar, Hasbulloh pernah menjadi anggota DPRD di Malang, dan Islan pernah menjadi Ketua DPRD Blitar. Jika komisi saya semuanya sudah bagus-bagus”.*

Terkait sumber belajar, ZL pun sama dengan politisi yang lainnya, yaitu belajar kepada seniorinya. Juga dengan para akademisi dan eksekutif serta belajar dari konstituennya tentang segala persoalannya. Termasuk belajar kepada yang gagal politik. Lebih beruntung lagi ayahnya juga adalah mantan anggota dewan yang menurutnya dapat dijadikan *ngangsu kaweruh* (sumber belajar, red.).

*“Selalu saya sempatkan berkomunikasi dengan beliau-beliau para senior dan mereka-mereka para konstituen terkait beberapa persoalan di daerah sebagai sumber belajar saya. Karena dinamika masyarakat begitu berkembang. Kesempatan reses yang setahun tiga kali, kita hadir dan kita pergunakan untuk menampung segala aspirasi dan sebisa mungkin persoalan masyarakat guna ditemukan solusinya. Terkait dengan fungsi kedewanan, saya banyak belajar dan diskusi dari teman-teman akademisi, karena mereka yang punya kapasitas. Saya juga belajar fungsi anggaran dari kawan-kawan eksekutif. Bagaimana cara membaca proses RAPBD, karena bagaimanapun mereka sebenarnya lebih faham dari pada kita. Karena mereka sudah lama menggeluti bahkan bertahun-tahun. Justru belajar dari beliau-beliau lebih cepet. Kita sebagai legislator, pertama kita harus banyak belajar dan janganlah kita merasa paling bisa, paling hebat. Kita bisa belajar kepada siapa pun. Belajar kepada masyarakat, belajar kepada senior-senior, belajar pada politisi-politisi hebat, belajar kepada seseorang yang gagal politik, belajar kepada siapa pun dan tak pernah berhenti. Artinya belajar itu bisa dilakukan dimanapun. Ketika kita bertemu dengan orang, ada filosofinya di awal-awal kan gelas itu harus kita kosongi, kita harus banyak mendengar, jangan kita yang banyak bicara. Tatkala kita mendengar kita tahu keluhan, kelebihan, dan kekurangan. Di situlah kira kira letak kita belajar. Pada siapa pun, apa pun profesi*

*mereka. Kita harus banyak belajar. Jujur, saya ini paling cepet jika belajarnya dari eksekutif. Saya tidak merasa malu belajar dengan mereka. Saya juga belajar dari politisi senior PAN, soal komunikasi politik, soal membangun resource jaringannya, karena bagaimanapun politik ini adalah seni, dalam memberi manfaat dalam perjalanan hidup ini. Bisa meng up grade diri saya secara pribadi. Pertama dari orang tua, karena orang tua menjadi anggota dewan DPRD Jawa Timur juga pada tahun 1999-2004 dari PAN juga. Didikan orang tua itu menjadi inspirasi saya sampai saat ini. Saya juga sering diskusi dengan ayah masalah-masalah kedewanan. Selain itu juga dari sahabat-sahabat senior seperti ketua fraksi Malik, Kuswianto. Termasuk dari pendiri partai, Amien Rais. Juga dengan Sutrisno Bachir. Juga dari eksekutif, ada dari BPKAD saya belajar tentang anggaran atau keuangan. Ada juga dari LSM, media, anggota Parpol lain, ada dari kawan-kawan Gerindra, dari Golkar. Jujur, partai tidak terlalu banyak membantu membekali terkait dengan tugas-tugas kedewanan legislasi, anggaran, dan kontrol sebelum masuk menjadi anggota dewan. Tapi partai memiliki ruang yang dikelilingi oleh orang-orang yang berkompetensi di bidang itu dari latar belakang yang berbeda-beda. Di situlah memang tempat kita belajar. Partai ini ada pakar hukumnya, ada praktisinya, dan ada LSM-nya”.*

Jika HW terkait sumber belajarnya adalah dengan mengumpulkan, membaca, mendengarkan, meresume arsip-arsip, baik dari eksekutif maupun legislatif.

*“Sumber belajarnya saya pribadi adalah yang paling efektif bagi saya itu adalah arsip-arsip pandangan umum, pandangan akhir fraksi, lalu juga ada arsip laporan dari eksekutif yang dibacakan Pakde atau wakilnya, itu isinya informasi data yang luar biasa bagi seorang anggota dewan”.*

Dari data hasil studi tampak bahwa sumber belajar para anggota dewan dalam melakukan pembelajaran mandiri, bersumber pada: para seniornya baik di Parpol, lintas Parpol, fraksi, komisi, tokoh politik, eksekutif, kepada orang tuanya, kemitraandengan dosen dari berbagai perguruan tinggi, staf ahli baik di fraksi maupun komisi, staf pribadi, pelatihan bimtek, Diklat di dalam maupun luar negeri, buku, serta memanfaatkan literatur di perpustakaan. Ada juga dari LSM, media, mengumpulkan, membaca, mendengarkan, meresume arsip-arsip, baik dari eksekutif maupun legislatif, dari kasus-kasus yang datang dari konstituen, dan bahkan dari seorang yang gagal politik.

Berdasarkan hasil studi di atas, ditemukan bahwa sumber belajar anggota legislatif terhadap kegiatan belajar mandiri dapat dikelompokkan dalam kategori tabel di bawah ini:

**Tabel 11**  
**Sumber Belajar**

No.	Sumber belajarnya
01.	Para seniornya baik di Parpol, lintas Parpol, fraksi, maupun komisi.
02.	Para tokoh politik
03.	Para eksekutif.
04.	Buku, jurnal, hasil penelitian lainnya, serta memanfaatkan literatur.
05.	Media elektronik dan cetak
06.	Mengumpulkan, membaca, mendengarkan, meresume arsip-arsip eksekutif maupun legislatif
07.	Diklat/pelatihan Bimtek di dalam maupun luar negeri.
08.	Staf ahli baik di fraksi maupun komisi.

No.	Sumber belajarnya
09.	Dosen dari berbagai perguruan tinggi.
10.	Kepada orang tuanya yang juga politisi.
11.	Staf pribadi.
12.	LSM.
13.	Kasus-kasus yang datang dari konstituen.
14.	Seseorang yang gagal politik.
15.	Tokoh masyarakat

### B. Orientasi Belajar (*Orientasion to Learning*)

Orientasi belajar (*orientasion to learning*) pada anak dengan pada orang dewasa memiliki perbedaan yang signifikan. Orientasi belajar pada anak seolah-olah sudah ditentukan dan dikondisikan untuk memiliki orientasi yang berpusat pada materi pembelajaran (*subject matter centered orientation*). Sedangkan orientasi belajar pada orang dewasa memiliki kecenderungan yang berpusat pada pemecahan permasalahan yang dihadapi (*problem centered orientatin*). Hal ini dikarenakan belajar bagi orang dewasa seolah-olah merupakan kebutuhan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan keseharian, terutama dalam kaitannya dengan fungsi dan peranan sosial orang dewasa. Selain itu, perbedaan asumsi ini disebabkan juga karena adanya perbedaan perspektif waktu. Bagi orang dewasa, belajar lebih bersifat untuk dapat dipergunakan atau dimanfaatkan dalam waktu segera. Sedangkan anak, penerapan apa yang dipelajari masih menunggu waktu hingga dia lulus dan sebagainya. Sehingga ada

kecenderungan pada anak, bahwa belajar hanya sekadar untuk dapat lulus ujian dan memperoleh sekolah yang lebih tinggi.

Dari perspektif waktu dan orientasi belajar, orang dewasa memandang belajar itu sebagai suatu proses pemahaman dan penemuan masalah serta pemecahan masalah (*problem finding and problem solving*), baik berhubungan dengan masalah kekinian maupun masalah kehidupan di masa depan. Orang dewasa lebih mengacu pada tugas atau masalah kehidupan (*task or problem oriented*). Sehingga orang dewasa akan belajar mengorganisir pengalamannya (Knowless, 1977, Unesco, 1988, Kamil, 2001, Saraka, 2001).

Berikut hasil temuan studi terkait dengan orientasi pembelajaran mandiri anggota legislatif. Empat informan di bawah ini sangat setuju jika alasan belajar secara mandiri memiliki orientasi belajar yang berpusat pada pemecahan permasalahan yang dihadapi (*problem centered orientatin*). Termasuk NS.

*“Orientasi pembelajaran mandiri ini merupakan kebutuhan untuk menghadapi berbagai permasalahan tupoksi saya. Itu sangat bermanfaat untuk terus dilakukan. Pembelajaran mandiri memiliki orientasi take and give dan tujuannya diantaranya harus bisa memberikan problem solving”.*

RA pun menyepakatinya pembelajaran mandiri bagi orang dewasa merupakan kebutuhan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan keseharian,

terutama dalam kaitannya dengan fungsi dan peranan sosial orang dewasa.

*“Orientasinya adalah agar apa yang sekarang kita pelajari, dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi. Ini menjadi pilihan semua orang dewasasaya rasa”.*

HW pun sependapat dengan RA dan NS bahwa Bagi orang dewasa, belajar lebih bersifat untuk dapat dipergunakan atau dimanfaatkan dalam waktu segera.

*“Ya, orientasi pembelajaran mandiri merupakan kebutuhan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi kami. Kamidi DPRD Jawa Timur, karena ndak punya staf ahli dan tenaga ahli, akhirnya wajib melakukan pembelajaran mandiri, untuk bisa menghadapi permasalahan yang ada terkait tupoksi dewan danmeningkatkan kompetensi dan kinerja kami dari hari ke hari”.*

Menurut MS sangat urgen melakukan pembelajaran diri untuk peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tupoksinya. Mengingat terbatasnya kegiatan pelatihan/bimbingan teknis/ *workshop* yang dilaksanakan oleh Parpol pengusung maupun sekretariat dewan.

*“Biar langsung tune in jadi anggota dewan yaharus belajar lah. Belajar yang lebih berorientasi menangani masalah. Karena di sini kan problem solving. Harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di luar yang harus kita perjuangkan di sini. Tips harus serius dalam melakukan pembelajaran mandiri jika ingin menjadi anggota DPRD yang mumpuni. Saya punya prinsip saya harus bisa. Terbatasnya pelatihan/bimbingan teknis/ *workshop* yang dilaksanakan oleh Parpol pengusung*

*maupun sekretariat dewan harus disiasi dengan pembelajaran mandiri”.*

AT menanggapi hal senada dengan pernyataan politisi di atas

*“Jika bagi saya, pembelajaran mandiri memiliki orientasi untuk dapat mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Khususnya terkait dengan tupoksi dewan. Jika ada persoalan, ya mencari solusinya dengan menggali dan mencari bagaimana cara memecahkannya”.*

Begitu pun Gy. Secara singkat menyatakan bahwa orientasi belajarnya secara mandiri tergerak karena adanya kebutuhan belajar bagi orang dewasa untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan keseharian, terutama dalam kaitannya dengan fungsi dan peranan sosial orang dewasa.

*“Sebagai anggota dewan yang memiliki tiga fungsi utama, seharusnya orientasi pembelajaran mandiri untuk dipergunakan dalam mengatasi persoalan tupoksi”.*

MZ, ZL, dan RO memiliki jawaban senada bahwa orientasi pembelajaran mandiri sudah merupakan kebutuhan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksinya dan bermanfaat dalam waktu segera. Menurut MZ:

*“Saya melakukan pembelajaran mandiri karena memiliki orientasi kegunaannya dapat dirasakan segera”.*

ZL pun menyatakan hal yang sama.

*“Orientasi kita melakukan belajar secara mandiri, kaitannya untuk menghadapi permasalahan yang harus segera diselesaikan”.*

Begitu pun RO memiliki pandangan yang sama, bahwa orientasinya pembelajaran mandiri adalah untuk segera memiliki manfaat dan dapat mengatasi persoalan terkini.

*“Banyak persoalan yang dihadapi dan butuh penanganan segera”.*

Dari data studi tersebut tampak bahwa orientasi belajar (*orientation to learning*) secara mandiri anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki kecenderungan memiliki orientasi belajar yang berpusat pada pemecahan permasalahan yang dihadapi (*problem centered orientatin*). Permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan keseharian, terutama dalam kaitannya dengan fungsi anggota dewan dan peranan sosialnya. Pembelajaran mandiri lebih bersifat untuk dapat dipergunakan atau dimanfaatkan dalam waktu segera. Bagi anggota dewan, belajar lebih bersifat untuk dapat dimanfaatkan dalam waktu segera dalam melaksanakan fungsinya. Pembelajaran mandiri juga memiliki orientasi pada proses pemahaman dan penemuan masalah serta pemecahan masalah (*problem finding and problem solving*), baik berhubungan dengan masalah kekinian maupun masalah kehidupan di masa depan.

Temuan ini sejalan dengan uraian (Knowless, 1977, Unesco, 1988, Kamil, 2001, Saraka, 2001). Dari perspektif waktu dan orientasi belajar, orang dewasa memandang belajar itu

sebagai suatu proses pemahaman dan penemuan masalah serta pemecahan masalah (*problem finding and problem solving*), baik berhubungan dengan masalah kekinian maupun masalah kehidupan di masa depan. Orang dewasa lebih mengacu pada tugas atau masalah kehidupan (*task or problem oriented*). Sehingga orang dewasa akan belajar mengorganisir pengalaman hidupnya.

Temuan orientasi pembelajaran mandiri anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sejalan dengan pendapatnya (Miller and Dollard, 1973) yang menyatakan bahwa proses belajar hanya mungkin tercipta jika peserta didik menginginkan sesuatu, memperhatikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan menerima sesuatu. Miller dan Dollard menegaskan bahwa: "*Learning takes place when something, notice something, does something and receiving something. This, learning in this view requires the interplay of four essential aspects: motivation (the wanting aspect) perception (the noticing aspect), responding (the doing aspect), and reward or reinforcement (the receiving aspect). If any motivation were set to zero, for example or if no reward were forthcoming for responses made, learning would be disputed*"

Belajar dalam konsepsi belajar sepanjang hayat merupakan suatu kebutuhan. Dengan alasan kebutuhan, setiap individu akan mendorong dirinya untuk belajar (*learning to learn*) sehingga dapat memelajari dan merespons secara cerdas pengetahuan-pengetahuan yang secara eksponensial terus

meningkat dan berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kehidupan. Kebutuhan untuk belajar (*need to learn*) merupakan kebutuhan yang paling mendesak dalam rangka meningkatkan peran pendidikan sepanjang hayat. Perubahan dunia secara cepat, sebagai dampak globalisasi, baik di bidang teknologi, informasi, ekonomi jasa, dan tuntutan pasar menuntut individu untuk terus beradaptasi dengan kondisi atau produk baru yang dilahirkan masyarakat maju. Tantangan ke depan cenderung lebih dinamis dan serba cepat. Pertumbuhan cepat dan keusangan informasi mendorong orang belajar terus sepanjang hayat. Pengetahuan dan kemampuan yang telah diperoleh perlu divalidasi ulang secara periodik. Asosiasi kerjasama dalam pembangunan ekonomi menuntut perlunya penyediaan pendidikan profesi lanjutan untuk pekerja (personalia) yang memiliki kualifikasi tinggi.

Berdasarkan hasil studi di atas, ditemukan beberapa kategori orientasi belajar (*orientation to learning*) dalam pembelajaran mandiri anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, yang dike- lompokkan dalam kategori tabel berikut:

**Tabel 12**  
**Orientasi Belajar**

No.	Orientasi Pembelajaran Mandiri
01.	Memiliki orientasi belajar yang berpusat pada pemecahan permasalahan yang dihadapi ( <i>problem centered orientation</i> ). Permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan ke seharian, terutama dalam kaitannya dengan fungsi anggota dewan dan peranan sosialnya.

No.	Orientasi Pembelajaran Mandiri
02.	Untuk dapat dimanfaatkan dalam waktu segera dalam melaksanakan fungsinya.
03.	Proses pemahaman dan penemuan masalah serta pemecahan masalah ( <i>problem finding and problem solving</i> ), baik berhubungan dengan masalah kekinian maupun masalah kehidupan di masa depan.

Pada dimensi orientasi belajar, hasil studi menjelaskan bahwa dalam pembelajaran mandiri, orientasi belajar (*orientation to learning*) anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki orientasi belajar yang berpusat pada pemecahan permasalahan yang dihadapi (*problem centered orientation*), dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Orientasi belajar (*orientation to learning*) mandiri anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki orientasi belajar yang berpusat pada pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan keseharian, terutama dalam kaitannya dengan fungsi anggota dewan dan peranan sosialnya. Pembelajaran mandiri lebih bersifat untuk dapat dipergunakan dalam waktu segera.
- b. Orientasi belajar (*orientation to learning*) pembelajaran mandiri anggota DPRD Provinsi Jawa Timur adalah untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal yang terkait dengan tupoksinya.

Belajar lebih bersifat untuk dapat dipergunakan dalam waktu segera pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Sehingga urgen melakukan pembelajaran mandiri untuk peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tupoksinya. Mengingat terbatasnya kegiatan pelatihan/bimbingan teknis/*workshop* yang dilaksanakan oleh Parpol pengusung maupun sekretariat dewan.



## **BAB VI**

# **STRATEGI ANGGOTA LEGISLATIF DALAM MENYUKSESKAN PEMBELAJARAN MANDIRI**

Strategi merupakan sebuah cara yang digunakan oleh seseorang maupun sekelompok orang dalam upaya mencapai sebuah tujuan. Terkait pembelajaran mandiri anggota legislatif, melalui buku ini menyajikan studi tentang strategi anggota legislatif dalam proses belajar mandiri. Studi ini menunjukkan bahwa untuk dapat mencapai tujuannya, seorang anggota legislatif pertamanya harus memiliki motivasi yang kemudian dilanjutkan dengan proses adaptasi ketika sudah terpilih. Namun demikian, selain dua hal tersebut, ada hal yang menjadi harapan anggota legislatif terhadap pola kerja maupun institusi-institusi terkait sehingga proses pembelajaran mandiri dapat berjalan dengan cepat dan baik.

Terkait hal-hal tersebut, berikut diuraikan mengenai hasil studi terhadap Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang terkait seputar motivasi menjadi anggota DPRD, adaptasi awal terkait fungsi DPRD, dan harapan anggota DPRD terkait tupoksinya.

### **A. Motivasi Menjadi Anggota DPRD**

Motivasi memiliki peranan yang strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Tidak ada seorangpun yang belajar tanpa motivasi. Tidak ada motivasi berarti tidak ada kegiatan belajar. Agar peranan motivasi lebih optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya sekadar diketahui, tetapi harus diterangkan dalam aktivitas belajar-mengajar.

Seseorang melakukan aktivitas belajar karena ada yang mendorongnya. Motivasilah sebagai dasar penggerak yang mendorong seseorang untuk belajar. Minat merupakan kecenderungan psikologis yang menyenangkan suatu objek, belum sampai melakukan kegiatan. Namun minat adalah motivasi dalam belajar. Minat merupakan potensi psikologi yang dapat dimanfaatkan untuk menggali motivasi. Bila seseorang sudah termotivasi untuk belajar, maka dia akan melakukan aktivitas belajar dalam rentang waktu tertentu. Oleh karena itu, motivasi diakui sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar seseorang. Motivasi memegang peranan yang amat penting dalam pembelajaran mandiri.

Mengutip pendapat Mc. Donald (Tabrani, 1992), *“motivation is energy change within the person characterized by affective arousal and anticipatory goal reaction”*. Motivasi adalah sesuatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif dan reaksi untuk mencapai tujuan. Dari perumusan yang dikemukakan Mc.

Donald ini mengandung tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu: 1) motivasi dimulai dari adanya perubahan energi dalam pribadi, 2) motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan (*affective arousal*), 3) motivasi ditandai oleh reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan.

Berikut merupakan hasil studi mengenai berbagai motivasi yang dimiliki oleh masing-masing anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2014. Seperti misalnya AT anggota Badan Anggaran (Banggar) ini, selain memang *passion*-nya menjadi anggota dewan, ia juga memiliki motivasi untuk melakukan perubahan yang lebih baik di masyarakat.

*“Motivasi menjadi anggota dewan karena suka saja. Karena saya tahu dewan ini punya otoritas, ada banyak hal yang bisa dilakukan kaitannya dengan banyak kebijakan yang bisa dituangkan dengan Perda guna kepentingan masyarakat”.*

Begitupun Gy, sebagai anggota DPRD Jatim daerah pemilihan VII, menjadi anggota dewan memiliki tujuan dan motivasi memperbaiki problem sosial dan memperbaiki kondisi perekonomian di wilayah dapil VII khususnya. Menurut anggota Badan Musyawarah (Banmus) ini, bukan hanya persoalan keluarga miskin, akses baik fisik atau infrastruktur yang ingin diperbaiki, ia juga ingin memperbaiki kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat agar bisa ditingkatkan kesejahteraan mereka.

*“Intinya motivasi menjadi anggota dewan ingin mengabdikan diri sepenuhnya untuk rakyat tanpa pamrih”.*

NS sekretaris Fraksi Gerindra, memiliki motivasi menjadi anggota dewan untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi konstituennya. NS fokus ingin mengangkat kehidupan para petani. Menurutnya, banyak petani yang menderita akibat gagal panen karena padinya diserang hama wereng baik coklat, merah, dan potong leher.

*“Motivasi menjadi anggota dewan saya ingin menyumbangkan ilmu saya (pertanian) dan berbuat kepada masyarakat terutama kepada petani melalui Perda No.5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Petani dan Nelayan yang sudah kami buat. Saya juga masih punya utang kepada nelayan. Namun akhirnya utang itupun saya lunasi setelah dibuatnya Perda khusus untuk nelayan yakni Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan”.*

MZ prihatin dengan segala bentuk ketimpangan di Kabupaten Sampang. Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar yang juga duduk di komisi E ini memastikan dirinya menjadi anggota dewan karena ingin mengawal kepentingan masyarakat Madura. Yang paling utama dia perjuangkan adalah masalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta mengagas berdirinya universitas di Sampang.

*“Motivasinya menjadi anggota dewan karena melihat disparitas di Madura yang luar biasa. Dalam segala hal, dalam pembangunan, pendidikan, kesejahteraan, infrastruktur, IPM. Secara jujur disparitas itu bukan karena orang Madura tidak mampu. Disparitas itu terjadi, karena jika boleh saya kritik, kesalahan dari orientasi dari pemerintah sebelumnya tentang prioritas pembangunan sebelumnya di Madura. Saya datang ke sini diharapkan*

*disparitas itu dapat diperjuangkan agar sisi utara Madura yang tertinggal bisa mengejar kemajuan masyarakat di sepanjang jalan di selatan Madura”.*

RA, sebagai wakil rakyat dari dapil VIII yang meliputi Kabupaten/Kota Madiun, Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, dan Jombang, menyampaikan motivasinya menjadi wakil rakyat di Jawa Timur sebagai berikut:

*“Motivasi saya di awal adalah melaksanakan komitmen untuk melindungi pertanian di Jatim. Komitmen ini sebagai bentuk perhatian saya terhadap persoalan kerakyatan di Jatim. Oleh karenanya pemerintah harus berani dan mampu menyediakan infrastruktur di pedesaan, sebagai strategi peningkatan produksi tanaman pangan dari regulasi perundang-undangan. Karena dari sekian persen Provinsi Jatim telah memberikan subsidi kepada kabupaten/kota untuk pembangunan infrastruktur di tiap pedesaan. Dalam strategi peningkatan produksi tanaman pangan, peningkatan produktivitas dan mutu hasil, perluasan areal tanam, pengembangan kawasan, pengamanan produksi, serta penguatan kelembagaan pertanian dan dukungan pembiayaan usaha tani harus dilakukan. Untuk kebutuhan penguatan, dirinya mendesak kepada pemerintahan, mulai pusat, provinsi hingga pemerintahan kabupaten/kota untuk memperhatikan keperluan petani. Bentuknya, dengan memberi motivasi kepada UMKM yang ada di masing-masing daerah. Bagaimanapun pertanian dan agrobis harus siap. Karena harus mengawal menghadapi era perang ekonomi, atau MEA. Karenanya perlu ada sosialisasi terkait dengan adanya bank tani guna membantu para petani agar tidak terjerat praktik ijon. Dengan keberadaan bank tani tersebut kian memudahkan petani. Bahkan dengan adanya kemitraan kerjasama seperti menggandeng lembaga di bidang pertanian, maka kesejahteraan petani bisa terwujud. Regulasi ini merupakan wujud komitmen*

*eksekutif dan legislatif untuk melindungi pertanian di Jatim. Pemerintah di dalam liberalisasi ini harus mengintervensi di alokasi, distribusi, dan stabilitasi, serta membela yang kecil. Distorsi pasar bebas harus diintervensi pemerintah. Termasuk sektor pertanian. Itu harus diintervensi, misalnya hibah untuk pengolah pertanian, hand tractor, mini feed mill, tuturnya. Di sisi lain dalam menghadapi MEA yang sudah berjalan sejak 2015 lalu, UMKM di Jatim belum seluruhnya tersertifikasi sehingga terancam kalah dalam persaingan. Karena itu, kami di dewan Jatim mendorong seluruh komponen di Jatim harus serius menggarap pasar dalam negeri agar produk luar tak menguasai pasar dalam negeri”.*

Motivasi utama ZL, sebagai wakil rakyat DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan Jawa Timur I yang meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, adalah memperhatikan serius wilayahnya yang terdampak lumpur Lapindo yang banyak membawa korban serta dampak pada lingkungan hidup sekitarnya.

*“Saya berusaha agar para korban terdampak yang sampai saat ini belum mendapatkan uang ganti rugi penuh akan diperjuangkan. Ini motivasi saya sekaligus tugas saya sebagai wakil rakyat yang harus memperjuangkan warga Sidoarjo khusus bagi mereka yang masuk korban lumpur Lapindo yang kini belum menerima ganti rugi atau kah uang yang diterimanya masih kecil. Dari semburan lumpur Lapindo ini banyak sekali dampaknya yang dirasakan masyarakat sekitar. Mulai lingkungan hidup serta pendapatan masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya, yang selama ini menjadi petani dan petambak. Karenanya kini mereka bekerja secara serabutan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Sementara pemerintah pusat dan PT Minarak yang diharapkan segeramelunasi uang ganti rugi hingga kini tak kunjung selesai. Selain persoalan lumpur Lapindo, motivasi*

*saya jadi anggota dewan di Jawa Timur, ingin memperjuangkan petani tambak yang setiap tahun mengalami kerugian puluhan juta akibat ikan yang mau dipanen mati yang diakibatkan pencemaran lingkungan berupa keracunan limbah. Padahal di satu sisi, mereka itu penyumbang Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) tertinggi di Kab. Sidoarjo. Mengingat luasan tambak di Sidoarjo mencapai 11.500 hektar. Bayangkan jika hasil panen tambak yang sebegitu luasnya mati, maka dapat dipastikan PAD Kab. Sidoarjo akan turun. Ini karena mereka penyumbang PDRB tertinggi. Di sisi lain mereka enggan bekerja lagi sebagai petani tambak. Ditambahkannya, gagal-nya petani tambak melakukan panen dikarenakan ikan-ikan yang ada keracunan limbah pabrik. Ini karena perusahaan yang ada di sepanjang sungai membuang limbahnya saat malam hari, yang notabene jauh dari pengawasan. Namun dampaknya sangat luar biasa, dimana akibat aksi nakal mereka, ribuan hektar tambak gagal panen. Jika ini tetap dibiarkan oleh pemerintah, tanpa ada campur tangan, maka dipastikan para petani akan gulung tikar. Di satu sisi tentunya akan menjadi beban Pemkab. Sidoarjo karena akan semakin banyak pengangguran”.*

HW, memiliki motivasi kuat untuk menjadi anggota dewan karena terdorong ingin membangun Jawa Timur melalui perbaikan dari sisi infrastruktur dan konsen terhadap penanganan bencana alam.

*“Saya ingin konsern untuk melakukan advokasi terhadap seluruh persoalan yang menimpa masyarakat Jatim, khususnya di bidang infrastruktur serta bencana alam. Karena jika saat musim ke- marau ada 12 wilayah di Jatim mengalami kekeringan. Dan dipastikan wilayah tersebut juga akan dilanda banjir saat musim hujan tiba. Untuk itu diperlukan antisipasi sejak awal, di antaranya*

*pengerukan saluran, penyiapan pompa air hingga pada memperbanyak lahan resapan. Termasuk Pulau Madura yang beberapa tahun ini dilanda banjir hebat tentunya dibutuhkan perhatian ekstra”.*

RO mengatakan, mengemban tugas kedewanan sebagai wakil rakyat adalah pekerjaan yang harus dijunjung tinggi dan selayaknya dikerjakan dengan jujur dan penuh pengabdian. Itu artinya seorang pimpinan harus lebih mementingkan rakyat di atas segalanya.

*“Motivasi saya menjadi anggota dewan salah satunya memiliki cita-cita dan bertekad keras dengan mengabdikan diri bekerja untuk kebaikan rakyat. Saya melihat, banyak sekali hal yang harus dilakukan perbaikan demi kesejahteraan masyarakat, khususnya Jatim. Poin penting tersebut di antaranya, perbaikan infrastruktur jembatan, jalan, dan pengairan/dam. Ketika ke-tiga aspek tersebut telah diperbaiki, maka akan berpengaruh untuk kelancaran masyarakat dalam mencari nafkah demi kemakmuran keluarga. Di lingkungan pertanian, saya dilahirkan dan dibesarkan, membuat saya paham betul betapa susahny mereka untuk mendapatkan penghasilan. Seperti halnya yang dialami oleh hampir seluruh petani tebu yang ada di Jatim, yang sering dirundung kesusahan karena hasil panennya yang sudah disetorkan ke pabrik gula belum dapat dibayar, karena gula yang telah diproduksi tidak dapat terserap ke luar Jatim. Hal ini disebabkan karena di wilayah penjualannya dipenuhi gula rafinasi. Tahun 2014 saat saya baru masuk gedung dewan, merupakan tahun yang memprihatinkan bagipetani tebu. Harga gula jauh di bawah ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan yang telah dite- tapkan sebesar Rp. 8.500. Ini tidak pernah terjadi dalam sejarah ketika pemerintah menetapkan harga pokok petani. Petani bertubi-tubi dihantam masalah, selain harga gula anjlok serta rendaman tebu yang tidak sesuai*

*dengan harapan, kredit juga susah diperoleh. Untuk menembus pupuk, petani kelimpungan. Akibatnya, banyak tanaman tebu yang tidak terurus. Kondisi tersebut memengaruhi musim giling. Ibaratnya tebu petani sudah kurang gizi dan kurang nutrisi. Melihat kenyataan tersebut, saya ingin terus berjuang agar gula-gula yang kini memenuhi gudang sejumlah pabrik gula bisa terserap di luar Jatim. Saya juga berharap pemerintah memperhatikan nasib petani tebu. Pemerintah diminta bisa melahirkan varietas tebu, sehingga petani bisa meningkatkan produktivitasnya dan menghasilkan tebu dengan angka rendeman yang tinggi. Dan pada akhirnya negara bisa berswasembada gula yang berdaya saing tinggi”.*

Motivasi MS menjadi anggota dewan karena ia terenyuh dengan dunia pendidikan saat ini. Ketua Fraksi Nasdem-Hanura ini menceritakan, dunia pendidikan yang berada di Daerah Pilihannya Jawa Timur II yakni Kabupaten/Kota Pasuruan dan Probolinggo, hampir seluruh anak-anak terpaksa putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu; di Aliyah, SMA, atau SMK.

*“Semua ini dikarenakan jarak sekolah yang jauh dari rumah mereka yang hampir mencapai puluhan kilometer. Satu sisi lain mereka tidak memiliki kendaraan untuk menuju sekolah. Yang terjadi selama ini banyak dari mereka hanya dapat melanjutkan sekolah di tingkat SD hingga SMP saja. Selanjutnya dia memilih untuk membantu orang tua mereka sebagai petani. Sementara itu disatu sisi kebijakan pemerintah adalah wajib belajar 12 tahun atau sampai pada tingkat SLTA. Untuk itu ke depannya, pemerintah harus memberikan kemudahan akses bagi anak-anak ini untuk dapat melanjutkan sekolah hingga memenuhi wajar 12 tahun. Di antaranya pendirian sekolah serta angkutan sekolah bagi mereka. Maklum hampir*

*sebagian besar dari mereka memiliki ekonomi pas-pasan. Persoalan lainnya termasuk gizi yang harus diperhatikan penuh oleh Pemprov Jatim. Ini tidak lain dari mereka yang hidupnya pas-pasan. Sementara di satu sisi anak-anak dituntut untuk sekolah dengan menempuh jarak yang jauh sehingga anak-anak akan lelah saat belajar di kelas. Selain itu, juga soal kurangnya minat para pemuda di desa bekerja di bidang pertanian. Ini tak lain karena di pedesaan banyak berdiri pabrik-pabrik yang menjanjikan upah yang cukup menggairkan. Sementara jika menjadi petani mereka hanya menerima upah kecil. Tak heran saat ini sangat sulit ditemui petani-petani muda. Sebaliknya petani yang ada saat ini usianya sudah lanjut. Selama ini Pemprov Jatim berkomitmen menjadi wilayah yang agribisnis. Untuk itu, jika pemerintah menginginkan ada petani muda yang mau terjun di bidang pertanian, diperlukan adanya sebuah sistem pertanian yang bagus berupa teknik penanaman yang baik serta kemudahan memperoleh bibit unggul. Itu tentunya harus didukung dengan teknik penanaman yang bagus, termasuk soal penjualan dan pengemasannya harusnya dilakukan dengan cara yang bagus. Apalagi Gubernur Soekarwo sudah banyak memberikan perhatian kepada petani berupa kredit tani. Hal ini yang tentunya harus didukung penuh. Namun demikian harus ada pendampingan dari SKPD yang bersangkutan agar kredit tani yang seharusnya untuk modal kerja ini tidak disalahgunakan penggunaannya dan dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Untuk itu kami nanti akan mengusulkan agar ada tenaga pendamping untuk kredit tani tersebut. Itulah motivasi saya menjadi anggota dewan ingin memperbaiki persoalan tersebut”.*

Dari data studi tersebut tampak bahwa masing-masing anggota dewan memiliki motivasi yang beragam menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Namun kesamaannya, yaitu dengan otoritasnya ingin mengabdikan kepada masyarakat

melalui kompetensi yang mereka miliki. Dengan otoritas yang dimilikinya, diharapkan dapat melakukan perubahan yang lebih baik di masyarakat. Dengan otoritasnya, ada banyak hal yang bisa dilakukan kaitannya dengan banyak kebijakan yang bisa dituangkan dengan Perda guna kepentingan masyarakat.

Orang dewasa memandang bahwa *“all living is learning. Learning is not only preparation for living the very essence of living, the very essence of living it self”*. Setiap peserta didik memiliki pola kesiapan yang berbeda dengan warga lainnya terutama dalam hal kekuatan motivasi (*inner motivations*) seperti: *needs for esteem (self esteem), urge to grow, the satisfaction for accomplishment, the need to know something specific and curiosity to learn”* (Inggalls, 1973, Knowless, 1977, Unesco, 1988, Saraka, 2001).

Berdasarkan hasil studi di atas, ditemukan motivasi untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, yang dikelompokkan dalam kategori tabel di bawah ini:

**Tabel 13**  
**Motivasi Menjadi Anggota Dewan**

No.	Motivasi menjadi anggota dewan
01.	Dengan otoritas yang dimiliki, ingin membangun Jawa Timur melalui fungsi, hak, dan kewajibannya anggota legialatif.
02.	Dengan otoritas yang dimilikinya, ingin dapat melakukan perubahan yang lebih baik di masyarakat.
03.	Dengan otoritasnya, ingin ada banyak hal yang bisa dilakukan kaitannya dengan banyak kebijakan yang bisa dituangkan dengan Perda guna kepentingan masyarakat.

## **B. Adaptasi Awal Terkait Tugas Pokok, dan Fungsi(Tupoksi) DPRD**

Berbeda dengan motivasi yang keberadaannya sudah terlihat dari sebelum terpilih menjadi anggota legislatif, adaptasi adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungan dimana anggota legislatif tersebut sudah terpilih. Penyesuaian berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan, juga dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan keinginan pribadi (Gerungan, 1991). Adaptasi itu sendiri pada hakikatnya adalah suatu proses untuk memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan hidup. Salah satu dari syarat tersebut adalah syarat sosial dimana manusia membutuhkan hubungan untuk dapat melangsungkan keteraturan untuk tidak merasa dikucilkan, dapat belajar mengenai kebudayaan (Suparlan, 1993). Secara umum adaptasi adalah penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungan yang baru atau asing untuk kelangsungan hidup. Dalam dunia kerja strategi untuk beradaptasinya dengan lingkungan pekerjaan.

Informan dalam studi ini adalah anggota dewan *non-incumbent*, mereka yang baru pertama kali menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Oleh karenanya mereka membutuhkan adaptasi dengan cepat dan baik terkait fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Berikut adalah pemaparannya:

AT merasa tidak pernah mengalami hambatan dan kesulitan sejak awal masuk gedung dewan terkait tupoksinya.

*“Ketika pertama kali masuk gedung dewan, saya tidak terlalu sulit beradaptasi menjadi anggota dewan terkait fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Karena paradigma eksekutifnya, paradigma gubernurnya membuka pintu untuk dialog secara terbuka membuka pintu-pintu. Di Jawa Timur pintunya ketemu semua. Karena itu bagi pendatang baru seperti saya tidak rumit untuk beradaptasi”.*

Begitu pun Gy, sama seperti AT tidak ada kesulitan dan mudah menyesuaikan diri terkait tupoksi yang dijalaninya menjadi anggota dewan.

*“Saya tidak merasa ada kesulitan terkait dengan tugas dan fungsi legisasi, anggaran, pengawasan sebagai anggota dewan pertama kali di Indrapura. Menurut saya, yang lebih penting adalah membuat grand desain/blue print tentang APBD itu mau ke mana arahnya sesuai dengan harapan rakyat”.*

NS juga sependapat dengan Gy dan AT. Namun menurut NS, yang harus konsentrasi penuh dan belajar lebih ketika menjalankan fungsi anggaran.

*“Saya tidak merasa ada kesulitan tatkala pertama kali menjadi anggota dewan tahun 2014. Saya enjoy saja. Terkait dengan fungsi barangkali hanya fungsi anggaran lah saya yang harus belajar lebih lagi. Karena kita kan bukan pelaku. Kita hanya memelajari, sedangkan pelakunya kan SKPD. Hanya saja budgeting-budgeting kita kontrol terutama di sektor pertanian”.*

RA mengalami kesulitan pada dua bulan pertama menjadi anggota dewan.

*“Di awal-awal saja saya kira ada sedikit kesulitan, karena dalam rangka adaptasi. Tapi dua bulan kemudian sudah*

*ready kok. Yang penting kitabanyak belajar dari siapa pun, tak terkecuali kepada mereka yang incumbent”.*

Sama dengan RA, MZ pun tak butuh lama untuk segera paham terhadap tupoksi dewan. Hanya saja, ia ingin segera menyusul para seniornya *incumbent* yang sudah sangat hapal dengan berbagai macam regulasi yang melekat dengan fungsi dewan.

*“Jadi hampir semua anggota DPRD ketika pertama kali pasti memiliki hambatan dalam konteks adaptasi dalam menjalankan ketiga fungsi itu. Tapi saya rasa ketika satu bulan kita berinteraksi, kita melihat, kita mendengar, saya kira bulan keduanya sudah bisa jalan normal. Saya mesti belajar banyak ketika masuk pertama kali menjadi anggota dewan. Tentang berapa lama penyesuaiannya, saya pikir selama kita mau membaca, prosesnya akan berjalan dengan cepat. Jika sampai hari ini saya bilang belum seperti para senior yang sudah dengan lancar membaca teks kemudian menyebutkan perundangan-undangan dan sebagainya, tentang dasar hukum dan sebagainya, tapi saya terus belajar. Saya terus mengejar mereka. Yang penting itu kemauan sih Pak. Kemauan kita untuk berkembang. Karena literaturnya sudah disediakan. Tinggal kita mau membaca apa tidak”.*

ZL pun menyatakan butuh waktu sekitar dua bulan dalam menyesuaikan diri terkait tupoksinya. Sama persis yang dikatakan informan sebelumnya. Hanya ZL menambahkan bahwa kesulitan pertama justru pada saat ia membangun konfigurasi dan komunikasi. Karena menurutnya, anggota legislatif tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa berjalan sendiri karena keputusan legislatif adalah keputusan bersama. Butuh

proses adaptasi dengan anggota dewan lainnya, termasuk keinginan bagaimana menyamakan visi, melakukan misi bersama, menyamakan tujuan, dan persepsi.

*“Sedikit banyak ada lah kesulitan ketika kita baru terjun menjadi anggota dewan terkait fungsi legislasi, anggaran, dan kontrol. Tapi dengan terus belajar, kita bisa meminimalisir lah kesulitan itu. Kaitan dengan fungsi budgeting ada tertuang dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran, red.). Terkait dengan fungsi kontrol sudah ada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran, red) nya. Kesulitan pertama ketika masuk menjadi anggota dewan adalah bagaimana kita membangun konfigurasi dan komunikasi. Karena sejujurnya anggota legislatif ini tidak bisa berdiri sendiri. Sebagai anggota legislatif harus bersama-sama Pak, tidak bisa berjalan sendiri karena keputusan legislatif ini adalah keputusan bersama. Butuh proses adaptasi dengan kawan, termasuk keinginan bagaimana menyamakan visi, melakukan misi bersama ini, dalam menyamakan tujuan, dan persepsi. Itu kesulitan di awal-awal. Karena kita sudah faham tupoksinya waktu di kabupaten dulu, maka tidak butuh lama untuk memahami tupoksinya dewan. Dua bulan saya sudah bisa membangun komunikasi dengan semua kawan di sini”.*

HW pun mengaku sudah siap ketika awal menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Sama seperti informan yang lain tidak butuh waktu lama untuk menyesuaikan tupoksinya. Bekal kesiapan itu, justru ia dapatkan jauh hari sebelum ia menjadi anggota dewan.

*“Ya pertama saya selama lima tahun sebagai Ketua Umum DPW PKS Jawa Timur, otomatis sehari-harinya salah satunya mengelola Fraksi PKS di DPRD Jawa Timur yang merupakan kepanjangan tangan kami di struktur DPW PKS Jawa Timur sehingga learning by doing, akhirnya tahu apa*

*saja, tugas dan pokok fungsi anggota dewan termasuk fungsi legislasi, pengawasan, maupun budgeting. Ya pada prinsipnya ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus, kenapa? Karena begitu kami dilantik, saat itu juga kami harus berfungsi. Sehingga tidak ada alokasi waktu yang lama bagi kami untuk beradaptasi. Karena itulah yang saya sampaikan tadi ketika April Pemilu, kemudian sekitar tiga atau empat hari setelahnya itu dapat kepastian menjadi salah satu wakil rakyat di Jawa Timur Dapil I, walaupun pelantikannya masih Agustus, waktu-waktu sebelum itulah yang saya pergunakan sebaik-baiknya dengan cara seperti yang saya sebut tadi di atas. Sehingga begitu dilantik, ndak lama setelah itu ada bimbingan teknis resmi dari DPRD yang diselenggarakan oleh DPRD Jawa Timur, itu sifatnya hanya tambahan saja dari apa yang sudah saya lakukan sebelumnya. Sehingga ketika selesai Bimtek, ya kami sudah harus ekspert sebagai wakil rakyat dalam melaksanakan tugas di hari pertama setelah bimbingan teknis tersebut. Nah salah satunya yang saya lakukan itu tadi, membaca PA dan PU Fraksi PKS atau pun PA PU dari fraksi yang lain yang ada di dalam arsip sekwan DPRD Jawa Timur, nah itu yang saya kaji dan saya pelajari saya diskusikan dengan beberapa anggota DPRD Jawa Timur, fraksi PKS saat itu”.*

Seperti informan lainnya, RO pun butuh waktu tak lama untuk menyesuaikan dengan tupoksinya.

*“Pertama kali saya menjadi anggota dewan di Indrapura ini saya butuh penyesuaian namun tidak terlalu lama. Tidak ada yang sulit untuk beradaptasi dengan ketiga fungsi dewan”.*

MS menyatakan tidak ada kesulitan ketika pertama kali masuk Gedung Indrapura. Karena ia sudah pernah dua periode menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Namun ia

pun merasakan hal yang sama dengan informan lain, ketika pertama kali menjadi anggota DPRD di Kabupaten Pasuruan. Tetapi ia sangat terbantuan karena di partainya (Nasdem) ada sekolah kader yang materinya di antaranya; tentang keorganisasian, pemerintahan, dan manajemen. Di dalam materi pemerintahan ini salah satunya adalah tupoksinya DPRD.

*“Karena saya pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, maka saya tidak pernah merasa kesulitan. Langsung dapat beradaptasi dengan tugas pokok dan fungsi sebagai anggota dewan dan Komisi A. Ketika dulu pertama kali saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, ya di awal-awal itulah sebagai seorang politisi anyaran ya istilahnya itu, saya harus beradaptasi dan mempelajari selama sekian bulan, untuk memahami betul tentang aturan-aturan yang terkait dengan tugas pokok, dan terkait dengan fungsi-fungsi yang ada di DPRD. Sehingga saya butuh antara dua bulan lah mempelajari betul semua aturan- aturan yang ada dan setelah itu running well. Saya lihat partai-partai belum optimal di dalam mempersiapkan kadernya, untuk terjun ke dunia politik. Nah jika di Nasdem, itu memang ada, namanya sekolah kader. Sekolah kader jauh-jauh sudah diajarkan, diajarkan tentang sistem, sistem pemerintahan yang ada. Semua kader Nasdem diberikan sekolah kader. Materi sekolah kader itu tentang keorganisasian, pemerintahan, kemudian tentang manajemen. Nah pemerintahan ini salah satunya adalah tupoksinya DPRD. Di Nasdem, di awal-awal selama tiga hari, diberikan materi tentang tupoksi DPRD, tentang hubungan dengan pemerintah, tentang teknik lobiing, tentang per- musyawarahan, dan macam-macam. Menurut saya yang paling sulit dijalani adalah fungsi pengawa- san. Pengawasan ini kan membandingkan antara yang baik dan yang tidak baik. Membandingkan antara yang sesuai dengan aturan dan yang tidak sesuai dengan aturan. Nah berarti kita harus*

*tahu yang betul, yang baik, yang sesuai dengan aturan, baru kemudian melakukan pengawasan. Jika kita tidak tahu ini maka kita tidak akan bisa melakukan pengawasan. Misalnya kita tidak faham tentang bangunan, ya apa yang akan kita awasi. Dan dari ketiga fungsi ini, yang paling bobot yang harus dikuasai anggota dewan adalah fungsi legislasi. Karena di sini fungsinya adalah membuat peraturan daerah. Semuanya itu kan berawal berakar dari situ kan? Termasuk penyusunan APBD itu kan cuma bagian dari peraturan daerah”.*

Dari data studi tentang adaptasi awal menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam menyesuaikan diri terkait fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan, hanya membutuhkan waktu sekitar dua bulanan. Namun tingkat kesulitan terkait adaptasi pada fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan, masing-masing anggota dewan menjawab tidak sama.

Beberapa alasan kenapa mereka mampu cepat beradaptasi dengan tupoksinya, diantaranya; paradigma eksekutifnya membuka pintu untuk dialog secara terbuka dengan legislatif, para senior anggota dewan *incumbent* mau diajak *sharing* tentang fungsi kedewanan, persiapan belajar dan memelajari berbagai tupoksi kedewanan dilakukan sebelum menjadi anggota dewan, pengalaman menjadi anggota dewan di kabupaten, serta ada sekolah kader di partainya sebelum masuk menjadi anggota dewan.

Dari hasil temuan tersebut terkait tentang penyesuaian kompetensi anggota dewan pada tupoksinya ketika pertama kali menjadi anggota dewan, Thoha (2002) menyatakan bahwa

karena singkatnya tenggat waktu penunjukan anggota DPRD. Sering kali para anggota DPRD belum dibekali materi tentang tupoksi kedewanan, hukum, dan pengetahuan masyarakat sebelum dilantik.

Berdasarkan hasil studi di atas, ditemukan tentang adaptasi awal menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam menyesuaikan diri terkait fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan yang dikelompokkan dalam kategori tabel di bawah ini:

**Tabel 14**  
**Adaptasi Awal Terkait Tupoksi**

No.	Adaptasi awal menjadi anggota legislatif terkait Tupoksinya
01.	Masing-masing anggota legislatif memiliki tingkat kesulitan yang berbeda terkait adaptasi awal pada fungsi legis-latif, anggaran, dan pengawasan.
02.	Rata-rata hanya membutuhkan waktu sekitar dua bulan di awal bertugas untuk beradaptasi dengan tupoksinya.
03.	Beberapa alasan kenapa mereka mampu cepat beradaptasi dengan tupoksinya, diantaranya karena; paradigma eksklusifnya membuka pintu untuk dialog secara terbuka dengan legislatif, para senior anggota dewan <i>incumbent</i> mau diajak <i>sharring</i> tentang fungsi kedewanan, persiapan belajar dan mempelajari berbagai tupoksi kedewanan dilakukan sebelum menjadi anggota dewan, pengalaman menjadi anggota dewan di kabupaten, serta ada sekolah kader di partainya sebelum masuk menjadi anggota dewan.

### C. Harapan (Solusi) Anggota DPRD

Dalam kelancaran pelaksanaan tupoksi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, termasuk dalam mendukung pembelajaran mandiri, semua informan menyatakan harapan yang sama. Yaitu pemerintah sebaiknya memfasilitasi staf ahli dan staf pribadi kepada masing-masing anggota legislatif daerah. Karena keberadaan mereka sangat diperlukan oleh anggota dewan untuk membantu kelancaran dan percepatan melaksanakan fungsi dewan.

Berikut ini, harapan-harapan yang disampaikan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur terkait kebutuhan untuk mendukung tupoksinya.

AT berharap sekali ada staf pribadi yang dibiayai pemerintah untuk mampu mendukung kinerjanya sebagai anggota dewan.

*“Saya berharap setiap anggota dewan memiliki staf pribadi yang difasilitasi oleh pemerintah. Minimal satu dewan difasilitasi satu staf”.*

MZ pun mengamini AT. Ia beralasan, anggota dewan berasal dari berbagai latar belakang dan disiplin ilmu, yang notabene tidak semuanya dapat menguasai materi di dalam tupoksinya. Makanya ia butuh staf pribadi yang dibiayai pemerintah minimal satu atau dua staf. Apalagi Jawa Timur adalah sebuah provinsi dengan daerah yang luas dengan mengelola belanja 23 triliun rupiah yang dijalankan berdasarkan kehendak rakyat.

*“Menurut saya secara jujur seharusnya anggota DPRD oleh pemerintah dibiayai staf. Jadi kita bisa mendapatkan panduan dari para staf karena kami datang dari latar belakang yang berbeda. Tentunya seperti latar belakang keluarga saya adalah pendidikan pesantren. Latar belakang pendidikan saya adalah MSDM. Tentunya saya tidak menguasai ilmu tentang yang dalam satu sisi misalnya tentang ekonomi secara mendetail. Saya tidak menguasai ilmu pertambangan secara mendetail. Mungkin ada beberapa teman lain yang datang dari latar belakang yang berbeda dan mungkin mereka tidak menguasai tipikal pendidikan secara detail. Sehingga sebenarnya staf ini sangat diperlukan. Jika boleh saya mengkritik sebenarnya, atau memberi saran tepatnya, seharusnya negara membiayai minimal satu atau dua staf. Sehingga kami bisa mencari staf dan yang digaji dengan uang negara tentunya dan dengan angka yang sangat baik, sehingga mendapatkan staf yang berkualitas. Sementara ini saya pribadi hanya dapat memberi gaji dengan hanya 2 atau 3 juta, staf yang saya bayar ya staf yang first graduate yang mungkin pengalamannya kurang. Jika orang yang sudah senior yang mungkin tidak mau lah dengan gaji 2 atau 3 juta. Minimal setiap anggota di sini punya satu. Saya punya satu yang biasa membantu saya tergantung order yang saya butuhkan. Misalnya saya akan membahas soal pendidikan, biasanya saya minta tolong untuk dicarikan update an terakhir tentang perundang-undangan, tentang Permennya, Pergubnya dan sebagainya, dengan regulasi sebelumnya. Kami merasa kualitas staf pribadi kami, masih jauh kualitasnya dengan yang kami harapkan. Karena kami di sini mengelola 20 sekian triliun di Jawa Timur. Dan 23 triliun itu dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Kehendak rakyat itu diwakili oleh 100 orang yang ada di sini. Dan bagaimana perkembangan arah Jawa Timur, mau atau tidak masedikit banyak pasti tergantung pada kami. Jika kami tidak memiliki sumber daya yang cukup, sumber data yang cukup, maka ya sebenarnya kami berjalan tanpa arah”.*

HW senada juga dengan AT dan MZ, dengan membutuhkan satu staf tenaga ahli untuk setiap anggota dewan. Tenaga ahli yang menguasai kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tupoksinya di komisi. Karena *backgroundnya* masing-masing anggota dewan tidak sama, baik kompetensi ilmiah, pengalaman organisasi, serta pengalaman bekerjanya. Itu tidak cukup untuk membawahi mitra SKPD di Pemprov Jawa Timur. Di samping itu, di DPR pusat juga sudah disediakan staf tenaga ahli yang dibiayai oleh pemerintah.

*“Terkait hambatan, yang pertama tentunya jika kita mau melakukan fungsi yang tiga itu dengan ideal, kita harusnya difasilitasi juga oleh negara dengan anggaran untuk tenaga-tenaga ahli seperti teman-teman kami di DPR RI. Kenapa? Karena kita sangat membutuhkan detail data, untuk melakukan fungsi legislasi, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan. Nah dalam hal ini sama sekali tidak ada. Hanya ada apa namanya staf komisi yang itu biasanya saya mintai bantuannya untuk menghimpun data baik dari mitra SKPD maupun data waktu kita kunjungan kerja di UPTD dan di kementerian. Nah, data-data itu yang kemudian saya olah sendiri sedemikian rupa untuk menunjang keperluan saya di dalam melaksanakan fungsi sebagai anggota DPRD. Nah ini yang sangat membedakan dengan temen-temen di DPR RI. Padahal kami melakukan fungsi yang sama ya, tugas yang sama, yaitu fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Kedua, kami ini backgroundnya baik apakah itu kompetensi ilmiah kami, atau pun pengalaman organisasi kami, pengalaman bekerja kami, itu tidak cukup untuk membawahi mitra SKPD kami. Misalkan jika Komisi A, itu lebih dari 20 mitra ya. Jika saya di Komis D hanya 8 mitra, tetapi diversifikasi kompetensi yang dibutuhkan itu juga lumayan luas. Ada ESDM di situ ada BLH di situ, ada Biro Administrasi*

*Pembangunan di situ, selain Dinas PU. Nah ini kan, apa namanya, sesuatu yang menjadi tantangan bagi kami, karena itulah sebenarnya diperlukan ada satu tenaga ahli yang dibiayai oleh negara. Jika tidak melekat pada masing-masing kami, sehingga butuh seratus tenaga ahli, paling tidak melekat pada fraksi. Sekarang ini fraksi mengeluarkan biaya sendiri TA-TA (tenaga ahli, red.) yang kami perbantukan untuk melakukan diskusi-diskusi di Fraksi PKS DPRD Jawa Timur. Selama ini Sekwan memfasilitasi yang hanya ada Bimtek yang satu tahun itu, hanya tiga kali sampai empat kali. Dan belum tentu acara atau pun menu yang disajikan materi yang disajikan itu sedang kami perlukan. Nah itu masalahnya. Yang sebenarnya menurut saya yang paling dibutuhkan adalah rekan-rekan anggota DPRD adalah tenaga ahli. Tenaga ahli yang tentunya menguasai kompetensi yang diperlukannya untuk melakukan tupoksinya di komisi tersebut. Jika PKS saya pikir, mungkin salah satu partai yang apa namanya, sangat perhatian di dalam program meningkatkan kinerja seluruh anggota DPRDnya bukan hanya kami di DPRD Jawa Timur. Saya beri contoh misalkan kami punya bidang kaderisasi, kami juga punya bidang polhukam, kami juga punya bidang pemenangan pemilu, yang ketiganya bersinergi salah satu programnya adalah meningkatkan kinerja kami anggota DPRD kab/kota se Jawa Timur dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur”.*

Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan yang lainnya seperti Gy, NS, RA, ZL, RO, MS terkait dengan harapannya untuk mendukung fungsi dewan. Gy politisi PDI Perjuangan asal Pacitan berharap ada staf tenaga ahli pribadi yang dapat mendampinginya.

*“Paling tidak ada staf tenaga ahli yang mendampingi di ruang kerja di kantor dewan. Karena jika seperti sekarang sangat repot bekerja sendiri”*.

Begitu pun NS dengan penuh harap, agar difasilitasi oleh pemerintah, setiap satu anggota dewan minimal satu staf tenaga ahli.

*“Jika itu terlaksana akan sangat memudahkan kita untuk menjalankan tupoksinya. Karena banyak pencarian data yang butuh tenaga ahli untuk mencarikannya”*.

RA, anggota Fraksi Partai Demokrat dan anggota Badan Musyawarah (Banmus) dan wakil ketua komisi C ini juga menyampaikan hal yang sama.

*“Sebetulnya ini angan-angan lama. Sudah lama saya mengharapkan pemerintah memfasilitasi minimal satu staf tenaga ahli untuk mendampingi satu anggota dewan untuk membantu kinerjanya”*.

Sedangkan ZL pria kelahiran Sidoarjo 05 September 1976 anggota Badan Musyawarah (Banmus) mengatakan bahwa salah satu untuk mendukung fungsi dewan dalam memaksimalkan kinerjanya adalah dengan memilikinya tenaga ahli.

*“Kita ini memiliki keterbatasan keahlian dan tenaga. Akan sangat arif dan bijaksana, tatkala pemerintah dapat memfasilitasi anggota dewan dengan minimal satu staf pendamping sebagai tenaga ahli”*.

RO yang menjabat sebagai bendahara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Jawa Timur mengatakan:

*“Harapannya satu dewan memiliki satu tenaga ahli”.*

MS, ketua Fraksi Nasdem-Hanura dan mantan Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan periode 2003-2007 ini pun menegaskan hal yang sama.

*“Semoga ke depannya setiap anggota dewan difasilitasi pemerintah staf ahli. Karena ini sangat membantu kelancaran kinerja dewan”.*

Dari data studi pada harapan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur terkait tupoksinya, informan berharap disiapkan minimal satu staf ahli pribadi yang menguasai kompetensi yang diperlukannya untuk melakukan tupoksinya yang dibiayai oleh pemerintah. Karena selama ini staf ahli yang ada hanya untuk melayani fraksi maupun komisi, sehingga kinerjanya kurang maksimal terhadap individual anggota dewan. Dengan anggota dewan yang berasal dari *background* berbagai latar belakang dan disip- lin ilmu, baik kompetensi ilmiah, pengalaman organisasi, serta pengalaman bekerjanya yang notabene tidak semuanya dapat menguasai materi di dalam tupoksinya. Dan itu tidak cukup untuk membawahi mitra SKPD di Pemprov Jawa Timur. Apalagi Jawa Timur adalah sebuah provinsi dengan daerah yang luas dengan mengelola belanja 23 triliun rupiah yang dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Dan bagaimanapun perkembangan arah Jawa Timur, mau atau tidak mau sedikit

banyak pasti tergantung pada anggota dewan. Jika anggota dewan tidak memiliki sumber daya yang cukup, sumber data yang cukup, maka dikatakannya sebagai berjalan tanpa arah. Karena masyarakat tentu sangat membutuhkan detail data, untuk melakukan baik fungsi legislasi, fungsi anggaran, maupun fungsi pengawasan. Di samping itu, di DPR pusat juga sudah disediakan staf tenaga ahli yang dibiayai oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil studi di atas, ditemukan tentang harapan yang disampaikan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur terkait kebutuhan untuk mendukung tupoksinya yang dikelompokkan dalam kategori tabel di bawah ini:

**Tabel 15**  
**Harapan Terkait Tupoksi**

No.	Harapan anggota legislatif terkait Tupoksinya
01.	Minimal satu anggota dewan memiliki satu staf ahli pribadi yang dibiayai oleh pemerintah untuk membantu dalam pelaksanaan tupoksinya. Karena selama ini staf ahli yang ada hanya untuk melayani fraksi maupun komisi, sehingga kinerjanya kurang maksimal untuk keperluan anggota dewan secara individu. Anggota dewan yang berasal dari <i>background</i> disiplin ilmu, kompetensi ilmiah, pengalaman organisasi, serta pengalaman bekerjanya, yang notabene tidak semuanya dapat menguasai semua materi di dalam tupoksinya. Apalagi Jawa Timur adalah sebuah provinsi dengan daerah yang luas dengan mengelola belanja 23 triliun rupiah. Dan bagaimanapun perkembangan arah Jawa Timur, mau atau tidak mau sedikit banyak tergantung pada kinerja anggota dewan.

No.	Harapan anggota legislatif terkait Tupoksinya
	Jika anggota dewan tidak memiliki sumber daya yang cukup, sumber data yang cukup, maka dikatakannya sebagai berjalan tanpa arah. Karena anggota dewan sangat membutuhkan detail data, untuk melakukan fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan.

Pada dimensi motivasi, adaptasi, dan harapan anggota DPRD, hasil studi menjelaskan bahwa motivasi menjadi anggota DPRD, adaptasi awal terkait fungsi DPRD, dan harapan anggota DPRD Jawa Timur terkait tupoksinya, tergambar dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Anggota legislatif memiliki motivasi yang beragam menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Kesamaannya, yaitu dengan otoritasnya ingin mengabdikan kepada masyarakat melalui kompetensi yang mereka miliki. Dengan otoritasnya, ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan banyak kebijakan yang bisa dituangkan melalui Perda guna kepentingan masyarakat.
2. Dalam menyesuaikan diri terkait fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan, membutuhkan rata-rata sekitar dua bulan. Namun tingkat kesulitan terkait adaptasi pada fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan, masing-masing anggota dewan menjawab tidak sama. Beberapa alasan kenapa mereka mampu cepat beradaptasi dengan tupoksinya, diantaranya karena; paradigma eksekutifnya membuka pintu untuk dialog secara terbuka dengan legislatif, para senior

anggota dewan *incumbent* mau diajak *sharring* tentang fungsi kedewanan, kesiapan belajar jauh hari sebelum menjadi anggota dewan, pengalaman menjadi anggota dewan di kabupaten, serta ada sekolah kader di partainya sebelum masuk menjadi anggota dewan.

3. Harapan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur terkait tupoksinya, minimal ada satu staf ahli pribadi yang dibiayai oleh pemerintah untuk membantu melayani anggota dewan dalam melaksanakan tupoksinya. Karena selama ini staf ahli yang ada hanya untuk melayani fraksi maupun komisi, sehingga kinerjanya kurang maksimal terhadap individual anggota dewan. Dengan anggota dewan yang berasal dari berbagai *background* dan disiplin ilmu, baik kompetensi ilmiah, pengalaman organisasi, serta pengalaman bekerjanya yang notabene tidak dapat menguasai semua materi di dalam tupoksinya. Jika anggota dewan tidak memiliki sumber daya yang cukup, sumber data yang cukup, maka dikatakannya sebagai berjalan tanpa arah.



# BAB VII

## PENUTUP

Pembelajaran mandiri merupakan hal yang sangat penting bagi para anggota legislatif terutama dalam rangka meningkatkan kompetensinya pada fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan serta memahami peranan sosialnya sehari-hari. Hal ini karena melihat fakta di lapangan tentang minimnya Parpol maupun Sekretariat DPR/DPRD dalam menyelenggarakan Diklat/Bimtek/*workshop*. Dalam kaitannya dengan objek studi pada buku ini menunjukkan bahwa anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki konsep diri (*the self-concept*) dalam pembelajaran secara mandiri. Mereka mampu mengarahkan dirinya sendiri (*self-direction*) dan menentukan dirinya sendiri (*self-determination*) dalam melakukan pembelajaran mandiri.

Kesadaran diri dan inisiatif para anggota legislatif dalam proses pembelajaran mandiri pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: pengalaman menjadi anggota dewan; pengalaman organisasi/partai politik; pengalaman pendidikan

formal; dan kesiapan belajar (*readiness to learn*) untuk meng-*up grade* dan meng-*up date* diri.

Sementara itu, ada banyak sumber belajar para anggota legislatif baik dari sesama manusia yang terkait maupun dari sumber-sumber lain yang dipandang relevan, seperti halnya LSM, media elektronik dan cetak, diklat/pelatihan Bimtek, kasus-kasus yang datang dari konstituen, dan karya ilmiah seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya. Dari banyak-nya sumber belajar tersebut, orientasi belajar (*orientation to learning*) yang digunakan oleh anggota legislatif berpusat pada pemecahan permasalahan yang dihadapi (*problem centered orientation*).

Anggota legislatif pada umumnya memiliki motivasi yang beragam untuk duduk menjadi wakil rakyat. Kesamaannya yaitu dengan otoritasnya ingin mengabdikan kepada masyarakat melalui kompetensi yang mereka miliki. Sementara itu, setelah pelantikan menjadi wakil rakyat, umumnya anggota legislatif membutuhkan waktu paling lama dua bulan untuk menyesuaikan diri terkait tugas dan fungsinya. Namun demikian, guna mempercepat dan menyukseskan proses pembelajaran mandiri, anggota legislatif memiliki harapan, yaitu minimal ada satu staf ahli pribadi yang dibiayai oleh pemerintah untuk membantu melayani anggota dewan dalam melaksanakan tupoksinya. Karena selama ini staf ahli yang ada hanya untuk melayani fraksi maupun komisi, sehingga kinerjanya kurang maksimal terhadap individual anggota dewan.



# DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, L.W dan Krathwohl, D.R, 2010. *Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran dan Asesmen (Revisi Taksonomi Pendidikan Bloom)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- A. Kathleen, Richard E Mayer, Pintrich R Paul, Rath James, Wifrock C Marlian, 2001. *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assesing. A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objective*. Abridged Edition. New York : Logman Inc.
- Baiyin, Y, 2003. *Toward a Holistic Theory of Knowledge and Adult Learning*. Human Resource Development Review. 2, (2), 106-129
- Bandura, A, 1986. *Social Fondation of Thought and Action: A Social Cognitif Theory*. New jersey: Prentice Hall, Inc.
- Bonham, L. A. (1989). *Self-directed orientation toward learning: A learning style? In H. B. Long & Associates (Eds.), SDL: Emerging theory and practice* (pp. 13- 42). Norman, OK: Oklahoma Research Center for Continuing Professional and Higher Education, University of Oklahoma.
- Botkin, J.W., 1984. *No Limits To Learning: Bridging The Gaps*. Oxford Pergamon Press.
- Candy PC, 1991. *Self-direction for life-long learning: a comprehensive guide to theory and practice*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Coles, Edwin K, Townsend, 1977. *Adult Education in Developing Countries*. Pergamon Press Ltd., Great Britain, pp 1-16

- Darkenwald, Gordon D., and Meriam, Sharan B. (1982) *Adult Education Foundations of Practice*. New York: Harper and Row Publisher.
- Delors, J., 1996. *Learning: The treasure Within*. Paris: Unesco. Elias, J.L., 1980. *Philosophical Foundation of Adult Education*. Malabar Florida.
- Freire. P., 1970. *Pedagogy of the Oppressed*. New York: the Seabury Press.
- Gage, N.L & Berliner, David C. (1998). *Educational Psychology 6th Edition*. Boston New York: Houghton Mifflin Company.
- Gibbons, Maurice, 2002. *The Self Directed Learning Handbook Challenging Adolescent Student to Excel*. San Fransisco: Jhon Wiley & Sons, Inc.
- Gross, R., 1991. *Peak Learning: How to Create Your Own Lifelong Education Program for Personal Enjoyment and Profesional Success*. New York. Putnam.
- Guglielmino, L. M., & Guglielmino, P. J., 1991. *Expanding your readiness for self-directed learning*. Don Mills, Ontario: Organization Design and Development Inc.
- Hiemstra, R., (1994), *Self-directed learning*. In T. Husen & T. N. Postlethwaite (Eds.), *The International Encyclopedia of Education (second edition)*, Oxford: Pergamon Press. <http://home.twcny.rr.com/hiemstra/sdlhdbk.html> (diakses 7 Juli 2017)
- Hoxeng, J., dkk., 1975. *Nonformal Education in Equador: An Approach To Non formal Education: Massachusetts*. Center For International Education, School of Education, University of Massachusetts.
- Hurlock, E.B. 1999. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Alih bahasa: Istiwidayati & Soedjarwo. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.
- Inggalls, J., 1973. *A Trainer Guide To Andragogy It is Concept, Experience and Application*. Washington Departemen of Health Education and Welfare.
- Jarvis, Peter. *Adult and Conditioning Education: Theory and Practice*. London: Croom Helm, 1992.
- Kambuaya, O., 2012. *27 Kunci Sukses Meningkatkan Kapasitas sebagai Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam Sistem*

- Pemerintahan NKRI. Penerbit CV. Aswaja Pressindo Yogyakarta.
- Knowles, M., 1950. *Informal Adult Education: A Guide For Administrator, Leader and Teachers*. New York, Association Press.
- , 1970. *Self Directed Learning: A Guide for Learners and Teachers*. New York: Association Press.
- , 1975. *Self-directed learning: a guide for learners and teachers*. New York: Association Press.
- , 1984. *The Adult Learner: A Neglected Species (3rd Ed.)*. Houston, TX: Gulf Publishing.
- , 1984. *Andragogy in Action*. San Francisco: Jossey-Bass.
- , 1989. *The Making of an Adult Educator*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Knowles, M., & Associates. (1984). *Andragogy in Action. Applying modern principles of adult education*. San Francisco: Jossey Bass.
- Knowles MS, Erickson M., 1990. *Self-directed learning: A guide for learners and teachers*. New York: Cambridge Book Company.
- Moore, M G., dan Kearsley, G., 1996. *Distance Education: A Systems View*. Belmont, C A: Wadsworth Publishing Company.
- Morgan, Barton, et al., (1976). *Methods in adult education*. Danville, Illinois: The Interstate Printers & Publishers, Inc.
- Novak, J. D. and Gowin, D. B., 1984. *Learning How to Learn*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rogers, J., 1973. *Adult Learning*. Barret-Kohler Published, Inc. San Fransisco.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- Republik Indonesia. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. UU No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

- Sabbaghian, Z., 1980. *Adult self-directedness and self-concept: An exploration of relationship.*, Iowa State University, 1979. *Dissertation Abstract International*, 40, 3701-A.
- Saraka, 2001. *Model Belajar Swarah dalam Pengembangan Sikap Mental Wiraswasta.* Bandung, PPS, UPI.
- Sharan, B. Merriam (editor), 2001. *The New Uptade on Adult Learning Theory.* San Francisco. Jossey Bass.
- Slameto, 2003. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya.* Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Srinivasan, L., 1977. *Perspectives on Non Formal Adult Learning: Functional Education For Individual, Community and National Development, Connecticut Prentice Hall.* New York: Association Press.
- Sudjana, D., 2000. *Pendidikan Luar Sekolah, Sejarah, Azas.* Bandung Falah Production.
- Suprijanto, 2007. *Pendidikan Orang Dewasa dari Teori Hingga Aplikasi.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Swanson, A., Richard & Elwood, F., Holton III, 2009. *Foundations Of Human Resources Development.* Berret – Kohler Publisher San Francisco.
- Thoha, M., (2002). Efektifitas penyelenggaraan fungsi DPRD berdasarkan pendekatan kompetensi. *Makalah Diskusi Panel "Profil DPRD Masa Depan"*. LAN Jakarta.
- Unesco, 1988. *Continuing education: New policies and Directions.*
- Yang, Baiyin, Karen E. Watkins, and Victoria J. Marsick, 2002. The Construct of the Learning Organization: Dimensions, Measurement, and Validation. *Human Resource Development Quarterly Journal* Vol. 15 no. 1 p. 31-55

# PROFIL PENULIS



**AGUS WAHYUDI, SH. MSI** adalah Widya Iswara Ahli Utama pada Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Provinsi Jawa Timur (BPSDM PROV. JATIM ) dengan Pangkat Pembina Utama Madya / IVD.

## DATA RIWAYAT PENDIDIKAN TEKNIS/STRUKTURAL

No	Pendidikan>Nama Diklat	Lembaga Penyelenggara	Tahun Lulus
1.	P5D	Diklat Prov Jatim	1989
2.	Bintek Penyusunan Per – UU-an	Diklat Prov Jatim	1989
3.	SEPALA	Diklat Prov Jatim	1995
4.	SPAMA	Diklat Prov Jatim	1997
5.	SPAMEN	Diklat Prov Jatim	2005
6.	Kursus Bahasa Inggris	Diklat Kota Kediri	2010
7.	Pelatihan Perencanaan Pembangunan	Diklat Kota Kediri	2010
8.	Pelatihan AKIP	Diklat Kota Kediri	2010
9.	Pelatihan Potensi Peningkatan Pendapatan Daerah	Diklat Kota Kediri	2010
10.	Pelatihan Etika Pem& Pel Masyarakat	Diklat Kota Kediri	2010
11.	Pelatihan Manajemen dan Pengembangan SDM	Diklat Kota Kediri	2010

**DATA RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL**

<b>No</b>	<b>Jabatan Struktural / Fungsional</b>	<b>TMT</b>
1.	Kepala Kantor Ketenaga Kerja di Kediri	2001 s/d 2004
2.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kediri	2005 s/d 2008
3.	Sekretaris DPRD Kota Kediri	2008 s/d 2009
4.	Kepala Disbudparpora Kota Kediri	2009 s/d 2010
5.	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Kediri	2010 s/d 2010
6.	Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Kediri	2010 s/d 2011
7.	Sekretaris Daerah Kota Kediri	2011 s/d 2014
8.	Staf Ahli Bidang Pembangunan Provinsi Jawa Timur	2014 s/d 2016
9.	Kepala Dinas PMD	2016 s/d 2018
10.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur	2019 s/d 2020

**M**enjadi anggota legislatif merupakan impian bagi banyak orang. Hal ini terbukti dari fakta banyaknya anggota masyarakat yang saling berlomba-lomba dalam mengikuti kontestasi politik, terutama dalam momen pemilihan umum (pemilu). Dari pemilu ke pemilu, data menunjukkan bahwa semakin banyak anggota masyarakat yang berminat untuk ikut terlibat secara langsung dalam proses menjadi anggota legislatif dari mulai seleksi di tingkat partai.

Buku ini merupakan hasil kajian penelitian terhadap perilaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam pengembangan diri (*self-development*) mereka. Seperti kita ketahui bersama bahwa anggota legislatif di era reformasi sekarang ini dituntut untuk lebih memahami aspirasi masyarakat yang semakin kompleks dan beragam. Dengan ‘belajar mandiri’, baik melalui literatur dan referensi yang ada, mereka juga melakukan teknik *mentoring* kepada senior mereka yang terpilih pada periode sebelumnya.

# Self Learning



Sebagai Embrio  
Pengembangan Diri  
Anggota Legislatif



Kategori :

Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)  
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581  
Telp/Fax : (0274) 4533427  
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)  
✉ cs@deepublish.co.id  
📘 Penerbit Deepublish  
📱 @penerbitbuku\_deepublish  
🌐 www.penerbitdeepublish.com

